



LAPORAN TAHUNAN 2024

Direktorat Pemberdayaan
Masyarakat dan Pelaku Usaha
Pangan Olahan



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Yanti Ratnasari, SP., MP

Pengarah

Ema Setyawati, S.Si., Apt., ME

Dyah Sulistyorini, Apt., MSc

Dra. Indriemayatie, Asri Gani, Apt.

Ruki Fanaike, STP, MSi

Penyusun

Ayusya Dian Paramita , S.Farm, Apt

Cita Lustriane, STP, M.Si

Devi Riani, ST, M.Si

Dewintha Syandi Khairunnissa, S.T.P.

Dilaekha Ryan Permata, S.Si

Eni Nur'aini, S.Ak.

Eva Yuliana Fitri, S.Si., M.Epid

Fitriani, SKM

Gilang Rimadini, S.Kom

Ima Ananda, S.P., M.Epid

Indra Pramularsih, S.Farm, Apt,. MfoodTech

Lusiana Friska L. Gaol, A.Md.Ak.

Novita Indriyanti, A.Md

Nur Allimah Yunita, S.TP.,M.Si

Nurita Lastri Tampubolon, S.T.P.

Ratna Wulandari, S.F, Apt.,M.Sc

Ratih Tri Andayani, S.Ak.

Rizan Febriana Pratama, S.Farm, Apt

Roy Parjuangan Nababan, A.Md

Teti Rosniawati, S. TP., M.Si

Vinni Rahayu Ningsih, S.Farm, Apt

Visca Oktavia, A.Md

Penyunting

Nabila Ayunisa Fajriani, S.T.

Rizki Fatma Hari, S.Kom

Siti Rohimah, S.S

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan penyusunan kegiatan Laporan Tahunan 2024 di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan selama tahun 2024 telah diselesaikan dengan baik.

Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi kepada para pemangku kepentingan seputar kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan. Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan terus berbenah untuk menjadi lebih baik dalam melaksanakan tugasnya kepada masyarakat maupun pelaku usaha pangan olahan.

Terima kasih kepada seluruh tim Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan atas hasil pencapaian tahun 2024. Keberhasilan dalam penyelesaian kegiatan ini didukung juga oleh kerjasama yang baik dengan UPT BPOM dan para stakeholder.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi pelaksanaan kegiatan yang lebih baik lagi. Laporan Tahunan 2024 ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2024 serta mendorong peningkatan kualitas dan semangat kerja bagi seluruh pegawai dalam memberikan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 27 Maret 2025

Direktur Pemberdayaan Masyarakat
dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ema Setyawati'.

Ema Setyawati, S.Si, Apt. M.E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	xv
<i>HIGHLIGHT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN UMUM	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	4
BAB II PENGELOLAAN SUMBERDAYA	6
2.1 SUMBER DAYA MANUSIA	6
2.1.1 DATA KEPEGAWAIAN.....	6
2.1.2 KEBUTUHAN PEGAWAI	9
2.1.3 PENINGKATAN KOMPETENSI SDM.....	10
2.2 SARANA DAN PRASARANA	11
2.3 ANGGARAN	11
2.4 IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG).....	17
BAB III HASIL KEGIATAN.....	19
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan.....	27
Indikator Kinerja Utama 1:Presentase PKP/Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan olahan sesuai pedoman	27
Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka pendampingan penerapan CPPOB/HACCP di UMKM	27
Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMKM Pangan Olahan	28
Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga	30
Training CPPOB Untuk UMKM	31
Advokasi dan Sosialisasi Program Pangan Aman Goes to Campus	34
Bimtek dan Kerja Lapang Mahasiswa terlatih sebagai Fasilitator UMKM	36
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan.....	39

Indikator Kinerja Utama 2: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	39
Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan	39
Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	43
Pelatihan Berbasis Kompetensi SKKNI Penyuluh Keamanan Pangan Tk.I	44
Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka Pendampingan Penerapan CPPOB/HACCP di UMKM	45
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya Peran Serta Pemerintah Daerah Terhadap Keamanan Mutu dan Gizi Makanan.....	48
Indikator Kinerja Utama 1: IKK.1 Persentase Kab/kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	48
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Keamanan Pangan untuk IRTP	48
Pengembangan Materi Keamanan Pangan untuk IRTP	50
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya Peran Serta Pemerintah Daerah Terhadap Keamanan Mutu dan Gizi Makanan.....	51
Indikator Kinerja Utama 2: Jumlah kab/kota yang menerapkan program keamanan pangan (Desa Pasar Sekolah).....	51
Gebyar Keamanan Pangan Sekolah	51
Koordinasi Lintas Sektor Keamanan PJAS	52
Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Desa Pangan Aman	54
Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	61
Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan Program PJAS	64
Implementasi Kegiatan CPE (ASEAN Health Cluster 4)	67
Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman	69
Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.....	73
Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN	74
Lomba Desa Pangan Aman	78
Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.....	81
SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Mutu Gizi Makanan	83
Indikator Kinerja Utama 1: Persentase kader keamanan Pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	83
KIE Kader Keamanan Pangan	83
Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pramuka	84
Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Pramuka	86
SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatkan Pendampingan Pelaku Usaha dan Pelayanan Publik di Bidang Makanan	87

Indikator Kinerja Utama 1: Jumlah Fasilitator yang Dibina Untuk Melakukan Pendampingan Kepada UMK Pangan Olahan	87
Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	87
Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka pendampingan penerapan CPPOB/HACCP di UMKM	88
Pembinaan Usaha Ritel Pangan dalam rangka Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Peredaran	89
Pelatihan Berbasis Kompetensi SKKNI Penyuluh Keamanan Pangan Tk. I	90
Sadar Pangan Aman Santri (SAPA Santri)	90
SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatkan Pendampingan Pelaku Usaha dan Pelayanan Publik di Bidang Makanan	93
Indikator Kinerja Utama 2: Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	93
Pengembangan Aplikasi Istana UMKM.....	93
Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan	94
SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemda dan Stakeholder dalam Pengawasan Makanan	94
Indikator Kinerja Utama 1: Jumlah Pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	94
Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	94
Advokasi Kabupaten/Kota terkait Penerbitan SPP-IRT	95
Asistensi Regulasi	95
Aplikasi SPP-IRT	96
Penghargaan Kab/Kota Pangan Aman.....	98
Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMK Pangan Olahan	100
Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan	101
SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Makanan	102
Indikator Kinerja Utama 1: Jumlah Kader Yang Memahami Prinsip Keamanan Pangan	102
Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan	102
Sinergi Peningkatan Kapasitas Komunitas Melalui Sinergi Dasa Wisma <i>Engagement</i>	106
Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Pramuka	108
Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan dan Krida Saka POM	109
SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Makanan	110
Indikator Kinerja Utama 2: Tingkat Efektifitas KIE Makanan	110
Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	110
Podcast Keamanan Pangan	115
<i>Branding</i> Keamanan Pangan	117
Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMKM	126

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	128
KIE UMK PO Bagi Kelompok Rentan/Disabilitas	131
Pengembangan Media Seni Budaya Lokal Keamanan Pangan	131
Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Keamanan Pangan Berbasis Seni Budaya Tradisional.....	132
Pelatihan Pengembangan Kompetensi <i>Risk Communication and Community Engagement (RCCE)</i> / Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat (KRPM) melalui Komunikasi Digital.....	137
SASARAN KEGIATAN 7: Meningkatkan Peran Aktif UPT BPOM yang di Bina Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	138
Indikator Kinerja Utama 1: Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	138
Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMKM Pangan Olahan	138
Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan PJAS	141
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Pangan Aman	142
Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.....	146
SASARAN KEGIATAN 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	149
Indikator Kinerja Utama 1: Indeks RB Dit. PMPUPO.....	149
Implementasi RB.....	149
Pokja Manajemen Perubahan	149
Pokja Penataan Tata Laksana	149
Pokja SDM.....	150
Pokja Akuntabilitas	152
Pokja Pengawasan	154
Pokja Pelayanan Publik.....	157
SASARAN KEGIATAN 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	160
Indikator Kinerja Utama 2: Nilai Pengelolaan Kearsipan	160
Implementasi RB.....	160
SASARAN KEGIATAN 9: Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Berkinerja Optimal	160
Indikator Kinerja Utama 1: Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	160
Pengembangan Kompetensi ASN	160
Forum Koordinasi Teknis Deputi Pengawasan Pangan Olahan	164
SASARAN KEGIATAN 10: Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.....	167

Indikator Kinerja Utama 1: Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	167
Pengelolaan TIK	167
Updating dan Pengembangan Aplikasi	169
SASARAN KEGIATAN 11: Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Secara Akuntabel	170
Indikator Kinerja Utama 1: Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPUPO	170
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Administrasi PMPUPO.....	170
Pengelolaan Satker	171
BAB IV PENUTUP.....	173
4.1 KESIMPULAN.....	173
4.2 SARAN	174
LAMPIRAN.....	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Visi.....	1
Gambar 2. Misi	1
Gambar 3. Budaya Organisasi “PIKKIR”	2
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat PMPUPO	4
Gambar 5. Sebaran Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	6
Gambar 6. Sebaran Pegawai PNS berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2024	8
Gambar 7. Sebaran Pegawai berdasarkan Usia.....	9
Gambar 8. Peta Strategis Level 2 Direktorat PMPUPO	19
Gambar 9. Tangkapan Layar Nilai NPSS Dit. PMPUPO Tahun 2024	26
Gambar 10. Pelaksanaan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Tingkat Pertama dan Muda Tahun 2024	28
Gambar 11. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pendampingan UMKM Pangan Olahan.....	30
Gambar 12. Peserta Training CPPOB bagi UMK Pangan Regional Barat Tahun 2024.....	33
Gambar 13. Pembukaan yang dihadiri oleh Kepala UPT BPOM dan Instruktur dari Fasnas BPOM.....	33
Gambar 14. Peserta Training CPPOB bagi UMK Pangan Regional Tengah dan Timur Tahun 2024.....	33
Gambar 15. Advokasi dan Sosialisasi Program Pangan Aman Goes to Campus	35
Gambar 16. Penandatanganan dengan 17 Perguruan Tinggi di Indonesia.....	36
Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Bimtek dan Kerja Lapang Mahasiswa terlatih sebagai ..	38
Gambar 18. Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Tahun 2024	41
Gambar 19. Dokumentasi Penyelenggaraan WFSD 2024 x Zestival	52
Gambar 20. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Keamanan Pangan PJAS.....	53
Gambar 21. Flyer Advokasi Keamanan Pangan Regional Barat	55
Gambar 22. Dokumentasi Kegiatan Advokasi Keamanan Pangan	56
Gambar 23. Kegiatan Pertemuan Teknis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman 2024.....	57
Gambar 24. Dokumentasi Kegiatan Germas Sapa	58
Gambar 25. Sinergi Program Desa Pangan Aman dengan PMT Berbahan Pangan Lokal	60
Gambar 26. Pelaksanaan FGD dalam rangka Koordinasi Lintas Sektor Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	64
Gambar 27. Pedoman dan Materi Keamanan Pangan Tahun 2024.....	65
Gambar 28. Video Milestone PJAS	67
Gambar 29. Laporan Kegiatan CPE (ASEAN Health Cluster 4).....	68
Gambar 30. Pedoman Kegiatan Desa Pangan Aman.....	70
Gambar 31. Publikasi Video Keamanan Pangan di Media Sosial	72
Gambar 32. Dokumentasi Kegiatan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)	73

Gambar 33. Dokumentasi Kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	78
Gambar 34. Dokumentasi Kegiatan Lomba Desa Pangan Aman.....	80
Gambar 35. Dokumentasi Kegiatan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	82
Gambar 36. KIE Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan.....	83
Gambar 37. Highlight Kegiatan Saka POM 2024	84
Gambar 38. Pelantikan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka POM Tingkat Nasional.....	85
Gambar 39. Pelatihan Instruktur Saka POM	85
Gambar 40. Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Pramuka di Kota Mataram	86
Gambar 41. Dokumentasi Bimtek CPPOB	91
Gambar 42. Dokumentasi Penyuluhan Keamanan Pangan dalam Rangka Penjaminan.....	92
Gambar 43. Penyerahan Piagam Terbaik I Kabupaten/Kota Pangan Aman	100
Gambar 44. Pengumuman Kabupaten Badung sebagai Terbaik I Kabupaten/Kota Pangan Aman Regional Tengah dan Timur	100
Gambar 45. Roadmap Program SAPA SANTRI.....	101
Gambar 46. Roadmap Program Orang Tua Angkat (OTA).....	102
Gambar 47. Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Tahun 2024	105
Gambar 48. Bimtek Kader KP Kegiatan Sinergi Peningkatan Kapasitas Komunitas Melalui Dasa Wisma <i>Engagement</i>	107
Gambar 49. Dokumentasi Sosialisasi bersama Anggota Pramuka di Banda Aceh.....	108
Gambar 50. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan dan Krida Saka POM.....	109
Gambar 51. Dokumentasi Webinar Paman KeCe Seri 1 Tahun 2024.....	114
Gambar 52. Pagelaran Ketoprak dan Pencanangan Seni Budaya dan Permainan Tradisional sebagai Media Edukasi Obat dan Makanan	115
Gambar 53. Spotify Podcast Klub Pompi Report 2024.....	115
Gambar 54. YouTube Report Podcast Klub Pompi.....	116
Gambar 55. Capaian atau <i>Reach</i> Akun Facebook Klub Pompi Tahun 2024	118
Gambar 56. Konten Promosi <i>Podcast</i> dan Stunting	118
Gambar 57. Jumlah <i>Views</i> dan <i>Profil Visit</i> akun Instagram klubpompi.bpom Tahun 2024 .	119
Gambar 58. Persentase <i>Follower</i> Instagram klubpompi.bpom dalam Gender dan Usia.....	119
Gambar 59. <i>Brand Awareness Score</i>	120
Gambar 60. <i>Hashtags</i> dan jumlah Interaksi Instagram klubpompi.bpom	120
Gambar 61. Analisa Konten Kolaborasi Terbaik Instagram klubpompi.bpom	120
Gambar 62. Analisa Konten <i>Carusel</i> Terbaik Instagram klubpompi.bpom	121
Gambar 63. Jumlah <i>Reach</i> Akun Instagram pmpupangan.bpom.....	123
Gambar 64. Jumlah <i>Reach & Impressions Growth</i> Akun Instagram pmpupangan.bpom....	123
Gambar 65. Jumlah Interaksi Konten Akun Instagram pmpupangan.bpom.....	124
Gambar 66. Jumlah Pertumbuhan <i>Follower</i> Akun Instagram pmpupangan.bpom	124
Gambar 67. <i>Overview</i> Kinerja Akun TikTok Dit. PMPUPO.....	125
Gambar 68. Dokumentasi Webinar Dapoer Kita.....	127
Gambar 69. Dokumentasi UMK Camp	128

Gambar 70. Dokumentasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	130
Gambar 71. Dokumentasi KIE Pangan Olahan Bagi Kelompok Disabilitas	131
Gambar 72. Dokumentasi FGD	132
Gambar 73. Dokumentasi Pagelaran Seni Budaya	132
Gambar 74. Dokumentasi Festival Harmoni Budaya Nusantara	134
Gambar 75. Dokumentasi Pelaksanaan Dialog BPOM di LPP-RRI	136
Gambar 76. Dokumentasi Pelaksanaan Pengembangan Pelatihan <i>Risk Communication and Community Engagement (RCCE)</i>	137
Gambar 77. Focus Group Discussion dan Sinergi Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan.....	140
Gambar 78. Dokumentasi Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Jawa Timur	141
Gambar 79. Aplikasi GKPD Online	143
Gambar 80. Penilaian Pelaksanaan Desa Pangan Aman 2024	144
Gambar 81. Sertifikat yang Telah Terbit selama Kegiatan Desa Pangan Aman tahun 2024	146
Gambar 82. Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	147
Gambar 83. Aplikasi SIPAMAN	148
Gambar 84. Capaian dan Kegiatan Pokja Pengawasan	156
Gambar 85. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender	162
Gambar 86. Kegiatan Pelatihan Pelayanan Publik Pelayanan di Era Disrupsi Digital dan Sukses Menjalin Komunikasi Dengan Gen X, Y dan Z dan <i>Grooming</i>	163
Gambar 87. Kegiatan Pelatihan RCCE.....	164
Gambar 88. Kegiatan Forum Koordinasi Teknis Deputi 3 tahun 2024	166
Gambar 89. Tampilan Dashboard BOC untuk data Gerakan Keamanan Pangan Desa	167
Gambar 90. Infografis Pengingat Akses <i>Email Corporate</i> Bagi Pegawai	168
Gambar 91. Aplikasi yang dikembangkan oleh Dit PMPUPO dalam Portal ega SPBE.....	170
Gambar 92. Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulanan	171
Gambar 93. Pembahasan Pengelolaan Administrasi Satker Kedeputian 3.....	172

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2024.....	7
Tabel 2. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	9
Tabel 3. Realisasi Anggaran per Output	12
Tabel 4. Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2024	13
Tabel 5. Rincian Realisasi Anggaran dari masing-masing Kegiatan.....	13
Tabel 6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2024	20
Tabel 7. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2024	21
Tabel 8. Capaian Rincian Output (RO) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2024.....	25
Tabel 9. Capaian Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Tahun 2024	31
Tabel 10. Pelaksanaan Training CPPOB bagi UMK Tahun 2024	32
Tabel 11. Advokasi dan Sosialisasi PAGC Tahun 2024.....	34
Tabel 12. Hasil Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan.....	41
Tabel 13. Unit Kompetensi Bimtek Kader Keamanan Pangan	42
Tabel 14. Nilai Interval Konversi (NIK) pada Survei Kepuasan Peserta Bimtek.....	43
Tabel 15. Hasil Survei Kepuasan Peserta Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	44
Tabel 16. Data Kabupaten/Kota yang Menerbitkan SPP-IRT sesuai Standar 2023.....	49
Tabel 17. Pemenang Lomba Sekolah dengan PJAS Aman berdasarkan keputusan Tim Penilai	75
Tabel 18. Pemenang Lomba Desa Pangan Aman berdasarkan keputusan Tim Penilai	80
Tabel 19. Tahapan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.....	81
Tabel 20. Capaian Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Tahun 2024	88
Tabel 21. Hasil pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Tahun 2024.....	104
Tabel 22. Materi Bimtek Kader Keamanan Pangan berdasarkan SKKNI Keamanan Pangan	104
Tabel 23. Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan melalui Sinergi Dasa Wisma <i>Engagement</i> Tahun 2024	107
Tabel 24. Jumlah Kader Keamanan Pangan dan Masyarakat Teredukasi melalui Sinergi Dasa Wisma <i>Engagement</i> Tahun 2024	108
Tabel 25. Rincian Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Pramuka	109
Tabel 26. Pelaksanaan Webinar Keamanan Pangan Untuk Konsumen Cerdas (Paman KeCe)	111
Tabel 27. Capaian Pelaksanaan Webinar Dapoer Kita Series Tahun 2024.....	127
Tabel 28. Capaian Pelaksanaan UMK Camp <i>Series</i> Tahun 2024.....	128
Tabel 29. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	129
Tabel 30. Pelaksanaan Edukasi Keamanan Pangan melalui LPP-RRI.....	135

Tabel 31. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.....	147
Tabel 32. Nilai SAKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020 - 2024.....	153
Tabel 33. Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang Direncanakan	161
Tabel 34. Tampilan Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Dit PMPUPO Tahun 2024	168

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rincian Peralatan, Meubelair, dan Perangkat lainnya di Dit. PMPUPO175

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020-2024 dan Dokumen Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan memiliki 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dimana telah diperoleh 12 (dua belas) IKK dengan capaian kinerja “SANGAT BAIK”, 2 (dua) IKK dengan capaian “BAIK” dan 2 (dua) IKK dengan capaian “CUKUP”.

Keberhasilan pencapaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang diperoleh dari integrasi data dengan aplikasi SIMETRIS Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2024 adalah sebesar 104,83 dengan predikat ISTIMEWA. Capaian NPSS tersebut diperoleh dari rata-rata capaian NPSS 3 perspektif strategis sebagai berikut: a. Perspektif Stakeholder, mendapatkan NPSS 105,30 dengan kategori Istimewa, b. Perspektif Internal Process, mendapatkan NPSS 107,04 dengan kategori Istimewa, dan c. Perspektif *Learning & Growth*, mendapatkan NPSS 108,80 dengan kategori Istimewa.

Tercapainya keberhasilan sasaran strategis di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, tidak terlepas dari penyerapan anggaran. Anggaran pagu awal Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha pada tahun 2024 sebesar Rp17.440.050.000,-. Dikarenakan adanya blokir anggaran *automatic adjustment*, maka anggaran yang dapat dikelola sampai dengan akhir tahun pada tahun 2024 sebesar Rp. 16.354.152.000,-. Tercatat realisasi penggunaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp 16.354.069.329 atau dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% dari total anggaran yang dapat dikelola.

HIGHLIGHT

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan, maka Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan senantiasa untuk terus mengembangkan inovasi dan kreativitas yang berkesinambungan dengan harapan memberikan kepuasan layanan kepada stakeholders dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan beberapa prestasi yang telah diraih pada periode tahun sebelumnya, diantaranya dengan memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 2021, maka hal ini memacu komitmen Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan untuk tetap berusaha mengharumkan nama BPOM. Selama tahun 2024, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menerima beberapa penghargaan dan apresiasi, yaitu:



Pemenang Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Terbaik II Tahun 2024 Kategori Unit Kerja Pusat

Piagam penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 kategori "Pelayanan Prima"





Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Kategori Pelaksana Unit Kerja Pusat sebagai badan publik “informatif”.

Sertifikat Unit Kerja yang Komitmen Perbaikan Berkelanjutan dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Tahun 2024



Penghargaan Top 24 Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM Tahun 2024, yaitu Desa Pangan Aman

Penghargaan Top 24 Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM Tahun 2024, yaitu

Aplikasi SPP-IRT Terintegrasi OSS RBA



Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusapan

Sertifikat Apresiasi unit dengan responden IKEPU terbanyak dan nilai IKEPU yang baik Tahun 2024.





Sertifikat Apresiasi kepada Dit PMPUPO sebagai Peserta Festival Hari Budaya Nusantara (FHBN) oleh Dep Bid Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi OR, Kemenko PMK

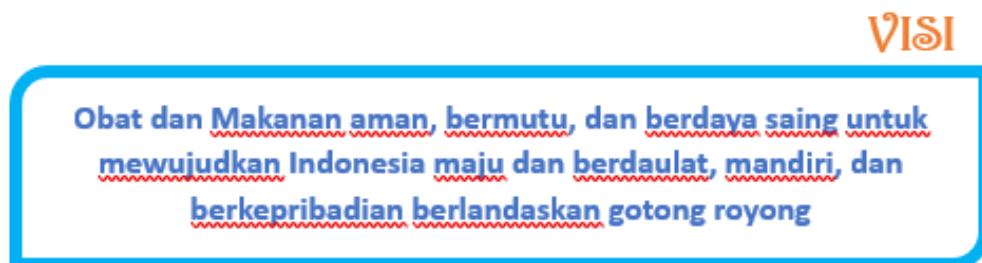
BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) merupakan salah satu Direktorat di lingkungan Kedeputusan Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI yang dibentuk sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020.

VISI, MISI, DAN BUDAYA ORGANISASI

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan memiliki peran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM. Visi dan Misi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dapat dilihat pada gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Visi

MISI

- 1** Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2** Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
- 3** Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 4** Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Gambar 2. Misi

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjunjung tinggi budaya organisasi **PIKKIR**: Profesionalisme, Integritas, Keteladanan, Kerja Sama, Inovasi, dan Responsif. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi setiap insan BPOM dalam mewujudkan pengawasan yang kredibel, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan **PIKKIR**, BPOM berkomitmen memberikan pelayanan terbaik demi

kesehatan dan keselamatan bangsa Penjelasan tentang budaya PIKKIR dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Budaya Organisasi "PIKKIR"

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa" yang dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara. Sehubungan dengan hal itu, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan mengadopsi *core values* tersebut dimana semua pegawai telah mengikuti Sosialisasi dan Internalisasi *Employer Branding* dan *Core Value BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)*

Nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK merupakan landasan penting bagi terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, dan efisien. Dengan menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam setiap aspek pekerjaan, ASN dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa dan negara, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif

Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai tindak lanjut, BPOM menetapkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, yang kemudian diubah melalui Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 dan terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022.

Sejak tahun 2018, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha. Seiring dengan kebutuhan organisasi dan penyederhanaan birokrasi, BPOM menerbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi. Direktorat ini telah menyesuaikan sistem kerjanya melalui penugasan pejabat fungsional dan pelaksana dalam tim kerja, guna mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien.

Dalam mengimplementasikan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023, Direktorat PMPUPO membentuk 6 (enam) tim kerja dalam jajaran struktur organisasi sebagaimana tertera pada Gambar 4.



Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat PMPUPO

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PMPUPO menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;
- b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;
- d) pelaksanaan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah di bidang pengawasan pangan olahan;
- e) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;
- f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan; dan
- g) pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

BAB II PENGELOLAAN SUMBERDAYA

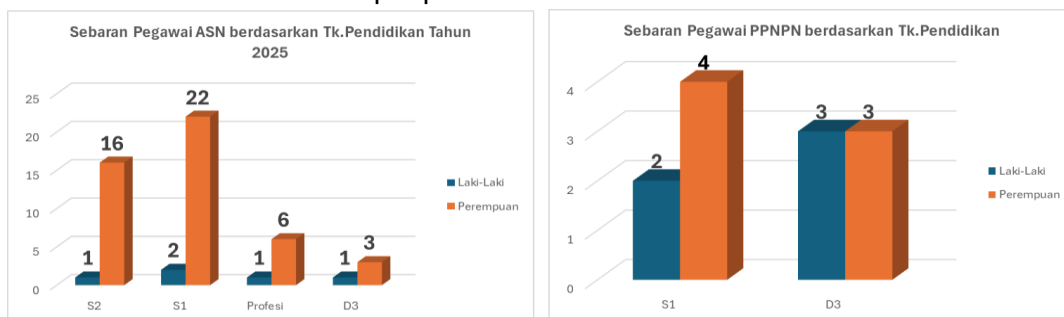
2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

2.1.1 DATA KEPEGAWAIAN (BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN, JABATAN DAN USIA)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan didukung oleh tenaga PNS dan PPNPN. Pada awal Maret 2024, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menerima pegawai PPPK sebanyak 5 (lima) orang dan 2 (dua) pegawai mutasi pada bulan April dan Juli. Berdasarkan pengadaan PPPK dan pertimbangan pengembangan pegawai, pegawai yang PPPK yang ditempatkan pada unit kerja yaitu Nabila Ayunisa Fajriani, S.T., Yoga Tri Nugroho, S.K.M., Gilang Rimadini, S.Kom., Ida Fitria, S.Pd, dan Fajar Nur Mahfudhin, S.Kom serta pegawai mutasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yaitu Kartini S.H. Panjaitan, SKM, MKM dan pegawai mutasi internal Badan POM yaitu Sheila Evicka Novri, S.Farm., Apt.

Pada awal November unit kerja juga mengalami pengurangan pegawai dikarenakan adanya mutasi ke Balai POM Tangerang atas nama Sandhyani Ellis M Damajanti, S.Si, Apt, dikarenakan adanya proses pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya, yang bersangkutan tidak dapat ditempatkan kembali pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dikarenakan kebutuhan pada gap jabatan tersebut telah terpenuhi. Selain itu terdapat pegawai yang mulai melaksanakan tugas belajar pada pertengahan Agustus 2024 atas nama Chyntia Dewi Nurhayati Suharma, S.T.P., sehingga dilepaskan dari jabatan fungsionalnya dalam masa tugas belajar yang bersangkutan.

Dengan adanya penambahan dan pengurangan pegawai tersebut pada 2024, total jumlah pegawai pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menjadi 64 orang terdiri atas 39 (tiga puluh sembilan) PNS, 13 (tiga belas) PPPK dan 12 (dua belas) PPNPN. Gambaran sebaran pegawai Direktorat PMPUPO berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2024 terdapat pada Gambar 5.



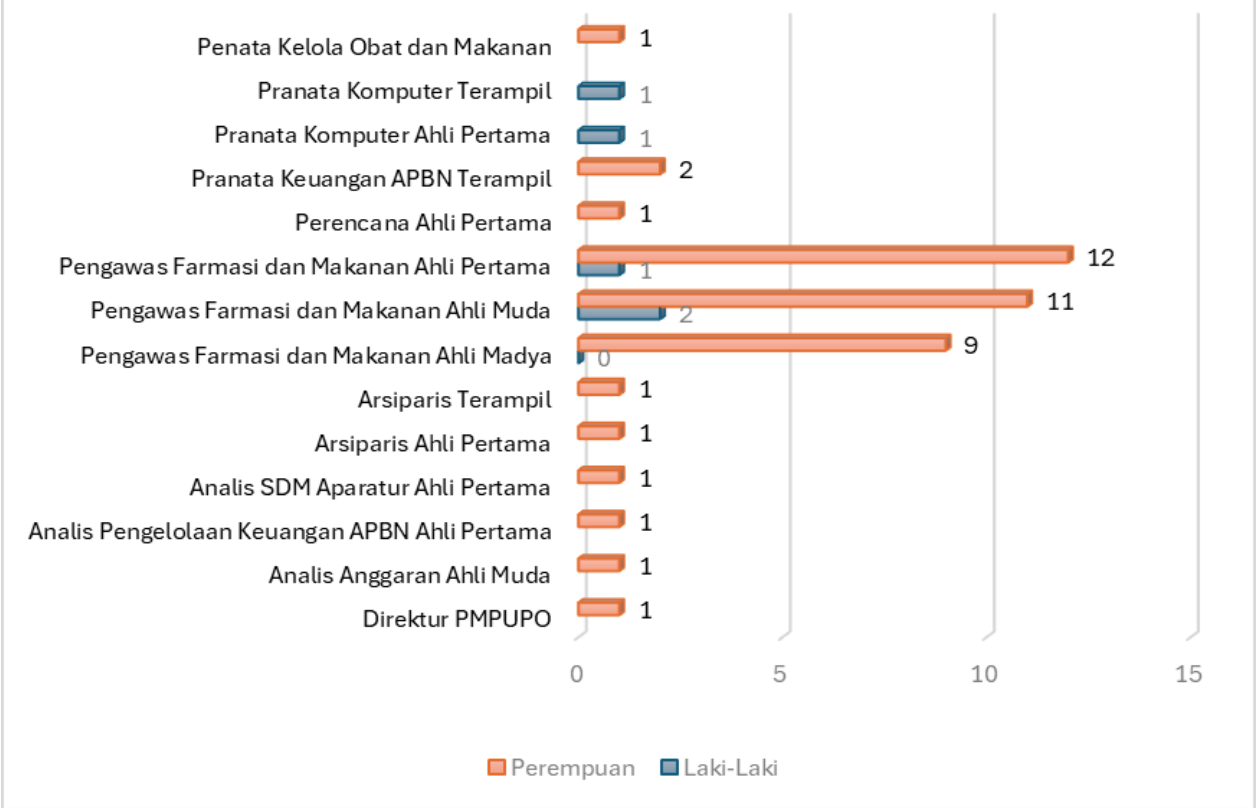
Gambar 5. Sebaran Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Dari total 64 orang pegawai, pegawai ASN berjumlah 52 (lima puluh dua) sebanyak 1 (satu) orang sebagai pejabat struktural yaitu Direktur, sebanyak 51 (lima puluh satu) orang memegang jabatan fungsional dan 12 (dua belas) pegawai PPNPN. Sebaran jabatan fungsional pegawai ASN tahun 2024 seperti pada Tabel 1 berikut:

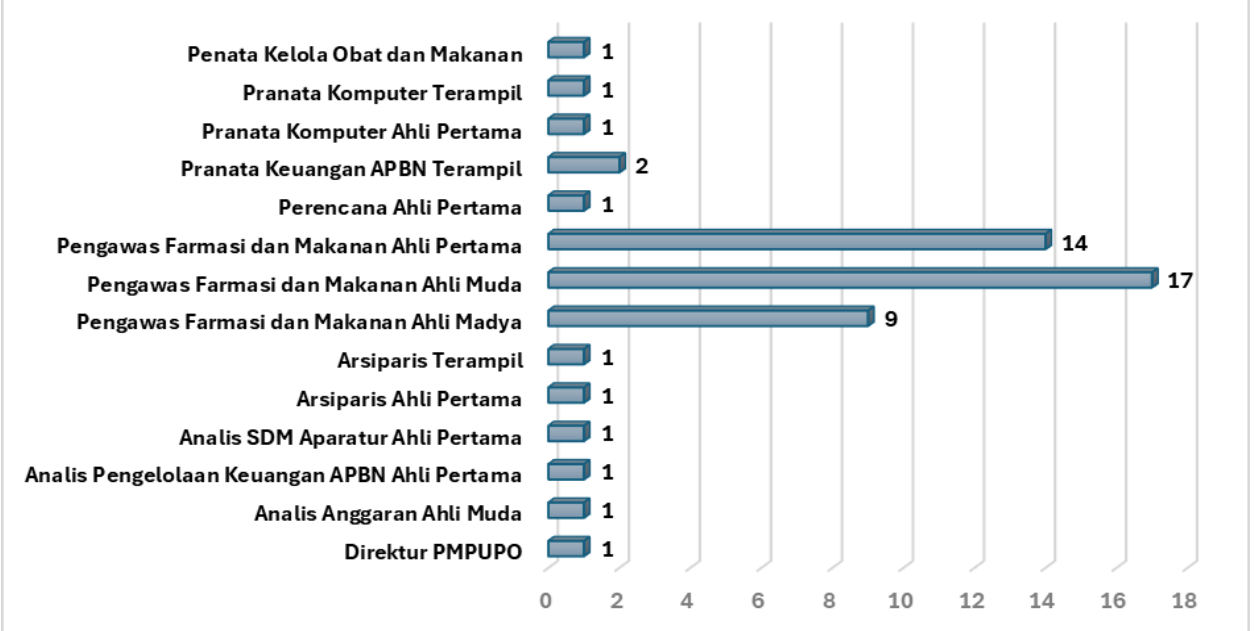
Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

Tingkat Pendidikan	Nama Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Total	
D3	Arsiparis Terampil	0	1	1	
	Pranata Keuangan APBN Terampil	0	2	2	
	Pranata Komputer Terampil	1	0	1	
D3 Total		1	3	4	
Profesi Apoteker	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	0	2	2	
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	1	5	6	
Profesi Total		1	7	8	
S1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	0	1	1	
	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	0	1	1	
	Arsiparis Ahli Pertama	0	1	1	
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	0	0	0	
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	0	5	5	
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	1	9	10	
	S1- Apoteker	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	0	3	3
		Perencana Ahli Pertama	0	1	1
		Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	1
	S1 Total		2	21	23
S2	Direktur	0	1	1	
	Penata Kelola Obat dan Makanan	0	1	1	
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	0	7	7	
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	1	6	7	
	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	0	1	1	
S2 Total		1	16	17	
Total		5	47	52	

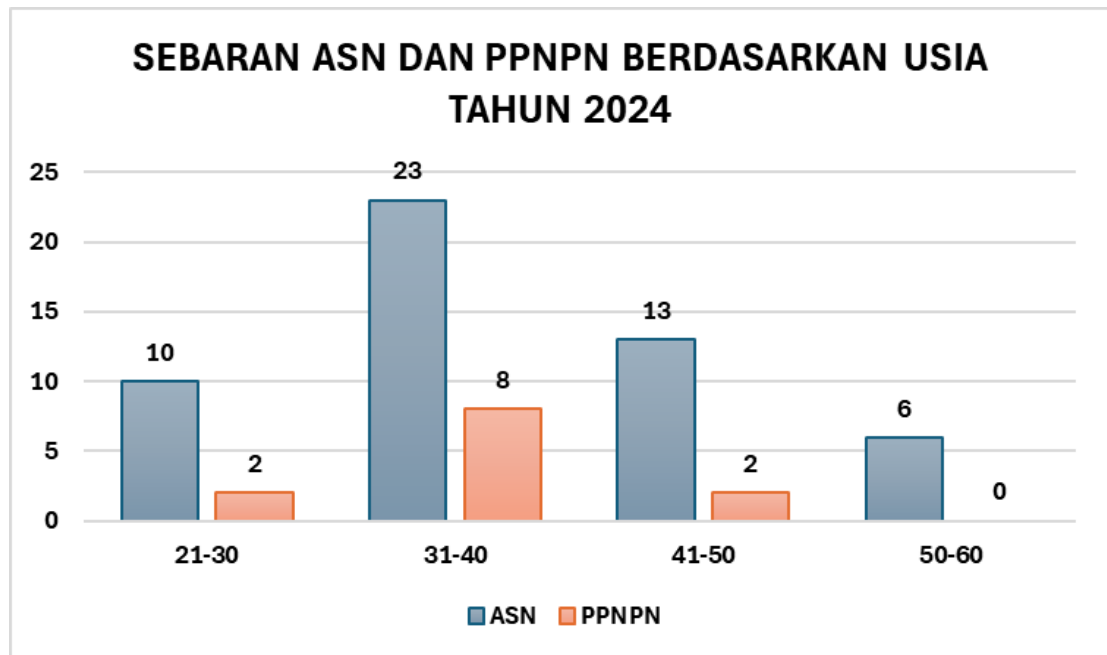
Sebaran Pegawai ASN berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2024



Sebaran Pegawai ASN berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2024



Gambar 6. Sebaran Pegawai PNS berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2024



Gambar 7. Sebaran Pegawai berdasarkan Usia

Profil pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 7. Pegawai ASN banyak berada pada kelompok usia produktif, paling banyak pada kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 23 orang. Pegawai PPNPN juga terbanyak berada pada kelompok usia 31-40 tahun sejumlah 8 orang.

2.1.2 KEBUTUHAN PEGAWAI

Berdasarkan analisis beban kerja yang dibagi berdasarkan jabatan, jumlah karyawan yang dibutuhkan adalah 92 orang. Dengan beban kerja tersebut terdapat gap antara beban kerja yang ada dengan jumlah karyawan yang tersedia. Masih terdapat kekurangan 47 orang untuk memenuhi kebutuhan tenaga pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan pada tahun 2024.

Tabel 2. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK

NO	Nama Jabatan	Jumlah		
		ABK	Besetzung	GAP
1	Direktur	1	1	0
2	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	9	9	0
3	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	30	17	13
4	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	32	14	18
5	Analisis Anggaran Ahli Muda	1	1	0
6	Perencana Ahli Pertama	2	1	0
7	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	1
8	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	0

NO	Nama Jabatan	Jumlah		
		ABK	Besetzung	GAP
9	Arsiparis Ahli Pertama	1	1	0
10	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	1	0
12	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
13	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	1
14	Arsiparis Penyelia	1	0	1
15	Arsiparis Mahir	2	0	2
16	Arsiparis Terampil	2	1	1
17	Pranata Komputer Penyelia	1	0	1
18	Pranata Komputer Mahir	1	0	1
19	Pranata Komputer Terampil	1	1	0
20	Pranata Keuangan APBN Terampil	2	2	0
21	Penata Kelola Obat dan Makanan	0	1	-1
	Jumlah	93	52	47

2.1.3 PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi masing-masing pegawai,

memperhatikan hasil penilaian asesmen kompetensi yang telah dilakukan oleh PPSDM BPOM. Untuk pemenuhan kompetensi, Direktorat terus berupaya mendorong pegawai melakukan pengembangan kompetensi secara daring melalui aplikasi IDEAS maupun mengikuti kompetensi lainnya.

Pada Pertengahan Agustus tahun 2024, Chyntia Dewi Nurhayati Suharma, S.T.P., melaksanakan tugas belajar di Wageningen University and Research, Belanda. Selain yang mengikuti Tubel ada 3 orang pegawai yang mengikuti Ibel. Pegawai atas nama Eni Nuraeni, S.Ak juga melanjutkan Magister Manajemen di Universitas Pamulang dengan izin belajar tanpa melepaskan jabatan sebagai Analis Pengelola Keuangan Ahli Pertama dan sebagai PPK. Pegawai atas nama Lusiana Friska L. Gaol, A.Md.Ak. juga melanjutkan pendidikan strata satu pada Universitas Terbuka dan tanpa melepaskan jabatan yang sedang diampu yang bersangkutan sebagai Pranata

Keuangan APBN Terampil, selain itu juga terdapat pegawai atas nama Yunindya Cahyaningrum, A.Md yang juga menempuh pendidikan S1 nya pada 2024 lalu tanpa melepaskan jabatannya sebagai Arsiparis Terampil. Meskipun BPOM tidak lagi menyediakan anggaran untuk tugas belajar, tetapi masih sangat banyak *scholarship* yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pendidikan di dalam maupun luar negeri. Kesempatan tugas belajar ini diberikan bagi pegawai yang berminat.

Selain melalui pendidikan formal juga dilakukan beberapa pelatihan, bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi telah disediakan untuk dapat diikuti oleh seluruh pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Jenis Pelatihan (klasikal/non klasikal) yang diikuti pegawai Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan; Pelatihan Fungsional; Pelatihan Teknis Lainnya (Bimtek, workshop, seminar, dll).

Sampai dengan akhir Desember 2024, 100% Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP. Pengembangan kompetensi yang diikuti pegawai pada tahun 2024 meliputi pelatihan teknis, pelatihan fungsional, bimtek, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Total pengembangan kompetensi selama satu tahun terakhir ini mencapai 694 jumlah pelatihan klasikal ataupun non klasikal. yang telah diikuti pegawai. Pemenuhan pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP juga mendukung nilai Indeks Profesionalitas ASN yang menjadi salah satu indikator kinerja unit, maka dari itu hal ini harus dijadikan perhatian bersama .

2.2 SARANA DAN PRASARANA

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas antara lain:

- Ruang Kerja yang terdiri atas Ruang Direktur, Ruang Kerja, dan Ruang Rapat serta Ruang *Podcast*;
- Peralatan, meubelair dan kelengkapan lain dalam melaksanakan aktivitas;
- Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas.

Rincian Peralatan, Meubelair, dan perangkat lainnya dapat dilihat pada lampiran 1.

2.3 ANGGARAN

Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha pada tahun 2024 dengan nilai pagu sebesar Rp17.440.050.000,- Dana tersebut sudah termasuk anggaran untuk kegiatan KIE kepada masyarakat dengan Tokoh Masyarakat (3165) dengan

anggaran sebesar Rp1.474.560.000,- sedangkan anggaran untuk kegiatan teknis (4132) sebesar Rp15.965.490.000,-

Pada pertengahan tahun 2024, dilakukan *automatic adjustment* blokir anggaran sebesar Rp1.060.497.000,- sehingga total anggaran kegiatan teknis (4132) yang dikelola berkurang menjadi Rp14.904.993.000,-. Anggaran KIE Tokoh Masyarakat (3165) dilakukan revisi pindah anggaran ke unit lain, sehingga menyebabkan anggaran kegiatan tersebut berkurang menjadi Rp1.449.159.000,-

Pada akhir tahun, total realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha pada tahun 2024 adalah sebesar Rp14.904.913.729,- atau sebesar 99,99%. Realisasi anggaran kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat sebesar Rp1.449.155.600 atau sebesar 99,99%. Realisasi anggaran dari masing-masing output sebagaimana tampak pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Realisasi Anggaran per Output

PAGU dan REALISASI ANGGARAN DIT PMPUPO 2024					
	Anggaran awal	AA/revisi	Anggaran setelah AA/revisi	Realisasi	Prosentase (%)
Teknis (4132)	15.965.490.000	1.060.497.000	14.904.993.000	14.904.913.729	99,999
KIE (3165)	1.474.560.000	25.401.000	1.449.159.000	1.449.155.600	99,9998
Total	17.440.050.000		16.354.152.000	16.354.069.329	99,999

No	KEGIATAN	OUTPUT	VOLUME			REALISASI ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (3165.BDC.001)	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	4500 orang	4500 orang	100%	1.449.159.000	1.449.155.600	99,99
2	Koordinasi (3165.AEA.001)	Sosialisasi	1 laporan	1 laporan	100%	45.989.000	45.988.160	100
3	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (4132.BDC.001)	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	225 Kader/Org	239 orang	106,20%	1.682.363.000	1.682.352.768	100
4	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (4132.FBA.001)	Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	40 Kab/ Kota	40 Kab / Kota	100%	3.505.707.000	3.505.689.539	100
5	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (4132.QDC.001)	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan	245 Orang	290 orang	118,37	3.429.151.000	3.429.126.565	100
6	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (4132.UBA.001)	Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	380 Prov/ Kab/ kota	380 Kab/Kota	100%	6.241.783.000	6.241.756.697	100

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, setiap tahun realisasi anggaran Dit PMPUPO mencapai sekitar 99%, seperti tampak pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2024

Tahun	Pagu	Realisasi	% Realisasi
2020	8.915.011.000	8.903.628.485	99,87
2021	9.929.701.000	9.928.248.584	99,99
2022	12.385.556.000	12.384.419.198	99,99
2023	18.223.845.000	18.223.300.991	99,99
2024	16.354.152.000	16.354.069.329	99,99

Rincian realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Rincian Realisasi Anggaran dari masing-masing Kegiatan

Rincian Output		Pagu	Realisasi	%
3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi III	1.449.159.000	1.449.155.600	100
	'054 Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh	1.449.159.000	1.449.155.600	100
	E Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaa Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	1.449.159.000	1.449.155.600	100
4132.BDC.001	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	1.682.363.000	1.682.352.768	
	'051 Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	33.960.000	33.960.000	100
	A Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja	33.960.000	33.960.000	100
	052 Peningkatan Kapasitas Kader Keamanan Pangan	984.396.766	984.396.766	100
	A Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan	714.527.000	714.524.190	100
	B KIE Kader Keamanan Pangan	96.600.000	96.600.000	100
	C Sinergi Peningkatan Kapasitas Komunitas Melalui Dasa Wisma Engagement	173.275.000	173.272.576	100
	053 Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	664.001.000	663.996.002	100
	A Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	382.144.000	382.140.262	100

Rincian Output			Pagu	Realisasi	%
	B	Podcast RCCE Untuk Kader	61.085.000	61.084.300	100
	D	Koordinasi Lintas Sektor kegiatan Pramuka	220.772.000	220.771.440	100
4132.FBA. 001	Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP		3.505.707.000	3.505.689.539	100
	052	Asistensi Regulasi Peraturan BPOM mengenai IRTP dan Moneyv	2.813.722.000	2.813.707.835	100
	A	Advokasi Kab/kota terkait Penerbitan SPP-IRT	1.061.685.000	1.061.681.753	100
	B	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Masyarakat atau individu	56.681.000	56.679.400	100
	C	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Keamanan Pangan untuk IRTP	56.701.000	56.700.363	100
	D	Sosialisasi Keamanan Pangan Aman IRTP	83.435.000	83.433.604	100
	F	Implementasi RB	847.295.000	847.291.160	100
	G	Pengembangan Kompetensi ASN	707.925.000	707.921.555	100
	053	Kab/Kota Pangan Aman	691.985.000	691.981.704	100
	A	Koordinasi Lintas Sektor Program Kab/Kota Pangan Aman	384.261.000	384.258.464	100
	C	Pengelolaan Satker	36.603.000	36.602.240	100
	D	Pengelolaan TIK	271.121.000	271.121.000	100
4132.QDC. 001	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan		3.429.151.000	3.429.126.565	100
	051	Pembentukan dan Pemberdayaan Fasilitator Keamanan Pangan dari Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya	1.226.157.000	1.226.152.837	100
	A	Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Pramuka	163.736.000	163.735.780	100
	B	Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMKM	223.655.000	223.653.253	100
	C	Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi ORMAS/ASOSIASI/INKUBATOR BISNIS/Lembaga Lainnya	433.513.000	433.512.186	100
	E	Pengembangan Aplikasi ISTANA UMKM	155.915.000	155.915.000	100

Rincian Output			Pagu	Realisasi	%
	F	Training CPPOB untuk UMKM	249.338.000	249.336.618	100
	052	Pendampingan UMKM Pangan	1.279.248.000	1.279.236.877	100
	A	Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMKM Pangan Olahan	103.169.000	103.166.406	100
	B	Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan	358.304.000	358.298.303	100
	C	Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka pendampingan penerapan CPPOB/HACCP di UMKM	284.591.000	284.590.500	100
	D	Program SAPA SANTRI Santripreneurship PKP dalam rangka SPPIRT dan Bimtek CPPOB Santri Preneurship	519.011.000	519.009.568	100
	E	KIE UMK PO bagi Kelompok Rentan/Disabilitas	14.173.000	14.172.100	99.99
	053	Bimbingan Teknis UMKM Ritel Pangan	149.584.000	149.582.456	100
	A	Pembinaan Usaha Ritel Pangan dalam rangka Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Peredaran	149.584.000	149.582.456	100
	054	Pencetakan Fasilitator dari Mahasiswa melalui Kegiatan Pangan Aman Goes to Campus	774.162.000	774.154.395	100
	A	Advokasi dan Sosialisasi program pangan aman goes to campus	347.140.000	347.136.732	100
	B	Pelatihan Berbasis Kompetensi SKKNI Penyuluh Keamanan Pangan TK.I	196.261.000	196.259.180	100
	C	Bimtek dan kerja lapang mahasiswa terlatih sebagai fasilitator UMKM	230.761.000	230.758.483	100
4132.UBA.001	Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)		6.241.783.000	6.241.756.697	100
	051	Koordinasi Lintas Sektor	1.650.858.000	1.650.852.291	100
	A	Gebyar Keamanan Pangan Sekolah	326.055.000	326.054.127	100
	B	Forum Koordinasi Teknis Deputi Pengawasan Pangan Olahan	619.916.000	619.915.200	100
	C	Koordinasi Lintas Sektor PJAS	72.664.000	72.663.367	100
	D	Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Desa Pangan Aman	475.796.000	475.793.581	100

Rincian Output			Pagu	Realisasi	%
		E Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	156.427.000	156.426.016	100
	052	Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan	1.978.635.000	1.978.629.345	100
		A Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan Program PJAS	211.947.000	211.944.026	100
		B Implementasi Kegiatan CPE (Asean Health Cluster 4)	294.915.000	294.914.310	100
		C Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan desa Pangan Aman	681.631.000	681.629.895	100
		D Pengembangan pedoman dan materi kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas	187.150.000	187.149.114	100
		E Podcast Keamanan Pangan	169.002.000	169.002.000	100
		F Branding Keamanan Pangan	433.990.000	433.990.000	100
	053	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	1.766.097.000	1.766.086.535	100
		A Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan PJAS	64.741.000	64.740.897	100
		B Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Pangan Aman	122.032.000	122.030.992	100
		C Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	309.686.000	309.684.284	100
		D Monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi PMPU	373.723.000	373.716.856	100
		E Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Keamanan Pangan berbasis Seni budaya tradisional	533.6 35.000	533.6 33.506	100
		F Pengembangan Media Seni Budaya Lokal Keamanan Pangan	37.28 0.000	37.28 0.000	100
		G Updating dan Pengembangan Aplikasi	325.000.000	325.000.000	100
	054	Pelaksanaan lomba desa pangan aman, pasar aman dari BB dan Sekolah dengan PJAS Aman	846.193.000	846.188.526	100
		A Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN	323.318.000	323.315.252	100
		B Lomba Desa Pangan Aman	241.722.000	241.721.569	100

Rincian Output			Pagu	Realisasi	%	
		C	Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	281.153.000	281.151.705	100
4132.AEA	051		Pelaksanaan Sosialisasi	45.989.000	45.988.160	100
		A	Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan dan krida Saka POM	45.989.000	45.988.160	100

2.4 IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, RPJMN 2020-2024, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam lingkup BPOM, Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan menyatakan bahwa pelaksanaan PUG wajib dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja. Oleh karena itu, Dit. PMPUPO memulai integrasi pengarusutamaan gender di setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.

Sesuai dengan Rencana Aksi Pelaksanaan PUG BPOM yang dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.21.03.23.28 Tahun 2023, Dit. PMPUPO telah melaksanakan PUG sebagai berikut:

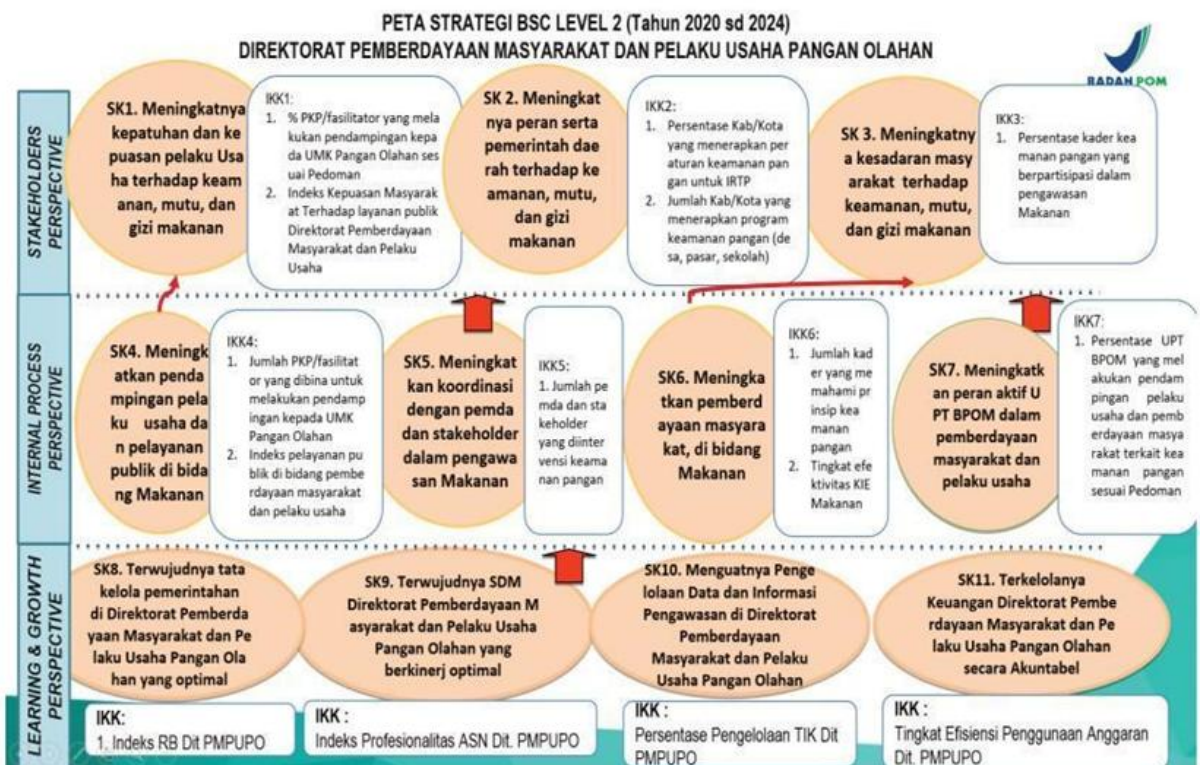
1. Penguatan kelembagaan PUG melalui partisipasi aktif dalam Pokja PUG BPOM dan SubPokja PUG tingkat Satuan Kerja Deputy III
2. Peningkatan pemahaman PUG bagi pimpinan Unit Kerja melalui keikutsertaan pada pembentukan *Gender Champion*, inisiasi pelaksanaan Bimtek PUG untuk seluruh pegawai Dit. PMPUPO serta mengikuti peningkatan kompetensi terkait PUG yang diselenggarakan oleh BPOM.
3. Peningkatan pengelolaan data terpilah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program kerja Dit. PMPUPO diantaranya dengan menggunakan daftar hadir format BPOM dan pengembangan database data terpilah.
4. Perencanaan dan penganggaran PUG melalui Gender Analysis Pathway 9 langkah dan Gender Budget Statement yang dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Beberapa program dan kegiatan Dit. PMPUPO Tahun Anggaran 2024 telah *ditagging* anggaran responsif Gender adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitator yg dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK pangan olahan
 - b. Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan
 - c. Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (Desa, Pasar, Sekolah)
5. Dit. PMPUPO juga menginisiasi Edukasi Keamanan Pangan Inklusif melalui penyediaan akses sarana dan prasarana ramah kelompok rentan, serta inovasi terkait Pelayanan Publik seperti pelatihan bahasa isyarat untuk petugas pelayanan publik, bimbingan teknis khusus kelompok rentan, produk informasi keamanan pangan dalam bentuk video yang dilengkapi dengan juru bahasa isyarat, fitur aksesibilitas website bagi penyandang disabilitas (WCA) pada subsite KlubPompi, dan fitur Juru Bahasa Isyarat yang diimplementasikan pada Webinar Keamanan Pangan untuk Konsumen Cerdas (Webinar Paman KeCe) dengan harapan dapat meningkatkan akses dan pemahaman informasi keamanan pangan bagi rekan disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Komitmen dan upaya Implementasi PUG di Dit. PMPUPO mendapatkan penghargaan dari Sekretaris Utama BPOM sebagai Unit Kerja yang Komitmen Perbaikan Berkelanjutan dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Tahun 2024.

BAB III HASIL KEGIATAN

Kinerja pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan tahun 2024 oleh mengacu pada revisi rencana strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020-2024 yang kemudian tertuang pada Perjanjian Kinerja Direktorat PMPUPO tahun 2024. Sasaran kinerja dan indikator kinerja sasaran kegiatan di Direktorat PMPUPO dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 8. Peta Strategis Level 2 Direktorat PMPUPO

Terdapat 11 Sasaran Kinerja Direktorat dan 16 indikator kinerja sasaran kegiatan yang mendukung Sasaran Program Deputy 3. Target masing-masing indikator kegiatan dapat dicapai melalui kontribusi penyelesaian kegiatan yang telah ditetapkan untuk masing-masing indikator (Tabel 6).

Tabel 6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
SK1. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	1. Persentase fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK sesuai dengan pedoman	74	Persen
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	91,75	Nilai
SK2. Meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	3. Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	40	Persen
	4. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	380	Kab/Kota
SK3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	5. Persentase kader keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	99,2	Persen
SK4. Meningkatkan pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang Makanan	6. Jumlah fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	245	Fasilitator
	7. Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	4,9	Nilai
SK5. Meningkatkan koordinasi dengan pemda dan stakeholder dalam pengawasan Makanan	8. Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	574	Pemda dan Stakeholder
SK6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Makanan	9. Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	980	kader
	10. Tingkat efektivitas KIE Makanan	96	Nilai
SK7. Meningkatkan peran aktif UPT BPOM dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	11. Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai Pedoman	90	Persen
SK8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di Direktorat Pemberdayaan	12. Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92,6	Nilai

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Satuan
Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	13. Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,5	Nilai
SK9. Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang berkinerja optimal	14. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	91,65	Nilai
SK10. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	15. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang optimal	3	Nilai
SK11. Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan secara Akuntabel	16. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	94	Persen

Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai Sasaran Kegiatan Direktorat Tahun 2024 seperti pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Persentase PKP/fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman	74	88,62	119,76	Sangat baik
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	91,75	91,92	100,19	Sangat baik
Meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap	Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	40	44,44	111,10	Sangat baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
keamanan, mutu, dan gizi makanan	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	380	380	100,00	Baik
Meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan	Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	99,2	99,58	100,38	Sangat baik
Meningkatkan pendampingan pelaku usaha dan pelayanan publik di bidang makanan	Jumlah PKP/fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	245	290	118,37	Sangat baik
	Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	4,9	4,96	101,22	Sangat baik
Meningkatkan koordinasi dengan pemda dan stakeholder dalam pengawasan makanan	Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	574	620	108,01	Sangat baik
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang makanan	Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	980	1129	115,20	Sangat baik
	Tingkat efektivitas KIE Makanan	96	99,62	103,77	Sangat baik
Meningkatkan peran aktif UPT BPOM dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai Pedoman	90	90,79	100,88	Sangat baik
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Direktorat Pemberdayaan	Indeks RB Dit PMPUPO	92,6	92,23	99,60	Cukup

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Ket
Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang optimal	Nilai Pengelolaan Kearsipan	97,5	97,91	100,42	Sangat baik
Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Dit. PMPUPO	91,65	87,27	95,22	Cukup
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Dit. PMPUPO yang optimal	3	3	100,00	Baik
Terkelolanya keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPUPO	94	100	106,38	Sangat baik

Keterangan:

Sangat baik	Baik	Cukup
-------------	------	-------

Dari 16 Indikator kinerja di atas, terdapat 2 indikator yang belum mencapai target dengan kategori cukup yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dengan capaian 99,60 dan IP-ASN dengan capaian 95,22. Masih perlu upaya perbaikan sedikit lagi agar dapat memperoleh realisasi sesuai target.

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk Indeks Reformasi Birokrasi (RB) :

1. Menetapkan target prioritas pembangunan ZI menyeluruh pada setiap area pembangunan ZI
2. Mendokumentasikan dengan baik keterlibatan pimpinan unit kerja secara langsung dalam seluruh tahapan penyusunan rencana dan penyusunan perjanjian kinerja
3. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara berkelanjutan terhadap transformasi digital Dit. PMPUPO pada bidang proses bisnis utama, bidang administrasi pemerintah, bidang pelayanan publik
4. Terus melanjutkan implementasi inovasi yang sudah dimiliki sejak mendapatkan predikat WBK dan terus berupaya mengembangkannya maupun mendorong penciptaan inovasi baru pada seluruh area perubahan berdasarkan hasil manajemen risiko unit kerja. Inovasi tersebut diharapkan sesuai dengan karakteristik unit serta dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun analisis dampak before-after atas inovasi yang dimiliki terhadap perbaikan unit kerja
6. Terus melanjutkan implementasi inovasi yang sudah dimiliki sejak mendapatkan predikat WBK dan terus berupaya mengembangkannya maupun mendorong penciptaan inovasi baru pada seluruh area perubahan berdasarkan hasil manajemen risiko unit kerja. Inovasi tersebut diharapkan sesuai dengan karakteristik unit serta dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dapat direplikasi oleh unit kerja

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk Indeks Profesionalitas ASN :

1. Memonitoring dan mengevaluasi nilai IP ASN setiap pegawai pada aplikasi IP-ASN SIASN, dan merekap kekurangan pada setiap dimensi.
2. Mengingatkan pegawai untuk melakukan peningkatan kompetensi melalui Ideas, yaitu tools pembelajaran online BPOM
3. Meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi yang disediakan atau diadakan oleh internal ataupun external BPOM.
4. Mendorong ASN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan penawaran-penawaran beasiswa dari PPSDM
5. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja pegawai agar dapat mencapai kinerja baik dan sesuai ekspektasi.

Untuk capaian Rincian Output (RO) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2024, sebagaimana terlihat pada Tabel 8

Tabel 8. Capaian Rincian Output (RO) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2024

No.	Rincian Output	Anggaran			Volume		
		Pagu	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian %
1	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE (3165.BDC.001)	1.449.159.000	1.449.155.600	100	4500	4500	100
2	Sosialisasi (4132.AEA.001)	54.010.000	45.988.160	85,15	1	1	100
3	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan Pangan olahan (4132.BDC.001)	1.804.047.000	1.691.042.968	93,74	225	238	106,2
4	Kabupaten/ Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP (4132.FBA.001)	3.870.156.000	3.545.799.896	91,62	38	40	105,26
5	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan (4132.QDC.001)	3.737.601.000	3.445.625.008	92,19	245	252	102,86
6	Kabupaten/ Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah) (4132.UBA.001)	6.499.676.000	6.243.812.697	96,06	350	350	100

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang diperoleh dari integrasi data dari aplikasi SIMETRIS Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2024 adalah sebesar 104,83 dengan predikat ISTIMEWA. Capaian NPSS tersebut diperoleh dari rata-rata capaian NPSS 3 perspektif strategis sebagai berikut: a. Perspektif Stakeholder, mendapatkan NPSS 105,30 dengan kategori Istimewa, b. Perpektif *Internal Process*,

mendapatkan NPSS 107,04 dengan kategori Istimewa, dan c. Perspektif *Learning & Growth*, mendapatkan NPSS 108,80 dengan kategori Istimewa.

Unit Kerja	Periode	TW	NPSS	Predikat	Terakhir Diperbarui	
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Desember 2024	4	104.83	Istimewa	05 Mar 2025 06:09 WIB	
Breakdown Detail Capaian NPSS						
STAKEHOLDER NP : 105.30						
No SK	Sasaran Kegiatan	No IKK	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tim Kerja
01	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan NSS : 109.98	01	Persentase Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman CI : 119.76 Sudah Diverifikasi Roren	74	88.62	Lihat
		02	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha CI : 100.19 Sudah Diverifikasi Roren	91.75	91.92	Lihat
02	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan NSS : 105.55	01	Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP CI : 111.10 Sudah Diverifikasi Roren	40	44.44	Lihat
		02	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah) CI : 100.00 Sudah Diverifikasi Roren	380	380	Lihat
03	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan NSS : 100.38	01	Persentase kader keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan makanan CI : 100.38 Sudah Diverifikasi Roren	99.2	99.58	Lihat

Gambar 9. Tangkapan Layar Nilai NPSS Dit. PMPUPO Tahun 2024

Nilai Istimewa menunjukkan capaian yang telah dilaksanakan oleh Dit PMPUPO melebihi 100% dari target yang sudah direncanakan.

SASARAN KEGIATAN 1	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan
Indikator Kinerja Utama 1	Persentase PKP/Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan olahan sesuai pedoman

1. Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka pendampingan penerapan CPPOB/HACCP di UMKM

UMK pangan berperan strategis dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pangan berkualitas guna menjaga kesehatan. UMKM juga menggerakkan perekonomian rakyat dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018 terdapat 1,9 juta industri manufaktur makanan dan minuman skala kecil dan mikro atau 99,6% dari seluruh industri manufaktur makanan dan minuman di Indonesia. Sektor makanan dan minuman menjadi penyumbang PDB industri non migas terbesar (34%). Sedangkan menurut Statistik E-commerce (BPS, 2020) jenis barang/jasa yang paling banyak terjual melalui e-commerce pada tahun 2019 adalah makanan, minuman dan bahan makanan yaitu sebesar 30,95% dari keseluruhan usaha yang menjadi sampel. Katadata (2019) memproyeksikan segmen pasar yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah makanan, termasuk pangan olahan, sebesar 60,37% yaitu dari US\$ 2 Miliar di tahun 2018 menjadi US\$ 3,2 Miliar di tahun 2019. Memperhatikan peran UMK dan juga pangan olahan yang sangat signifikan ini, maka perlu didukung dengan keberpihakan pada kemudahan berusaha serta peningkatan kapasitas UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas secara berkesinambungan.

Salah satu tantangan besar dalam peningkatan daya saing UMKM, khususnya UMK pangan, adalah keterbatasan pada berbagai aspek. Hambatan yang kerap dihadapi UMK Pangan untuk menyediakan produk berkualitas terkait dengan (1) metode dalam memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku, (2) sumber daya manusia, (3) peralatan, (4) modal, dan (5) sarana prasarana.

Terkait peningkatan daya saing UMKM, diperlukan peran fasilitator yang akan mendampingi UMKM dalam pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Untuk itu diperlukan tenaga yang kompeten sebelum mendampingi UMKM tersebut. Kompetensi diwujudkan dalam kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Untuk memastikan

kompetensi petugas, telah disyahkan Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan /atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan.

Pada tahun 2024, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Tingkat Pertama dan Muda untuk petugas UPT, dengan rincian 2 batch untuk PKP Pertama secara online dan 1 batch untuk PKP Muda secara offline. Total peserta sebanyak 93 orang petugas UPT BPOM. Dokumentasi Pelaksanaan Pelatihan tersebut dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Pelaksanaan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Tingkat Pertama dan Muda Tahun 2024

Partisipasi dalam pelatihan fasilitator didominasi oleh perempuan, karena peserta pelatihan ini adalah petugas UPT BPOM. Sebagian besar pegawai BPOM adalah perempuan (71,97%). Peningkatan partisipasi peserta pelatihan laki-laki dapat diupayakan dari organisasi pelaku usaha dan organisasi profesi.

2. Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMKM Pangan Olahan

Peran UMKM pangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi negara memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional dan peran penting dalam ekonomi

rakyat sebagai penggerak ekonomi keluarga. Selain itu, UMKM pangan merupakan aset Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan dan perluasan lapangan kerja dan lentur terhadap krisis serta merupakan alternatif usaha di masa krisis (dapat bertahan saat badai krisis ekonomi melanda Indonesia).

Badan POM melaksanakan pengawasan *pre market* dan *post market*. Untuk pengawasan *pre market* dilakukan melalui penilaian evaluasi keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan. Sedangkan untuk pengawasan *post market*, dengan sampling dan pengujian laboratorium serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi. Umumnya masalah yang dihadapi antara lain aspek higiene perorangan, sanitasi, pengelolaan lingkungan (sampah), fasilitas produksi belum bebas dari hama dan serangga, dan suplai air bersih. Penyebab utamanya adalah rendahnya pengetahuan, kesadaran dan keterampilan dalam menerapkan persyaratan CPPOB di sarana produksi. Sehingga diperlukan upaya peningkatan keamanan pangan di tingkat sarana produksi dan distribusi.

Peran dan partisipasi semua pemangku kepentingan melalui sinergi program terkait UMKM pangan olahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sangat diperlukan. Koordinasi secara sinergis dan kontinyu antar Kementerian/Lembaga/Pemda/Organisasi/Akademisi/ *E-commerce* dalam pelaksanaan pendampingan kepada UMKM perlu diperkuat melalui suatu pertemuan sehingga terbentuk suatu sinergi program.

Selama tahun 2024, Badan POM aktif berkoordinasi dengan beberapa Kementerian/Lembaga/ Pemda/Organisasi/Akademisi/*E-commerce* melalui beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan UMK Pangan Olahan dalam menerapkan CPPOB serta sarana UMKM telah dilakukan Pemeriksaan Sarana Baru (PSB). Kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah Webinar Dapoer Kita, Bimbingan Teknis CPPOB, PKP dalam rangka Pemenuhan Komitmen SPP-IRT, dan FGD Orang Tua Angkat. Dokumentasi kegiatan Perkuatan Lintas Sektor Pendampingan UMKM Pangan Olahan dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pendampingan UMKM Pangan Olahan

3. Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga lainnya

Upaya Badan POM dalam mendukung iklim usaha adalah dengan memberikan bimbingan dan pendampingan agar pelaku usaha mampu memiliki daya saing. Dengan banyaknya UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Badan POM tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan sinergi semua pihak, baik itu dengan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas masyarakat, asosiasi, dan stakeholder terkait lainnya. Untuk itu berbagai upaya kemitraan atau sinergisme untuk meningkatkan daya saing para pelaku usaha juga telah dilakukan oleh Badan POM bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Asosiasi, dunia pendidikan (termasuk dengan inkubator bisnis atau LPPM Universitas), dan *e-commerce*.

BPOM mengadopsi strategi pemberdayaan berbasis masyarakat, dengan bekerjasama dengan Ormas, Asosiasi atau Instansi lainnya melalui pemberdayaan fasilitator keamanan pangan untuk memperluas cakupan intervensi terhadap pelaku usaha pangan. Pembentukan

Fasilitator Keamanan Pangan berasal dari anggota Ormas, Asosiasi atau Lembaga lainnya telah diinisiasi sejak tahun 2017.

Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan salah satunya melalui Pelatihan bagi Fasilitator Nasional Keamanan Pangan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Fasilitator Keamanan Pangan, sehingga nantinya para fasilitator ini bisa mendiseminasikan pengetahuannya kepada Fasilitator Daerah dan mensosialisasikan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan. Untuk itu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menyelenggarakan Pelatihan bagi Fasilitator Keamanan Pangan dengan mengacu pada kurikulum Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Tingkat Pertama Berbasis Kompetensi sesuai Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan. Capaian Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Tahun 2024

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Lulus
1	Pelatihan Dasar Fasilitator Keamanan Pangan	24-25 April 2024	50	40
2	Pelatihan PKP Pertama Berbasis Kompetensi Batch 1	19-24 Juni 2024	30	24
3	Pelatihan PKP Pertama Berbasis Kompetensi Batch 2	2-5 Juli 2024	30	24

4. Training CPPOB Untuk UMKM

Dalam menjalankan fungsinya, BPOM menerapkan sistem pengawasan yang dilakukan 3 pilar, yaitu Pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah, Industri, dan Masyarakat. Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan, BPOM selaku pemerintah melaksanakan pengawasan *premarket* (sebelum produk beredar) dan *postmarket* (setelah produk beredar). Industri sebagai produsen harus dapat menjamin mutu, manfaat, dan khasiat obat dan makanan yang dihasilkan dengan menerapkan cara produksi yang baik, sedangkan masyarakat harus cerdas dalam memilih produk obat dan makanan yang akan dikonsumsi serta menyikapi informasi yang benar.

Dalam rangka mendorong peran industri untuk dapat menjamin mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan, BPOM melakukan kegiatan pemberdayaan bagi pelaku usaha. Pemberdayaan merupakan kegiatan dalam menumbuhkan iklim yang kondusif untuk

pengembangan usaha, terutama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini untuk mendukung untuk menjadi “Negara Maju tahun 2045” dengan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar nasional dan internasional. UMKM di wilayah Indonesia masih banyak yang terkendala dengan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) serta perolehan Nomor Izin Edar (NIE) Pangan Olahan baik BPOM MD. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM dalam melakukan kegiatan pemberdayaan UMKM yaitu mengadakan *Training* Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMKM Produsen Pangan agar dapat memperoleh Nomor Izin Edar BPOM MD.

Kegiatan *Training* CPPOB Bagi UMK Pangan di Regional Barat berkoordinasi dengan UPT BPOM dan SMESCO. UPT BPOM mengirimkan data UMKM binaannya untuk mengikuti *Training* CPPOB Bagi UMK Pangan.

Dalam pelaksanaan UMK Pangan akan didampingi oleh instruktur yang berasal dari fasilitator keamanan pangan yang telah mengikuti PKP Pertama berbasis kompetensi dalam memahami prinsip CPPOB dan mempersiapkan dokumen CPPOB yang sesuai standar dan dapat digunakan pada pendaftaran e-sertifikasi BPOM di OSS. Pelaksanaan *Training* CPPOB bagi UMK Tahun 2024 terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Pelaksanaan Training CPPOB bagi UMK Tahun 2024

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Instruktur Fasnas
1	<i>Training</i> CPPOB bagi UMK Pangan Regional Barat	5- 10 Juni 2024	117 pelaku UMK Pangan	20
2	<i>Training</i> CPPOB Bagi UMK Pangan Regional Tengah dan Timur	17 – 22 Juli 2024	141 pelaku UMK pangan	20

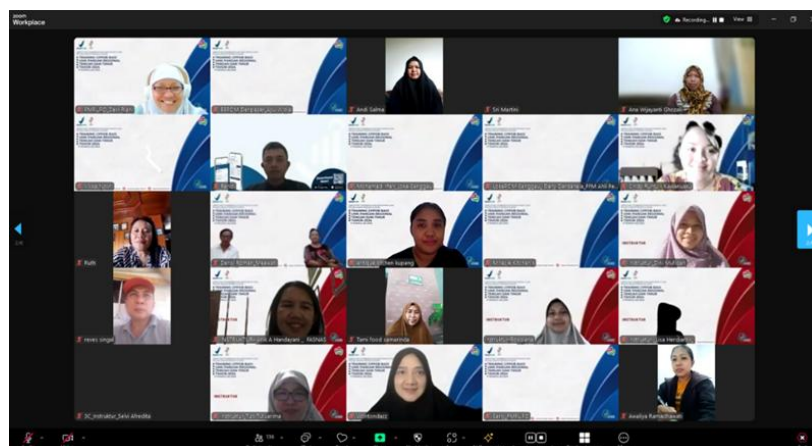
Hasil pelaksanaan yang dinilai Survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) dengan hasil 96,89 (Sangat Puas III) dan 95,21 (Sangat Puas II). Dokumentasi *Training* tersebut dapat dilihat pada Gambar 12-14.



Gambar 12. Peserta Training CPPOB bagi UMK Pangan Regional Barat Tahun 2024



Gambar 13. Pembukaan yang dihadiri oleh Kepala UPT BPOM dan Instruktur dari Fasnas BPOM



Gambar 14. Peserta Training CPPOB bagi UMK Pangan Regional Tengah dan Timur Tahun 2024

5. Advokasi dan Sosialisasi Program Pangan Aman Goes to Campus

Dalam upaya menciptakan SDM unggul di bidang keamanan pangan khususnya Fasilitator Keamanan Pangan, Direktorat PMPUPO melanjutkan kemitraan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Perguruan Tinggi. Kemitraan dengan Kemendikbudristek dilakukan melalui sinergi program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC) dengan Magang Bersertifikat dan Studi Independen (MSIB) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program PAGC - MSIB MBKM Platform Kemendikbudristek telah memasuki Batch 5 dan 6 pada tahun 2024.

Selanjutnya kemitraan dengan Perguruan Tinggi dilakukan melalui sinergi program PAGC dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di masing-masing Perguruan Tinggi. Namun pelaksanaan PAGC pada tahun 2024 ini sudah disinergikan dengan Platform Kemendikbud Ristek, sehingga pada tahun 2024 Direktorat PMPUPO melakukan Advokasi dan Sosialisasi PAGC guna memperluas cakupan Perguruan Tinggi tidak hanya di bawah naungan Kemendikbud Ristek-dikti tetapi juga di bawah Kementerian Agama serta memperluas cakupan wilayah Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi PAGC Tahun 2024 sesuai jadwal tertera pada Tabel 11. Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 15.

Tabel 11. Advokasi dan Sosialisasi PAGC Tahun 2024

NO	WILAYAH	PERGURUAN TINGGI	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Jayapura	Universitas Cenderawasih	28 Mei 2024
2.	Pontianak	Universitas Tanjungpura Universitas NU Pontianak	4 Oktober 2024
3.	Mataram	Universitas Mataram Universitas Muhammadiyah Mataram	20 September 2024
4.	Banda Aceh	Universitas Syiah Kuala	21 Oktober 2024
5.	Medan	Universitas Sumatera Utara	2 Januari 2024
6.	Gorontalo	Universitas Negeri Gorontalo	21 November 2024



Gambar 15. Advokasi dan Sosialisasi Program Pangan Aman Goes to Campus

Pada 9 Desember 2024, Badan POM c.q Direktorat PMPUPO telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan 17 Perguruan Tinggi dan melakukan penandatanganan Komitmen dan Dukungan dari 51 Perguruan Tinggi pada Program PAGC. Diharapkan MoU, komitmen, dan dukungan perguruan tinggi pada PAGC dapat segera direalisasikan dalam aksi nyata; kemudian para pimpinan perguruan tinggi dapat mendorong mahasiswanya untuk bergabung dengan Program PAGC dan mendapatkan manfaat langsung di lapangan. PAGC dapat diakses melalui Platform Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek yang sudah ada ataupun Platform Perguruan Tinggi yang di-launching hari ini.

BPOM perlu terus melakukan inovasi agar program ini berkelanjutan dan memiliki cakupan baik output dan dampak yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, Badan POM juga me-launching Program Pangan Aman Goes to Campus Platform Universitas dengan 3 (tiga) skema pembelajaran yaitu 20 SKS, 10 SKS, dan KKN Tematik 4 SKS yang bertujuan agar lulusan Perguruan Tinggi yang kompeten di bidang keamanan pangan meluas sehingga serapan tenaga kerja diharapkan meningkat. Selain itu, dengan program ini dapat terbentuk lapangan kerja baru dengan adanya entrepreneur muda di bidang pangan olahan.

BPOM melakukan penandatanganan dengan 17 Perguruan Tinggi di Indonesia (Gambar 17), yaitu: (1) Universitas Negeri Malang, (2) Universitas Negeri Gorontalo, (3) Universitas Negeri Jember, (4) Universitas Negeri Surabaya, (5) Universitas Negeri Padang, (6) Universitas Sebelas Maret, (7) Universitas Syah Kuala, (8) Universitas Lampung, (9) Universitas Pendidikan Indonesia, (10) Universitas Djuanda, (11) STIKES Papua, (12) Universitas Ahmad Dahlan, (13) Universitas Dharma Andalas, (14) Universitas Muhammadiyah Semarang, (15) Universitas Singaperbangsa Karawang, (16) Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, dan (17) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Gambar 16. Penandatanganan dengan 17 Perguruan Tinggi di Indonesia

6. Bimtek dan Kerja Lapang Mahasiswa terlatih sebagai Fasilitator UMKM

Program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC) selaras dengan salah satu bentuk pembelajaran pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu magang kerja. Terobosan baru dari program ini adalah mahasiswa yang akan magang kerja di UMK Pangan olahan terlebih dahulu dibekali kompetensi di bidang keamanan pangan sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan industri/UMK Pangan Olahan. Selanjutnya mahasiswa memiliki kesempatan luas untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata dengan memberikan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan dalam implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)/Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT). Pengalaman ini memberikan mahasiswa skill/keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi UMK Pangan Olahan dalam memproduksi pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Program ini di desain dengan kurikulum kegiatan yang berisi aktivitas pembelajaran yang disinkronkan dengan capaian pembelajaran di kampus dalam bentuk SKS; materi pembelajaran yang selaras dengan SKKNI Bidang Keamanan Pangan No. 618 Tahun 2016 dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan; adanya mentor kegiatan yang berasal dari Badan POM, UPT Badan POM (Balai Besar/Balai POM dan Loka POM) serta Perguruan Tinggi. Program PAGC membekali mahasiswa dengan kompetensi yang memiliki *hard skill* dan *soft skill* sebagai Fasilitator Keamanan Pangan,

sehingga akan menjadikan mahasiswa sebagai lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

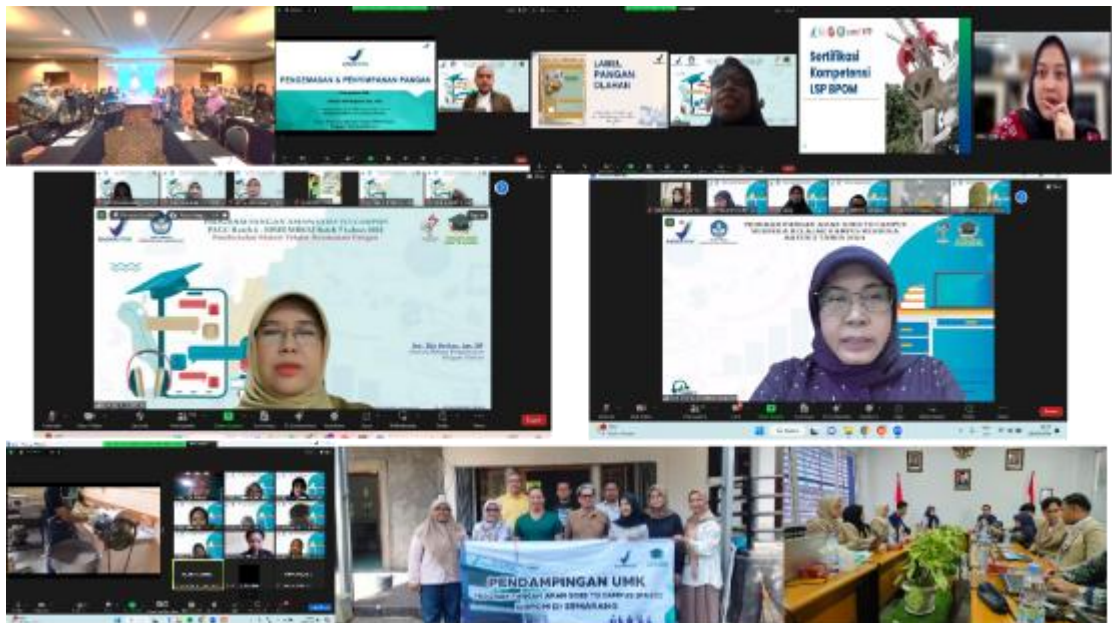
Pada tahun 2024, Program PAGC diselenggarakan dalam 2 Semester (Batch 5 dan Batch 6). Batch 5 berlangsung pada Februari - Juni 2024 (5 bulan), sedangkan Batch 6 berlangsung pada September - Desember 2024 (4 bulan). Tahap pertama yaitu pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan melalui Pembekalan Materi Teknis Keamanan Pangan dan Pelatihan PKP Pertama. Pelaksanaan Batch 5 yaitu Pembekalan Materi Teknis Keamanan Pangan pada 19 Februari – 15 Maret 2024 dan Pelatihan PKP Tingkat Pertama pada 18 – 28 Maret 2024. Sedangkan pelaksanaan Batch 6 yaitu Pembekalan Materi Teknis Keamanan Pangan pada 10 - 27 September 2024 dan Pelatihan PKP Tingkat Pertama pada 30 September - 4 Oktober 2024. Aktivitas pada Pembekalan dan Pelatihan dilakukan secara online melalui Platform Zoom Meeting dengan Narasumber berasal dari Badan POM (5 Direktorat di Kedeputan 3), Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Perguruan Tinggi Mitra (Institut Pertanian Bogor; Universitas Padjadjaran; Universitas Pasundan, Universitas Gajah Mada), dan Catalyst Consulting. Durasi Pembekalan dan Pelatihan pada Batch 5 lebih lama dibandingkan Batch 6, hal ini terjadi karena adanya penyesuaian timeline yang diberikan oleh Kemendikbud Ristek pada Batch 5 selama 5 (lima) bulan sedangkan pada Batch 6 selama 4 (empat) bulan setelah adanya perubahan Struktur Organisasi di Kemendikbud Ristek. Hal ini menyebabkan mahasiswa tidak memiliki kesempatan untuk belajar mandiri pada Batch 6 selama Pembekalan dan Pelatihan.

Setelah mahasiswa mengikuti Pembekalan dan Pelatihan, selanjutnya mahasiswa mengikuti magang/praktek kerja di UMK Pangan Olahan. Pada Batch 5 magang tersebar di 20 (dua puluh) wilayah kerja UPT BPOM (BBPOM di Medan, Padang, Palembang, Lampung, Serang, Bogor, Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, Mataram, Makassar, Ambon, Jayapura, dan Manokwari; serta Loka POM di Kab Banyumas dan Sorong), sedangkan pada Batch 6 magang tersebar di 24 (dua puluh empat) wilayah kerja UPT BPOM (BBPOM di Medan, Padang, Payakumbuh, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Serang, Bogor, Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, Mataram, Pontianak, Makassar, Ambon, Jayapura, dan Manokwari; serta Loka POM di Kab Tasikmalaya, Banyumas dan Sorong). Pada Batch 5 total UMK yang difasilitasi sebanyak 120 UMK Pangan Olahan, sedangkan pada Batch 6 total UMK yang difasilitasi sebanyak 122 UMK Pangan Olahan.

Pada tahapan program ini juga dilakukan supervisi untuk memastikan mahasiswa melakukan pendampingan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Supervisi dilakukan di seluruh wilayah secara daring dan luring. Selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas mentor, dilakukan

Pertemuan Peningkatkan Kapasitas Mentor. Pada pertemuan ini mentor dibekali pengetahuan dan skill melakukan coaching, mentoring, dan counselling. Mentor juga dibekali pengetahuan teknis terkait evaluasi mahasiswa di akun MSIB dan BPOM.

Penilaian mahasiswa pada akhir program merupakan akumulasi dari penilaian di setiap tahapan kegiatan dan penilaian setiap tahapan kegiatan merupakan akumulasi dari penilaian selama proses pembelajaran/aktivitas magang baik praktik maupun laporan. Nilai akhir diberikan dalam bentuk huruf mutu A = > 85; A- = 80-85; B+ = 75 – 79; B = 70-74; C = 65-69; dan D = <64. Hasil evaluasi Batch 5 menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa dinyatakan lulus program dengan nilai akhir sebagai berikut: A (118 orang) dan A- (4 orang), sedangkan hasil evaluasi Batch 6 menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa dinyatakan lulus program dengan nilai akhir sebagai berikut: A (123 orang) dan B+ (4 orang). Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Bimtek dan Kerja Lapang Mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Bimtek dan Kerja Lapang Mahasiswa terlatih sebagai

SASARAN KEGIATAN 1	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan
Indikator Kinerja Utama 2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

1. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan

Berdasarkan Laporan Tahunan BPOM 2023, KLB Keracunan Pangan tahun 2023 disebabkan oleh masakan rumah tangga, jajanan, pangan MD, ML, pangan industri rumah tangga, pangan industri rumah tangga tidak terdaftar serta pangan yang diproduksi di restoran. Masakan rumah tangga selama periode tahun 2019-2023 selalu menjadi sumber pangan tertinggi penyebab KLB Keracunan Pangan, dan tahun 2023 meningkat secara signifikan dari tahun 2022. Trend 5 tahun terakhir masakan rumah tangga sebagai penyebab KLB sebesar 49,30% (2019), 49% (2020), 52% (2021), 34,72% (2022) dan 53,28% (2023).

Tingginya KLB Keracunan Pangan pada pangan hasil masakan rumah tangga mengindikasikan masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat umum mengenai penerapan prinsip higiene sanitasi pangan mulai dari pemilihan bahan pangan sampai penyajian pangan. Khususnya mengenai cara pengolahan dan penyimpanan pangan yang baik, sehingga pangan aman saat dikonsumsi.

Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus keracunan pangan perlu terus ditingkatkan terutama di tingkat perorangan melalui sosialisasi keamanan pangan bagi masing – masing individu sehingga mereka dapat selektif dalam memilih pangan aman untuk dikonsumsi. Untuk dapat meningkatkan pemahaman individu terhadap konsep keamanan pangan perlu dilakukan sosialisasi keamanan pangan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu aktivitas refleksi, proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (Simon, 1993). Sosialisasi keamanan pangan kepada masing-masing individu merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis *community knowledge*. Agar sosialisasi keamanan pangan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan komunitas sosial dan kemasyarakatan seperti Salimah, Aisyiyah, BKOW, PKK,

Wirawati Catur Panca, Dharma Wanita Persatuan, Muslimat NU, PP Fatayat NU, PP Nasyiatul Aisyiyah dan Gerakan Kwartir Nasional Pramuka serta organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Yogyakarta dan juga untuk prinsip keadilan, bekerja sama dengan komunitas sosial dan kemasyarakatan lainnya meskipun tanpa adanya MoU, maka akan dicetak Kader Keamanan Pangan Nasional. Kader Keamanan Pangan yang akan dibentuk ini juga melibatkan organisasi kepemudaan Karang Taruna dan organisasi lintas agama seperti Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Wanita Katolik Republik Indonesia, Wanita Buddhis Indonesia, Gereja Protestan Maluku dan Perempuan Indonesia Maju.

Pembentukan kader keamanan pangan dari anggota komunitas sosial dan kemasyarakatan tersebut melalui tahapan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan.

Tujuan pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan kader keamanan pangan terhadap prinsip keamanan pangan;
2. Meningkatkan keterampilan kader keamanan pangan terkait Teknik pembuatan konten dan memanfaatkan media sosial (pembuatan video, pembuatan infografis, manajemen media sosial);
3. Meningkatkan kemampuan kader keamanan pangan dalam melaksanakan dan melaporkan KIE keamanan pangan.

Pada tahun 2024, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan dilaksanakan secara swakelola di 4 Kota, yaitu mewakili Wilayah Indonesia Barat di Kota Palembang, Kota Tangerang, dan Kota Yogyakarta; mewakili Indonesia Timur di Kota Ambon. Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial untuk KIE Keamanan Pangan pada saat bimtek kader keamanan pangan di 4 wilayah yang semula menggunakan jasa pihak ketiga yang kompeten terhadap materi tersebut, tahun ini menggunakan Narasumber internal karena sudah tersedia SDM yang kompeten. Dan ditambahkan dengan materi *Facilitator Skill* dari Narasumber eksternal. Fasilitator untuk mendampingi setiap kelompok melaksanakan simulasi dan praktik.

Sebanyak 277 orang peserta lulus Bimtek Kader KP dengan memenuhi persyaratan nilai *post test* lebih dari 80.00. Pembahasan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan di hotel untuk membahas hasil kegiatan bimtek Kader Keamanan Pangan bersama ormas pada tanggal 4 Desember 2024. Hasil pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan sebagaimana pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Hasil Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan

No	Tempat	Tanggal	Jumlah	Rata-Rata Pre Tes	Rata-Rata Post Tes	Delta	Kepuasan Pelanggan
1	Hotel Sahid Yogyakarta	7-8 Maret 2024	70; 2 tidak lulus karena tidak pre test	86,81	91,37	4,56	93,00%
2	Hotel Santika, Ambon	2-3 Mei 2024	70, semua lulus	87,38	94,30	7,10	98,90%
3	Hotel Grand Zuri, BSD City, Tangerang	21-22 Mei 2024	60; 2 mengundurkan diri karena kecelakaan	86,22	89,67	3,44	98,18%
4	Hotel Salatin, Palembang	28-29 Mei 2024	82; 1 tidak lulus post test < 80.00	85,23	93,21	7,98	97,58
	Total		277				



Gambar 18. Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Tahun 2024

Bimtek ini diselenggarakan oleh Direktorat PMPUPO bekerja sama dengan BB/BPOM setempat. Semua peserta bimtek dibekali Kit Kader Keamanan Pangan sebagai alat peraga yang akan membantu dalam melakukan bimtek ke komunitasnya. Kit tersebut terdiri dari:

- a. *Flipchart* kecil untuk Kader Keamanan Pangan Nasional
- b. *Leaflet* BPOM Mobile dan 5 Kunci Keamanan Pangan
- c. *Notebook* dan pulpen
- d. *Flashdisk* yang berisi materi bimtek
- e. Tas jinjing BPOM

Materi yang disampaikan terkait SKKNI Keamanan Pangan, yaitu seperti tampak pada Tabel 13.

Tabel 13. Unit Kompetensi Bimtek Kader Keamanan Pangan

NO	UNIT KOMPETENSI	MATERI
1	Melakukan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan dan atau Sosialisasi Keamanan Pangan	Kebijakan Keamanan Pangan
		5 Kunci Keamanan Pangan Keluarga
		Juknis Bimtek Kader Keamanan Pangan
		<i>Micro teaching</i> dan praktek melakukan sosialisasi KP
2	Mengidentifikasi Penandaan/Label Pangan Olahan	Cek KLIK
3	Menggunakan Aplikasi Pelaporan Pangan Olahan	Aplikasi Keamanan Pangan (praktek)
4	Tambahan	Pengenalan BB/Balai POM
		Desain Konten Media Sosial (infografis) dengan menggunakan smartphone dan video (materi dan praktek)
		<i>Facilitation Skill</i>

Target persentase kader yang berpartisipasi tahun 2024 adalah 224 orang dan hasil capaiannya sebesar 99,58% dari target 95,5% yang artinya sudah melebihi target.

Bimtek Kader Keamanan Pangan dilaksanakan mendukung Pengarusutamaan Gender dengan evaluasi sebagai berikut:

1. Kader Keamanan Pangan yang dibentuk tahun 2024 terdiri dari 24,9% Laki-laki dan 75,1% Perempuan sehingga dapat disimpulkan sudah melebihi target (12% partisipasi peserta laki-laki).
2. Tahun 2024 juga sudah melibatkan Ormas Kepemudaan, Ormas Agama lain, Organisasi Olahraga, dan Organisasi Disabilitas dan Kelompok Rentan tetapi partisipasinya belum maksimal.
3. Penetapan lokus Indonesia Timur dapat dilakukan tetapi terbatas karena berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Metode Bimtek dan KIE Online belum dapat dipastikan efektifitasnya karena peserta dari wilayah tsb sering mengalami kendala akses internet
4. Kajian peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat berdasarkan lokus, jenis kelamin, kelompok umur, dan organisasi sedang dilakukan bersama dengan mahasiswa magang skripsi dari IPB University dan akan berlanjut di Tahun 2025.
5. Data terpilah kader dan sasaran sosialisasi keamanan pangan sudah dibuat Database manual dalam bentuk gdrive (Google sheet) dengan pengolahan

manual. Penyusunan sistem database Kader KP telah diusulkan tetapi alokasi anggaran dialihkan untuk kegiatan prioritas lainnya.

Rencana tindak lanjut untuk mengatasi kesenjangan tersebut diantaranya adalah

1. Penguatan partisipasi kelompok rentan/disabilitas, organisasi kepemudaan, dan Organisasi Lintas Agama khususnya untuk WHDI, Nisyiren Shoshu, dan PERKHIN melalui advokasi kepada narahubung Organisasi, serta penunjukkan narahubung khusus terkait kegiatan pemberdayaan di bidang keamanan pangan
2. Melanjutkan kajian efektivitas pembentukan kader keamanan pangan melibatkan mahasiswa magang, dan peserta Pelatihan KTI
3. Pengayaan metode Bimtek dan KIE secara hybrid: peserta luring di UPT, petugas pusat hadir serta melalui pengembangan e-learning Kader Keamanan Pangan.
4. Pengembangan sistem database dan pelaporan kader

2. Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya

Bimtek Fasilitator Keamanan Pangan ini diikuti oleh 50 peserta yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Fasilitator Nasional yang berasal dari 11 Ormas/Asosiasi/Lembaga lainnya sebagai Penyuluh Keamanan Pangan untuk dapat mendampingi dan mensosialisasikan tentang Keamanan pangan bagi UMK Pangan di wilayahnya masing-masing. Bimtek dilaksanakan secara daring selama 2 (dua) hari pada tanggal 24-25 April 2024, dengan narasumber berasal dari Dit. PMPUPO, Konsultan Cahyana Puthut Wijanarka, MM, MH, dan *Sharing Session* dengan Juara Fasilitator Nasional Tahun 2024.

Evaluasi kegiatan Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan dilakukan dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan menggunakan *Google Form* setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Hasil akhir dari survei menunjukkan nilai 91,34 dengan mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan bernilai A artinya kinerja unit pelayanan sangat baik.

Tabel 14. Nilai Interval Konversi (NIK) pada Survei Kepuasan Peserta Bimtek

Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik
25,00 - 64,99	D	Tidak baik
65,00 – 76,60	C	Kurang baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,32 – 100,00	A	Sangat baik

Pada evaluasi ini para peserta juga menyampaikan saran dan masukan, diantaranya adalah "agar materi yang disampaikan lebih ringan dan ringkas agar lebih mudah dimengerti", selain itu ada juga yang memberi saran "Jika dimungkinkan agar ada info Fasnas/Fasda yang aktif di BPOM bisa diakses barangkali bisa jadi referensi untuk saling berkolaborasi", "pertemuan secara berkala antar Fasnas dan menyelenggarakan evaluasi", dan masukan yang lain rata-rata mengapresiasi kegiatan ini karena sudah terselenggara dengan baik.

Tabel 15. Hasil Survei Kepuasan Peserta Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya

Unsur		Deskripsi	Hasil	
U1	1	Persyaratan Pelayanan		85,96
U2	2	Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan		89,47
U3	3	Waktu Pelayanan	87,72	88,74
	4	Waktu Penyelesaian	88,60	
	5	Respon/Kecepatan Petugas	89,91	
U4	6	Biaya/Tarif Pelayanan		95,18
U5	7	Kesesuaian Produk Pelayanan		93,86
U6	8	Kompetensi Petugas		92,11
U7	9	Perilaku Petugas		93,86
U8	10	Penanganan Pengaduan		91,23
U9	11	Sarana dan Prasarana		91,67
Total				
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan				A
Kinerja Unit Pelayanan SANGAT BAIK				

3. Pelatihan Berbasis Kompetensi SKKNI Penyuluh Keamanan Pangan Tk.I

Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan dengan peserta yaitu komunitas mahasiswa dari Perguruan Tinggi melalui Program Pangan Aman Goes to Campus telah dilaksanakan sebanyak 2 batch pada tahun 2024. Pelatihan ini dilaksanakan secara swakelola oleh Direktorat PMPUPO dengan Narasumber berasal dari Direktorat PMPUPO, Pusat

Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), dan Pihak ke-3 (Catalyst Consulting). Peserta pelatihan sebanyak 247 mahasiswa (Batch 1 = 122 mahasiswa dan Batch 2 = 125 mahasiswa).

Selanjutnya mahasiswa memberikan *evaluasi/feedback* terhadap penyelenggaraan pelatihan dan Mentor/Narasumber yang memberikan materi pelatihan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan sekaligus sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pelatihan di waktu mendatang.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Program PAGC-MBKM pada Tahun 2024, dengan responden mahasiswa aktif program PAGC-MBKM, menunjukkan bahwa lebih dari 80% responden menyatakan bahwa:

1. Produk/jasa layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan produk/jasa layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan sesuai hingga sangat sesuai.
2. Setuju-sangat setuju bahwa petugas sopan dan mampu berkomunikasi dengan baik (tulisan atau verbal).
3. Kompetensi petugas dalam pelayanan memadai-sangat memadai
4. Penanganan pengaduan pada unit layanan ini baik.
5. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai bahkan sangat sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini.

Adapun kendala yang dihadapi peserta selama mengikuti pelatihan secara daring yaitu kendala jaringan internet yang tidak stabil sehingga peserta keluar masuk zoom saat pelatihan berlangsung. Selanjutnya seluruh peserta telah memberikan tanggapan yang baik terhadap pelaksanaan pelatihan ini namun beberapa peserta mengusulkan agar pelatihan dilakukan secara *offline* dan waktu pelatihan terlalu padat sehingga terlalu lama melihat layar *device*.

4. Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka Pendampingan Penerapan CPPOB/HACCP di UMKM

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan PKP Muda dilakukan oleh lembaga penyelenggara pelatihan. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Pelatihan. Evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pelatihan secara keseluruhan sebagai bahan untuk perbaikan dan pengembangan pelatihan berikutnya.

Evaluasi dilakukan melalui kuisioner evaluasi pelatihan/bimtek yang diisi oleh peserta pelatihan/bimtek. Kuisioner evaluasi disusun dengan menggunakan 5 skala (1 s.d 5) dengan kategori skala :

<1,50 : Sangat kurang

1,50-2,49 : Kurang

2,50-3,49 : Netral

3,50-4,49 : Baik

4,50-5,00 : Sangat Baik.

Evaluasi pelatihan ini menggunakan Model Kirkpatrick yang dilakukan hingga evaluasi level 2, yaitu:

A. Evaluasi Level 1

Evaluasi Level 1 bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan. Kualitas proses atau pelaksanaan suatu pelatihan dapat diukur melalui tingkat kepuasan pesertanya. Kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan atau proses suatu pelatihan akan berimplikasi langsung terhadap motivasi dan semangat belajar peserta dalam pelaksanaan pelatihan. Evaluasi level 1 dilakukan terhadap pengajar/fasilitator dan penyelenggaraan.

1) Evaluasi Pengajar/Fasilitator

Evaluasi dilakukan terhadap kualitas pengajar/fasilitator dalam memberikan materi dan/atau memfasilitasi proses pembelajaran dalam pelaksanaan Pelatihan. Formulir evaluasi pengajar/fasilitator dibagikan kepada peserta pelatihan setiap akhir sesi materi oleh pengajar/fasilitator dengan menggunakan formulir Evaluasi Level 1: Evaluasi Pengajar/Fasilitator. Setiap peserta pelatihan wajib mengisi formulir evaluasi sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pelatihan untuk masa yang akan datang.

Evaluasi Kualitas Narasumber pada Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Muda dengan indeks 4.91 dengan rincian nilai indeks untuk narasumber Ratih Woro Anggraini sebesar 4.93 dan Muhammad Ruliawan Salim sebesar 4.89.

2) Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan

Evaluasi Penyelenggaraan dan Fasilitas Pelatihan Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Muda mendapatkan indeks sebesar 4.76 dengan rincian per parameter evaluasi seperti terlihat pada Tabel 15:

Tabel 15. Evaluasi Penyelenggaraan dan Fasilitas Pelatihan Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Muda

No	Parameter Evaluasi	Indeks Total
1	Kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelatihan	4.68
2	Lingkungan dan suasana lingkungan dalam mendukung proses pembelajaran dalam pelatihan	4.68
3	Ketepatan waktu pelaksanaan pelatihan	4.86
4	Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan pelatihan	4.89
5	Pelayanan yang diberikan panitia pelatihan terhadap peserta	4.75
6	Kualitas materi pelatihan/bimtek dari awal sampai dengan akhir	4.93
7	Konsumsi Peserta selama Pelaksanaan Pelatihan	4.54
Rata-Rata		4.76

Adapun masukan terhadap penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Muda Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) Badan POM, yaitu:

- a. Selain penjelasan, dilakukan pemberian contoh pengisian untuk setiap formulir, dan sebaiknya juga ada pendampingan
- b. Pada materi CPPOB durasi terlalu lama
- c. Waktu disesuaikan agar lebih panjang untuk membuat tugas
- d. Sebaiknya pelatihan acara tidak di bulan Ramadhan
- e. Adanya informasi terkait perlengkapan yang harus dibawa peserta untuk mempermudah pengerjaan tugas
- f. Adakan pelatihan di luar Ramadhan dan tambah kuota, dan tetap adakan pelatihan secara luring

B. Hasil Evaluasi Level 2

Evaluasi Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Muda Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) Badan POM dilakukan oleh peserta bersama dengan widyaiswara/narasumber/fasilitator pendidikan dan/atau pelatihan, dilakukan pada waktu pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan. Evaluasi dilaksanakan melalui metode pemberian tugas yang nantinya berkontribusi sejumlah 90% pada nilai akhir kelulusan dan 10% berasal dari penilaian sikap dan perilaku peserta selama pelatihan dengan indikator kedisiplinan dan integritas.

SASARAN KEGIATAN 2	Meningkatnya Peran Serta Pemerintah Daerah Terhadap Keamanan Mutu dan Gizi Makanan
Indikator Kinerja Utama 1	IKK.1 Persentase Kab/kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP

1. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Keamanan Pangan untuk IRTP

Dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan UMK, pemerintah telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan dan program untuk mendukung pertumbuhan serta pengembangan UMK di seluruh Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengamanahkan adanya kemudahan, dan pemberdayaan UMK juga penetapan kerangka penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang juga berlaku dalam sektor Obat dan Makanan. BPOM mendukung kemudahan perizinan berusaha antara lain dengan menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor obat dan makanan.

BPOM telah mengembangkan aplikasi SPP-IRT (sppirt.pom.go.id) yang telah terintegrasi dengan OSS RBA sebagai kanal penerbitan SPP-IRT sekaligus sebagai database serta *tool* pengawasan pre-market IRTP yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Namun dalam implementasi penerbitan SPP-IRT yang dilakukan Pemerintah Daerah serta dalam proses integrasi dengan sistem OSS, terdapat hal-hal yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan lintas sektor terkait, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerbitan SPP-IRT termasuk pemenuhan komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kepatuhan implementasi penerbitan SPP-IRT oleh Pemerintah Daerah, kendala serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengawasan pre-market sesuai ketentuan.

Untuk mengetahui level pemenuhan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal pengawasan pre market IRTP, perlu dilakukan kajian dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi level kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penerbitan SPP-IRT sebagai bentuk pengawasan pre market IRTP.

Berdasarkan data penerbitan SPP-IRT, jumlah SPP-IRT terbit untuk Tahun 2021 sebanyak 8.416, Tahun 2022 sebanyak 125.045, dan Tahun 2023 sebanyak 174.527, Tahun 2024 sebanyak 154.276 sehingga total SPP-IRT terbit pada tahun 2024 sebanyak 462.264. Dengan rincian SPP-IRT yang telah dilakukan verifikasi label berjumlah 119.555 (125,89%) verifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan 39.933 (21,74%), dan verifikasi sarana 18.280 (3,96%). Kajian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari 90 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, melalui survei dan

wawancara dengan petugas di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada kriteria kesesuaian yang ditetapkan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hal penerbitan SPP-IRT, sebanyak 40 Kabupaten/Kota memenuhi ketentuan. Meskipun sebagian besar Kabupaten/Kota telah memenuhi kriteria kesesuaian dalam penerbitan SPP-IRT, masih diperlukan peningkatan dalam pengawalan pemenuhan komitmen IRTP. Diperlukan upaya untuk memperluas cakupan penyuluhan, pelaksanaan pemeriksaan sarana dan peningkatan verifikasi pemenuhan komitmen melalui aplikasi sppirt.pom.go.id. Data Kabupaten/Kota yang menerbitkan SPP-IRT sesuai standar 2023 dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Data Kabupaten/Kota yang Menerbitkan SPP-IRT sesuai Standar 2023

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kriteria Penerbitan SPP-IRT	No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kriteria Penerbitan SPP-IRT
1	Bali	Kabupaten Badung	Sesuai	21	Riau	Kota Pekanbaru	Sesuai
2	Bali	Kabupaten Karangasem	Sesuai	22	Bengkulu	Kabupaten Kaur	Sesuai
3	Jawa Timur	Kabupaten pasuruan	Sesuai	23	Bengkulu	Kabupaten Rejang Lebong	Sesuai
4	Jawa Timur	Kota Pasuruan	Sesuai	24	Aceh	Kabupaten Pidie Jaya	Sesuai
5	Jawa Timur	Kabupaten Tuban	Sesuai	25	Kalimantan Barat	Kabupaten Mempawah	Sesuai
6	Jawa Timur	kabupaten Blitar	Sesuai	26	Kalimantan Barat	Kabupaten Kayong Utara	Sesuai
7	Jawa Timur	Kabupaten Bojonegoro	Sesuai	27	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Sesuai
8	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	Sesuai	28	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	Sesuai
9	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	Sesuai	29	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Timur	Sesuai
10	Jawa Tengah	Kabupaten Pati	Sesuai	30	Kalimantan Timur	kabupaten Penajam Paser Utara	Sesuai
11	Jawa Tengah	Kota Semarang	Sesuai	31	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	Sesuai
12	Jawa Timur	Kota Blitar	Sesuai	32	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Sesuai
13	Jawa Timur	Kabupaten Jember	Sesuai	33	Sulawesi Tengah	Kota Palu	Sesuai
14	DI Yogyakarta	Kabupaten Kulonprogo	Sesuai	34	Sulawesi Tenggara	kabupaten Buton Selatan	Sesuai
15	Aceh	Kabupaten Aceh Tamiang	Sesuai	35	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Selatan	Sesuai
16	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Ilir	Sesuai	36	Sulawesi Tenggra	Kabupaten Kolaka	Sesuai

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kriteria Penerbitan SPP-IRT	No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kriteria Penerbitan SPP-IRT
17	Aceh	Kabupaten Aceh Utara	Sesuai	37	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Sesuai
18	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Utara	Sesuai	38	Jawa Tengah	Kota tegal	Sesuai
19	Jawa Tengah	Kota salatiga	Sesuai	39	Jawa Tengah	Kabupaten Purbalingga	Sesuai
20	Jawa Tengah	kabupaten Magelang	Sesua	40	Kalimantan Utara	Kabupaten Nunukan	Sesuai

2. Pengembangan Materi Keamanan Pangan untuk IRTP

Pada tahun 2024 telah disusun Modul Keamanan Pangan untuk pelaku usaha IRTP. Modul tersebut digunakan untuk bimtek Penyuluhan keamanan Pangan untuk IRTP. Modul tersebut dapat digunakan oleh Petugas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan maupun petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ketika menjadi narasumber pada kegiatan Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan tersebut. Judul-judul modul antara lain:

1. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Cemaran Pangan untuk IRTP
2. Pedoman Penggunaan BTP untuk IRTP

Modul ini disusun bersama dengan Bapak Jamal Zamrudi yang merupakan pendiri sebuah lembaga pelatihan di bidang keamanan pangan dan memiliki latar belakang yang kuat sebagai auditor dalam bidang keamanan pangan. Penyusunan modul ini terdiri dalam beberapa tahapan di antaranya :

1. *Brainstorming* informasi yang perlu di cantumkan dan *layout* modul
2. Penyusunan Modul
3. *Review* Modul

Dengan disusunnya modul ini diharapkan Pelaku Usaha, Petugas Dinas Kesehatan, dan Petugas Pengawasan di BPOM bisa mendapatkan panduan yang lebih mudah digunakan.

SASARAN KEGIATAN 2	Meningkatnya Peran Serta Pemerintah Daerah Terhadap Keamanan Mutu dan Gizi Makanan
Indikator Kinerja Utama 2	Jumlah kab/kota yang menerapkan program keamanan pangan (Desa Pasar Sekolah)

1. Gebyar Keamanan Pangan Sekolah

BPOM senantiasa melaksanakan program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), membudayakan praktek keamanan pangan serta melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai konsumen cerdas menuju masyarakat Indonesia yang meningkat derajat kesehatannya.

Hari Keamanan Pangan Dunia – *World Food Safety Day* (WFSD) diperingati setiap tanggal 7 Juni adalah momentum global yang diinisiasi oleh WHO dan FAO untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan pangan. Tahun 2024 merupakan tahun ke-6 perayaan WFSD dengan tema **Food Safety: “Prepared for the unexpected”** (Keamanan pangan: Kesiapsiagaan untuk kondisi yang tidak terduga). Tema ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi insiden keamanan pangan melalui kolaborasi dan partisipasi dari pemerintah, pelaku usaha pangan dan juga konsumen.

Dalam rangka memperingati WFSD Tahun 2024, BPOM melaksanakan serangkaian kegiatan diantaranya adalah pameran keamanan pangan dan Gebyar Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan untuk meningkatkan kreativitas, adaptabilitas, dan semangat inovatif generasi Z sebagai solusi untuk selalu siap siaga menghadapi tantangan dan situasi yang tak terduga dalam dunia saat ini dengan tajuk **“WFSD 2024 Expo x Zestival”** yang diselenggarakan pada tanggal 4 - 5 Juni 2024 di One Satrio, CBD Mega Kuningan, Jakarta. Dokumentasi penyelenggaraan **“WFSD 2024 Expo x Zestival”** dapat dilihat pada Gambar 19.



Gambar 19. Dokumentasi Penyelenggaraan WFSD 2024 x Zestival

2. Koordinasi Lintas Sektor Keamanan PJAS

Program Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) merupakan Proyek Prioritas Nasional Kab/ Kota yang diintervensi Keamanan Pangan PJAS tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan RPJMN 2020-2024. Program ini bertujuan untuk 1) Mengawal PJAS aman, bermutu, dan bernutrisi; dan 2) Memberdayakan Komunitas Sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Orang Tua, dan Pedagang) agar mampu dan mandiri melindungi diri dan keluarganya dari produk pangan yang berisiko terhadap kesehatan.

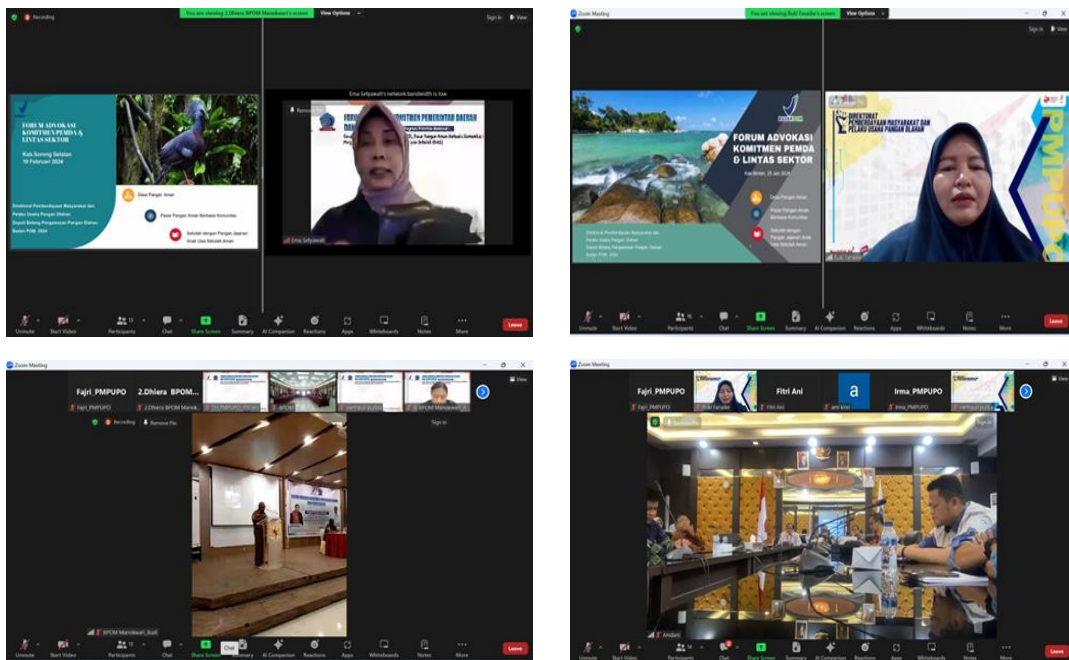
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BPOM melalui Dit. PMPUPO terus melakukan Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait keamanan PJAS di Tingkat Pusat dan Daerah (UPT BPOM serta Pemerintah Daerah). Di Tingkat Pusat, Badan POM setiap tahun selalu berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait Kolaborasi Program PJAS dengan RAN PIJAR (Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja). BPOM berpartisipasi sebagai Tim RAN PIJAR (BPOM sudah masuk ke dalam SK yang ditetapkan) dan BPOM mendukung lima strategi RAN PIJAR dengan pro aktif mengupdate data capaian aksi nyata PJAS pada matriks RAN PIJAR

serta berupaya hadir dalam pertemuan sebagai bentuk sosialisasi program PJAS ke lintas sektor terkait.

Selain itu, berikut beberapa pertemuan yang dihadiri dalam rangka koordinasi terkait PJAS dengan Kementerian/Lembaga pada tahun 2024, antara lain:

1. Workshop Pemangku Kepentingan Multisektoral tentang Kantin Sekolah Sehat di Indonesia yang diadakan Kemendikbud Ristek pada tanggal 28 Februari 2024
2. Pembahasan Pedoman Nasional Kantin Sekolah Sehat yang diadakan Kemendikbud Ristek, UNICEF, dan Kemenkes pada tanggal 22 Mei, 8 Juli, 29 Agustus 2024
3. Pertemuan tim penyusun Panduan Literasi Finansial dan Pendidikan Kesehatan yang diadakan Kemendikbud Ristek pada tanggal 31 Mei, 27 Juni, 15-17 Juli 2024
4. Analisis Hasil Uji Keterbacaan dan Perbaikan Panduan Pendidikan Kesehatan, serta Penyempurnaan Panduan Mata Pelajaran SMK Gelombang II yang diadakan Kemendikbud Ristek pada tanggal 22-23 Agustus 2024

Pada tahun 2024, Dit. PMPUPO telah melaksanakan koordinasi di tingkat daerah dalam rangka kegiatan Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS dengan 42 BB/BPOM beserta Pemerintah Daerah (87 Kabupaten/Kota) yang dilaksanakan secara daring. Koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen lintas sektor di daerah dalam melaksanakan pemberdayaan komunitas sekolah serta mereplikasi program keamanan PJAS. Dokumentasi pelaksanaan koordinasi terlihat pada Gambar 20 berikut.



Gambar 20. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Keamanan Pangan PJAS

Pada kegiatan advokasi lintas sektor Koordinasi Lintas Sektor PJAS di tingkat daerah dihadiri oleh Gubernur/Bupati/Walikota/Sekretaris Daerah serta OPD terkait seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup. Hasil dari koordinasi ini dilakukan penandatanganan komitmen program intervensi keamanan PJAS dan rekomendasi program intervensi keamanan PJAS yang akan dilakukan bersama selama 1 (satu) tahun ke depan.

3. Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Desa Pangan Aman

Untuk mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah, Badan POM telah menginisiasi program dan kegiatan di bidang keamanan pangan yang berbasis masyarakat yaitu Program Desa Pangan Aman sejak tahun 2014. Program ini diintegrasikan bersama program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman menjadi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman yang *dilaunching* pada tahun 2017. Program Desa Pangan Aman adalah bentuk intervensi keamanan pangan kepada komunitas masyarakat agar menjadi mandiri dalam hal keamanan pangan. Intervensi dilakukan melalui sisi *supply* yaitu melalui kegiatan pembinaan pelaku usaha pangan baik produsen maupun ritel yang ada di desa dan sisi *demand* yaitu melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat yang paham dan cerdas dalam melakukan edukasi keamanan pangan. Untuk keterpaduan pelaksanaan intervensi keamanan pangan tersebut, pada tahun ini BPOM melakukan koordinasi terkait keamanan pangan kepada pemangku kebijakan yang ada di Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota di seluruh Indonesia.

Advokasi Keamanan Pangan

Pertemuan Advokasi kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk melakukan sosialisasi program Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif melalui pemberdayaan masyarakat dan pendampingan kepada pelaku usaha termasuk upaya mendorong Pemerintah Daerah untuk mereplikasi program pemberdayaan keamanan pangan di daerah, salah satunya Desa Pangan Aman. Advokasi dilaksanakan dalam 2 batch untuk regional barat serta regional tengah dan timur. Advokasi regional barat dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 secara *hybrid* yaitu luring di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat dan daring menggunakan webinar *zoom meeting* dan ditayangkan secara live di akun *YouTube* klubpompri Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM. Sedangkan advokasi regional tengah dan timur dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024. *Flyer* kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Regional Barat seperti pada Gambar 21.



Gambar 21. Flyer Advokasi Keamanan Pangan Regional Barat

Peserta advokasi keamanan pangan berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Adapun narasumber advokasi keamanan regional barat sebagai berikut:

- Deputi Pengawasan Pangan Olahan, BPOM dengan materi “Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemberdayaan Keamanan Pangan Secara Aktif melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan kepada Pelaku Usaha”
- Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dengan materi “Dukungan Kementerian Dalam Negeri terhadap Pengawasan Pre dan Post Market IRTP yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota”
- Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/ Bappenas dengan materi “Keamanan Pangan dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat – Daerah”

Hasil dari advokasi keamanan pangan ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengimplementasikan intervensi keamanan pangan di sepanjang rantai pangan melalui penguatan kolaborasi dan sinergisme program di masing-masing daerah. Pemerintah Daerah juga perlu melakukan perencanaan program keamanan pangan yang dapat disinergikan dengan program yang sudah ada di daerah melalui penganggaran secara mandiri menggunakan APBD untuk memastikan keberlanjutan program keamanan pangan. Dalam pelaksanaan program keamanan pangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan replikasi program pemberdayaan masyarakat yang telah diinisiasi oleh Badan POM seperti Desa Pangan Aman, Pasar Aman Berbasis Komunitas, Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman yang dapat

dikembangkan dengan melakukan inovasi program berbasis masyarakat sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.



Gambar 22. Dokumentasi Kegiatan Advokasi Keamanan Pangan

Pertemuan Teknis Germas Sapa

Badan POM telah menginisiasi program dan kegiatan di bidang keamanan pangan yang berbasis masyarakat yaitu Program Desa Pangan Aman, Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman. **Program ini diintegrasikan melalui kegiatan Germas Sapa, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman yang diluncurkan pada tahun 2017 oleh Menko PMK.** Germas Sapa merupakan program berbasis komunitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keamanan pangan di sepanjang rantai pangan dengan memberikan intervensi di sisi *supply* yaitu melalui kegiatan pendampingan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan baik produsen maupun ritel dan sisi *demand* yaitu melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat agar menjadi mandiri dan memiliki pemahaman yang baik terkait keamanan pangan.

Pada 21 Juni 2024 telah dilaksanakan pertemuan teknis Germas Sapa di auditorium Gedung Merah Putih Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pertemuan ini mengusung tema Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman untuk membentuk SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.



Gambar 23. Kegiatan Pertemuan Teknis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman 2024

Pertemuan Teknis Gernas Sapa bertujuan untuk :

- 1) Melakukan sosialisasi mengenai teknis pelaksanaan Gernas Sapa kepada pelaksana teknis di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan desa/kelurahan.
- 2) Memberikan informasi kepada daerah terkait contoh pelaksanaan Gernas Sapa yang sudah berhasil dilakukan oleh beberapa daerah.
- 3) Memberikan apresiasi kepada stakeholder (Desa/Kelurahan, Sekolah, Pasar) yang telah mengimplementasikan program keamanan pangan dengan baik.
- 4) Memberikan apresiasi kepada UPT BPOM yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan terbaik.

Pertemuan Teknis Gernas Sapa dihadiri oleh 674 peserta secara daring dan 230 peserta secara luring. Peserta berasal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pemerintah Desa, Sekolah, Pengelola Pasar, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan PJAS Aman, serta UPT BPOM di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga turut dihadiri secara luring oleh PJ Bupati Kab. Boalemo, Gorontalo, PJ Bupati Klungkung, Bali, dan PJ Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.



Gambar 24. Dokumentasi Kegiatan Germas Sapa

Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS. Adapun rincian pelaksanaan Pertemuan Teknis Germas Sapa adalah:

- Penyerahan apresiasi kepada pemenang lomba Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan PJAS Aman
- Penyerahan apresiasi kepada UPT BPOM yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan terbaik
- Forum Dialog “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman untuk membentuk SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045” dengan materi Sinergi program pemberdayaan masyarakat dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan serta *sharing experience* terkait *success story* di daerah pada pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman.
- Narasumber *Success Story* pada pertemuan tersebut adalah:
- Sekretaris Desa Karang Bunga, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan : Agus Supriadi, S.Pd. yang menjadi Juara 1 Lomba Desa Pangan Aman regional barat tahun 2023.
- Kepala Pasar Sudha Merta, Kota Denpasar, Bali : I Made Sarja, SH.

→ Kepala SMPN 1 Lamongan, Jawa Timur : Yayuk Setia Rahayu, S.Pd., S.Sn., M.Pd.

Sinergi Program Desa Pangan Aman dengan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal

Badan POM dan Kementerian Kesehatan bersinergi untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia khususnya untuk pencegahan stunting yaitu sinergi antara Program Desa Pangan Aman dan Program PMT Berbahan Pangan Lokal. Sinergi ini dilakukan dalam rangka mengolaborasikan intervensi sensitif dan intervensi spesifik agar masyarakat menerima manfaat yang lebih besar.

Sinergi Program Desa Pangan Aman dengan PMT Berbahan Pangan Lokal bertujuan untuk :

1. Memberikan makanan tambahan berbahan pangan lokal dapat memenuhi aspek keamanan, mutu dan gizi pangan dan;
2. Memberdayakan usaha pangan di desa agar memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyiapan PMT serta dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi untuk masyarakat desa

Mekanisme pelaksanaan sinergi adalah intervensi pada sisi *demand* yaitu sosialisasi dan edukasi berupa bimbingan teknis dan praktek keamanan pangan dan penyiapan pangan bergizi kepada kelompok Ibu Hamil dan Ibu Memiliki Balita yang menjadi target diberikan PMT, serta intervensi pada sisi *supply* yaitu pendampingan terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) kepada pelaku usaha pangan siap saji/dapur rumah tangga yang menyiapkan makanan tambahan dan/atau Rumah produksi komunitas yang menjadi tempat penyiapan makanan tambahan. Sinergi program ini telah dilaunching oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Menteri Kesehatan pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kampoeng Mataraman, Kalurahan Panggungharjo, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dan ditayangkan secara langsung melalui zoom dan YouTube @bpom.official.



Gambar 25. Sinergi Program Desa Pangan Aman dengan PMT Berbahan Pangan Lokal

Pada kegiatan ini dilaksanakan kunjungan ke Rumah Produksi Komunitas (RPK) Kelurahan Panggungharjo yang difungsikan sebagai tempat penyiapan PMT dan melihat kegiatan di RPK saat memproduksi PMT dilanjutkan dialog dengan pelaksana sinergi program Desa Pangan Aman

dengan PMT Berbahan Pangan Lokal di Bali, Bengkulu, dan Maluku. Selain itu, dilaksanakan edukasi keamanan pangan dan pemberian PMT Berbahan Pangan Lokal secara langsung ke penerima PMT.

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring yang dihadiri oleh 150 orang yang terdiri dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kab. Bantul, Pemerintah Kab. Kulon Progo, Pemerintah Kab. Gunung Kidul, Pemerintah Kab. Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, Puskesmas Sewon, Pemerintah Kelurahan Panggungharjo, perwakilan dari Perguruan Tinggi, dan CSR dari Pegadaian.

Adapun Peserta daring yang hadir berasal dari perwakilan Kementerian/Lembaga, UPT BPOM, Pemerintah Kab/Kota (Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Koperasi dan UKM, seluruh Puskesmas penerima DAK PMT Berbahan Pangan Lokal, Pemerintah Desa/Kelurahan, perwakilan Perguruan Tinggi, dan Orang Tua Angkat. Kapasitas *zoom* terpenuhi sebanyak 1.000 akun. UPT BPOM bersama lintas sektor menyimak di *zoom* bersama-sama di Kabupaten/Kota yang diintervensi Desa Pangan Aman. Kegiatan yang dilakukan oleh UPT BPOM sekaligus untuk mengadvokasi pemerintah daerah agar melakukan replikasi Program Desa Pangan Aman dan disinergikan dengan PMT berbahan pangan lokal. Selain itu, Peserta yang menyimak *live* melalui *YouTube* sebanyak 575 orang dan kegiatan ini sudah ditonton sebanyak 3.300 kali di *YouTube* @bpom.official per tanggal 15 Oktober 2024.

2. Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, Badan POM menyelenggarakan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), yang merupakan revitalisasi program Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya. Untuk memperkuat sistem program PPABK diperlukan upaya-upaya sistematis dan berkesinambungan, diantaranya adalah *exit strategi* berupa pelaksanaan replikasi PPABK oleh Pemerintah Daerah secara mandiri serta upaya penguatan komunitas–komunitas di pasar.

Oleh karena itu, perlu dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang bertujuan dari *Focus Group Discussion* ini adalah (a) melakukan advokasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada pemangku kepentingan di daerah dan komunitas; (b) menumbuhkan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program bersama Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas; dan (c) meningkatkan koordinasi secara sinergis dan kontinu antar instansi dalam pelaksanaan aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di daerah.

Pada tahun 2024 ini, telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tanggal 28 Mei 2024 di Hotel Royal Tarakan, Kalimantan Utara. Kegiatan diawali dengan sambutan Ibu Ema Setyawati, SSi., Apt., ME (Plt. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan) serta sambutan dan pembukaan dari Dr. Bustan, S.E., M.Si (Pj. Walikota Tarakan).

Narasumber pada kegiatan FGD ini berasal dari perwakilan dari BPOM dan Kementerian terkait sebagai berikut:

- Ruki Fanaike, STP, MSi (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan), menyampaikan materi terkait Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
- Herianto Baan, Ssi., Apt. (Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan), menyampaikan materi Hasil Intervensi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Provinsi Kalimantan Utara.
- Ibnu Adam, STP (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) menyampaikan materi Dukungan Pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
- Hj. Hasmirah., SH (Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara) menyampaikan materi menyampaikan materi Paparan terkait Pengelolaan Pasar di Kalimantan Utara.
- Elisa Maulidya Saputri, S.TP., M.Sc (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara) menyampaikan materi menyampaikan materi Paparan terkait Sistem Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar.

Kemudian peserta yang hadir pada FGD sebanyak 33 orang yang berasal dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/ Kota di seluruh Kalimantan Utara, Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Bappeda Kota Tarakan, Dinas Perikanan Kota Tarakan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tarakan, dan Pengelola Pasar yang diintervensi tahun 2020 – 2024, dan Balai POM di Tarakan

Rencana tindak lanjut yang tertuang dalam komitmen bersama dari FGD ini sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah berkomitmen mewujudkan pasar yang sehat, aman dari bahan berbahaya berbasis komunitas.
- b) Perlunya kolaborasi pentahelix yaitu pemerintah (Pemerintah Pusat, Balai Besar POM dan OPD terkait), akademisi, media, produsen pangan dan masyarakat tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dan lintas provinsi untuk memperluas jangkauan pasar yang diintervensi dan meningkatkan keamanan pangan.

- c) Perlunya penguatan serta aktivasi komunitas–komunitas yang ada di pasar (pengelola pasar, pedagang, pembeli, pemasok, paguyuban pedagang dan lainnya) untuk turut berperan aktif dalam peningkatan literasi pasar, memastikan pangan yang dijual aman dari bahan berbahaya serta sesuai dengan cara peredaran pangan olahan dan pangan segar yang baik.
- d) Perlunya pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 700/6206/sj tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat Dan Makanan di Daerah.
- e) Perlunya pengawasan bersama di sepanjang rantai pangan oleh TKPPOM sehingga temuan bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan baik di tingkat produsen/ UMKM/ IRTP maupun di pasar dapat ditelusuri sumber / pemasoknya serta ditindaklanjuti dengan pembinaan dan/ atau memberikan sanksi sampai menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- f) Perlu adanya pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang kuat terkait penyalahgunaan bahan berbahaya di pasar baik pasar swalayan, pasar rakyat (pasar daerah dan pasar desa) maupun online termasuk didalamnya pengawasan terhadap penjual bahan kimia berbahaya.
- g) Perlunya penguatan kelembagaan pasar dilakukan melalui :
- Pembinaan SDM: pembentukan kader keamanan pangan, pemberdayaan komunitas pasar (pengelola pasar, pedagang dan konsumen)
 - Manajemen pasar, peningkatan sarana dan prasarana pasar yang memenuhi standar pasar sehat, pasar SNI, dan pasar pangan aman berbasis komunitas.
- h) Penguatan regulasi tentang keamanan pangan di daerah dapat melalui peraturan daerah atau peraturan Gubernur/ Walikota/ Bupati.
- i) Pemerintah Kabupaten/Kota perlu melakukan replikasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, bimtek kader/ fasilitator pasar, sampling dan atau pengujian pangan yang beredar di pasar.
- j) Perlu dukungan dari BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Kabupaten/Kota, atau SKPD yang membidangi perencanaan terhadap program keamanan pangan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dalam hal pengawasan bahan berbahaya melalui rancangan RPJMD.
- k) Pemberian *reward* dari pemerintah daerah untuk pasar yang menerapkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas berupa sertifikat dan papan nama pasar pangan aman berbasis komunitas.
- l) Perlu pembagian wewenang yang jelas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pengawasan peredaran bahan berbahaya.
- m) Perlunya gerakan masyarakat secara bersama-sama, *massive*, sistematis, dan berkelanjutan untuk menciptakan kondisi pangan aman di pasar termasuk jalur distribusinya.



Gambar 26. Pelaksanaan FGD dalam rangka Koordinasi Lintas Sektor Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

3. Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan Program PJAS

Keamanan pangan adalah aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Pangan yang aman dan berkualitas tidak hanya mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat, tetapi juga mencegah penyakit yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi pangan, pemahaman tentang keamanan pangan menjadi sangat krusial. Pemberian informasi yang memadai melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Peredaran PJAS dapat diakses dengan mudah baik secara langsung di lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa, maupun secara online melalui *e-commerce*. Kasus keamanan pangan masih terus terjadi hingga saat ini, oleh karena itu perlu adanya pemberian informasi yang memadai sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang terkini dan tepat, yaitu melalui:

a. Penyediaan Materi Keamanan Pangan

Modul terkait keamanan pangan dibuat sebagai materi edukasi keamanan pangan untuk masyarakat khususnya komunitas sekolah dalam rangka peningkatan PJAS yang aman, bermutu dan bergizi. Dengan meningkatnya pengetahuan komunitas sekolah terutama anak-anak sekolah tentang keamanan pangan, diharapkan dapat mendukung implementasi serta peningkatan kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan serta menciptakan generasi emas 2045. Selain itu, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan selalu relevan, efektif dan sesuai dengan perkembangan terbaru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan masyarakat, pembaharuan modul juga penting dilakukan.



Gambar 27. Pedoman dan Materi Keamanan Pangan Tahun 2024

Modul usulan baru maupun yang sudah ada di review dengan melibatkan pakar yang kompeten sehingga tercipta modul yang berkualitas dan *up-to-date* sehingga implementasi program PJAS yang bertujuan memberikan edukasi, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian anak sekolah tentang pentingnya keamanan pangan melalui konsumsi pangan aman bisa tercapai.

Melakukan *update* modul memastikan bahwa tujuan tersebut tetap tercapai secara efektif.

Saat ini, modul yang dikembangkan sebanyak 5 (lima) buah modul yang terdiri dari 3 (tiga) modul lama dan 2 (dua) modul usulan baru sebagaimana berikut:

1. Pedoman Penanganan Keracunan Pangan (review modul)
2. Pedoman Standar Kantin Pangan Aman di Sekolah (review modul)
3. Booklet Cek KLIK dan Cara Membaca Informasi Nilai Gizi (review modul)
4. Pedoman Kenali dan Konsumsi Susu dengan Aman (modul baru)
5. Pedoman terkait Pesan Keamanan Pangan terkait Konsumsi Gula Garam Lemak (modul baru)

b. Pembuatan Video *Milestone* PJAS

Dalam rangka mendukung suksesnya upaya advokasi kepada Pemerintah Kab/Kota, diperlukan media yang dapat dijadikan sebagai media sosialisasi Program PJAS di Indonesia. Salah satunya adalah dengan membuat video *milestone* Program PJAS di Indonesia, mulai dari awal pencanangan hingga saat ini. Pembuatan video ini bertujuan untuk:

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat luas dan pemangku kepentingan terkait tentang Sejarah Program PJAS di Indonesia dan capaian yang telah didapatkan.
2. Mendorong K/L dan Pemerintah Kab/Kota untuk segera mengambil peran dalam melanjutkan keberlangsungan Program PJAS di Indonesia.
3. Perwujudan pertanggungjawaban Badan POM kepada negara dan masyarakat luas akan Program PJAS.

Video *milestone* PJAS berdurasi 4 menit 24 detik yang mana dalam pembuatannya melibatkan siswa, orang tua murid, guru dan Kepala sekolah yang berasal dari SDN 04 Bambu Apus Jakarta Timur dan SMA Negeri 32 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Adapun Tahapan kegiatan pembuatan video sebagai berikut :

1. Rapat pengarah konsep video dokumenter Program PJAS
2. Penyusunan script video
3. Identifikasi kebutuhan artis (narasumber)
4. Identifikasi kebutuhan lokasi syuting
5. Identifikasi kebutuhan bahan dan alat
6. Identifikasi kebutuhan penyedia jasa pembuatan video/vendor
7. Pengadaan penyedia jasa pembuatan video/vendor
8. Rapat dengan vendor
9. Berkoordinasi dengan narasumber/artis pengisi video
10. Berkoordinasi dengan penanggung jawab lokasi syuting
11. Pengambilan syuting
12. Editing video
13. Rapat pembahasan draft video; dan
14. Finalisasi Video



Gambar 28. Video Milestone PJAS

4. Implementasi Kegiatan CPE (ASEAN Health Cluster 4)

Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD) merupakan pertemuan tingkat pejabat senior ASEAN (eselon 1) bidang kesehatan di bawah koordinasi *ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM)* yang bertujuan untuk membahas implementasi beberapa agenda penting yang dimandatkan oleh AHMM serta menerima laporan dan memberikan arahan kepada tiap-tiap Koordinator dan *focal point* ASEAN Health Cluster.

Terdapat 4 (empat) *cluster* dalam SOMHD, yaitu:

- a. *Cluster 1: Promoting health lifestyle*
- b. *Cluster 2: Responding to all hazards and emerging threat*
- c. *Cluster 3: Strengthening health system*
- d. *Cluster 4: Ensuring food safety*

Direktorat PMPUPO bertindak sebagai *Focal Point* untuk kegiatan ASEAN Health Cluster 4, *Consumer Participation and Empowerment Program (CPE)* sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK. 01.07/MENKES/2102/2023 tentang Susunan Keanggotaan Pumpunan Kegiatan (Focal Point) Kerja Sama Kesehatan *The Association Of Southeast Asian Nations (ASEAN)*.

Pada Tahun 2024 telah dilakukan beberapa pertemuan guna membahas rencana kerja serta capaian AHC4, yaitu antara lain:

- Laos, 1 - 5 Juli 2024: Pertemuan *Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)* ke-18
- Jakarta, 27 Oktober 2024: *CPE Workshop*
- Jakarta, 18-19 November 2024: *CPE Training on Developing and Implementing CPE Program*
- 21-22 November 2024: *8th AHC4 Meeting*

Rencana tindak lanjut:

- 1 Masukan lebih lanjut mengenai pembaruan Formulir Kerangka Rencana Pelatihan akan diupdate untuk seluruh AMS.
- 2 Laporan/ ringkasan pelatihan dan langkah kedepan akan dibagikan kepada Singapura, Vietnam, dan Timor-Leste untuk informasi mereka. Mereka juga didorong untuk berbagi detail tentang program CPE masing-masing guna memfasilitasi partisipasi dalam kegiatan berikutnya.
- 3 Indonesia, sebagai *lead country* kegiatan, akan membagikan laporan pelatihan kepada peserta *workshop* CPE untuk disetujui dan kemudian mengajukannya ke AHC 4 untuk mendapatkan dukungan. Laporan ini juga akan diedarkan ke SOMHD untuk mendapatkan persetujuan dan persetujuan publikasi.
- 4 Indonesia akan membagikan informasi tentang kegiatan *workshop* ini selama Pertemuan AHC 4 ke-8 untuk pencatatan dan panduan jika ada.



Gambar 29. Laporan Kegiatan CPE (ASEAN Health Cluster 4)

5. Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman

Program Desa Pangan Aman merupakan program prioritas nasional yang dikoordinasikan oleh Direktorat PMPUPO. Untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penyelenggaraan Program Desa Pangan Aman yang dilakukan oleh UPT BPOM, maka telah disusun Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 134 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman tentu saja tidak hanya mengandalkan peran BPOM saja, peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta seluruh lapisan masyarakat juga turut menentukan keberhasilan dari program ini hingga dapat dirasakan dampak dan manfaatnya. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan Program Desa Pangan Aman karena dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif. Oleh karena itu, peran aktif dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mereplikasi program menjadi kunci utama suksesnya Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman ini. Agar Program Desa Pangan Aman ini dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan, maka telah disusun Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 137 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai acuan untuk kesamaan pemahaman bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka penyelenggaraan Program Desa Pangan Aman di wilayahnya masing-masing.

Penyusunan kedua Keputusan ini juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman. Kedua Keputusan ini memuat ketentuan terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi program Desa Pangan Aman.



Gambar 30. Pedoman Kegiatan Desa Pangan Aman

Pengembangan Materi Berupa Video Keamanan Pangan

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan komunitas yang telah dilakukan oleh Direktorat PMPUPO adalah melalui penyusunan, pengembangan, dan penyampaian materi edukasi yang ringan, menarik, dan mudah dipahami sehingga kader dan fasilitator juga akan dengan mudah mensosialisasikan kembali kepada komunitasnya. Selain itu, perkembangan teknologi saat ini juga turut mendorong dan mengharuskan agar pengembangan materi dapat mengikuti tren yang saat ini digemari oleh masyarakat yaitu melalui materi visualisasi seperti gambar, animasi, video, dan lain sebagainya. Pengembangan materi edukasi semacam ini juga akan sangat mendukung sistem pembelajaran mengingat *e-learning* juga sudah menjadi pilihan agar target komunitas yang diberdayakan semakin meningkat dan cakupannya menjadi semakin luas.

Pada tahun 2024, Direktorat PMPU PO telah membuat video *reels* keamanan pangan. Tujuan pengembangan materi keamanan pangan berupa video ini adalah untuk menyediakan materi keamanan pangan dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan atraktif sehingga kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

Tema yang diangkat untuk pengembangan materi adalah terkait stunting dan keamanan pangan. Tema ini diangkat dalam rangka melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah atau menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Adapun target masyarakat yang diedukasi adalah generasi Y dan generasi Z. Generasi ini menjadi terget untuk diedukasi karena saat ini generasi tersebut termasuk generasi yang perlu mempersiapkan diri agar dapat melahirkan generasi yang

sehat. Dari pengamatan selama ini Gen Z maupun Gen Y /Milenial lebih memilih video pendek yang padat informasi dan menghibur daripada video panjang yang bertele-tele pada platform video *YouTube*, Tik Tok dan *Instagram* berdasarkan rekomendasi teman, keluarga atau *influencer* yang mereka ikuti di Media Sosial. Begitu juga sebaliknya mereka suka membagikan konten video yang mereka sukai kepada teman, keluarga atau pengikut mereka di media sosial. Berdasarkan beberapa penelitian, pengetahuan generasi milenial/Gen Y tentang stunting masih tergolong rendah sedangkan pengetahuan Gen Z tentang stunting berada dalam kategori kurang. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima gen Y dan gen Z tentang stunting.

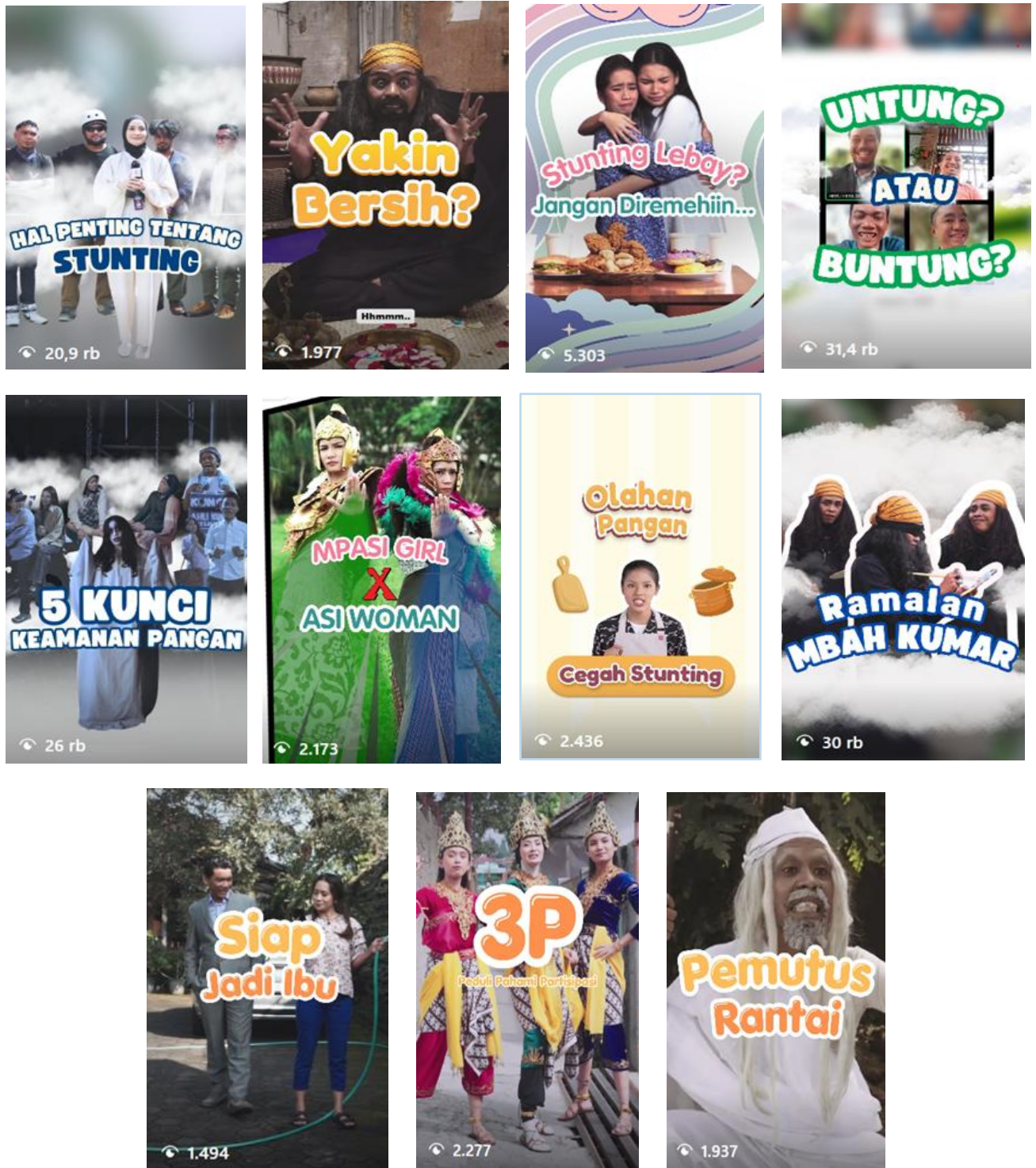
Video pendek ini berdurasi 90 detik sebanyak 15 item untuk ditayang pada TikTok/*reels* instagram. Talent dalam video ini juga melibatkan *Influencer* dan bekerja sama dengan pakar dari Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB. Adapun rincian pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rapat awal pembahasan materi dengan pihak ketiga
2. Pakar memberikan masukan dan reviu pada pengembangan materi keamanan pangan, yang meliputi tahapan:
 - **Pre Production**
 - a. *Log line* yaitu gambaran alur cerita secara garis besar untuk mengidentifikasi tokoh dan karakter yang akan diperankan dalam video tersebut.
 - b. Penyusunan script video. Script video disusun oleh tim kreatif dari pihak ketiga berdasarkan logline yang telah disetujui oleh Direktorat PMPUPO.
 - c. Pembuatan storyboard. Script yang telah disetujui dikirim ke pihak ketiga untuk penyusunan storyboard dan dikirim kembali untuk direviu.
 - d. Casting Talent. Casting talent dilaksanakan oleh pihak ketiga dan Direktorat PMPUPO.
 - e. Reading. Tahap ini dilakukan agar para talent mendalami alur cerita dan karakter yang akan diperankan sehingga mempermudah proses pengambilan video (shooting).
 - **Production**

Tahapan ini meliputi pemilihan dan pengurusan izin lokasi hingga proses pengambilan video. Pengambilan video akan dilakukan selama 2-3 hari.
 - **Post Production**

Reviu akan dilakukan oleh tim Direktorat PMPU PO bersama dengan pakar. Proses revisi video akan dilakukan sebanyak 2-3 kali hingga video dapat difinalisasi oleh pihak ketiga.
1. Setiap tahapan pada keseluruhan proses pengembangan video akan direviu oleh tim teknis di Direktorat PMPUPO dan pakar yang berasal dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung.

Untuk meningkatkan cakupan wilayah yang diintervensi keamanan pangan dan mengoptimalkan pelaksanaan implementasi keamanan pangan, 15 konten video ini telah dipublikasi melalui platform YouTube Channel Klub Pompi BPOM, Instagram dan Facebook @pmpupangan.bpom dan @klubpompi.bpom, serta beberapa diantaranya sudah diunggah di Intagram @bpom_ri.



Gambar 31. Publikasi Video Keamanan Pangan di Media Sosial

6. Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) telah dilaksanakan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Selama ini pengaruh program diukur melalui pengurangan persentase pangan tidak memenuhi syarat di pasar yang diintervensi, namun belum ada pengukuran peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku dari komunitas pasar. Mengingat program pasar pangan aman berbasis komunitas memiliki tujuan agar komunitas pasar dapat berdaya untuk memastikan keamanan pangan di pasarnya masing-masing, maka perlu diukur apakah program PPABK memberikan pengaruh terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku komunitas pasar.

Penyusunan kuesioner untuk mengukur pengaruh program PPABK terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku komunitas pasar dilakukan dengan melibatkan pakar dari IPB *University*. Dalam menyusun tools dilakukan rangkaian pelaksanaan sebagai berikut:

- Rapat pembahasan awal dengan pakar
Penyusunan kuesioner dilakukan oleh Tim Dit. PMPUO, Kuesioner yang disusun sebanyak 3 kuesioner yaitu kuesioner untuk pengelola pasar, pedagang pasar dan pengunjung pasar. Selanjutnya kuesioner yang telah disusun dibahas dengan pakar.
- Uji coba kuesioner ke 3 (tiga) pasar yang telah mendapat intervensi program PPABK.
Kuesioner akan diujicobakan di pasar intervensi tahun 2024, yaitu Pasar Ganefo dan Pasar Tomang di Kota Jakarta serta Pasar Gunung Batu di Kota Bogor
- Rapat finalisasi kuesioner
Finalisasi kuesioner yang telah diujicobakan dilakukan oleh Tim Dit PMPUPO dengan Pakar



BADAN PENGARAS OBAT DAN MAKANAN
KUESIONER UNTUK KOMUNITAS PASAR

A. IDENTITAS DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN

No	Pertanyaan	Jawaban
ID1	Nama responden	
ID2	Umur	
ID3	Jenis Kelamin (lingkar yang sesuai)	1. Laki-laki 2. Perempuan
ID4	Pendidikan Terakhir (lingkar yang sesuai)	1. Tidak sekolah 2. Tidak tamat SD 3. Tamat SD 4. Tamat SMP 5. Tamat SMA 6. Tamat Akademik/Perguruan Tinggi
ID5	Pasar tempat bertugas	

BADAN PENGARAS OBAT DAN MAKANAN
KUESIONER UNTUK KOMUNITAS PASAR

A. IDENTITAS DAN KARAKTERISTIK RESPONDEN

No	Pertanyaan	Jawaban
ID1	Nama responden	
ID2	Umur	
ID3	Jenis Kelamin (lingkar yang sesuai)	1. Laki-laki 2. Perempuan
ID4	Pendidikan Terakhir (lingkar yang sesuai)	A. Tidak sekolah B. Tidak tamat SD C. Tamat SD D. Tamat SMP E. Tamat SMA F. Tamat Akademik/Perguruan Tinggi
ID5	Alamat Berdagang	
ID6	Lama Berdagang	

Gambar 32. Dokumentasi Kegiatan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)

7. Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah. PJAS merupakan pangan siap saji yang ditemui dan dijual di lingkungan sekolah serta secara rutin dibeli dan dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari PJAS karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan PJAS dan juga pembinaan produsen, penjual, serta konsumen PJAS harus dilakukan secara holistik agar keamanan PJAS sejak diproduksi hingga dikonsumsi tetap terjamin.

Untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif komunitas sekolah dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan, perlu dilakukan penilaian dan penghargaan kepada sekolah yang telah mengimplementasikan program keamanan pangan dalam mewujudkan sekolah dengan PJAS aman. Kegiatan ini juga dikenal dengan istilah Lomba Sekolah Dengan PJAS Aman. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi komunitas sekolah dalam upaya mewujudkan program keamanan pangan di sekolah
- Memberikan motivasi kepada Sekolah untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya dalam mewujudkan pangan aman.

Tahapan penilaian lomba sekolah sebagai berikut:

- a. Penilaian Dokumen Profil Sekolah
- b. Penilaian Wawancara
- c. Verifikasi Lapang Sekolah

Hal-hal yang menjadi kriteria penilaian lomba sekolah dengan PJAS aman adalah sebagai berikut:

- a) Keberhasilan Program Keamanan Pangan Sekolah yang meliputi :
 - Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Keamanan Pangan Sekolah
 - Tim Keamanan Pangan di Sekolah
 - Aktivitas Kader Keamanan Pangan Sekolah secara mandiri
 - Upaya untuk mewujudkan keberlanjutan program PJAS di sekolah yang telah diintervensi serta upaya pengimbasan/replikasi ke sekolah lainnya.
- b) Inovasi dan Prestasi Sekolah yang meliputi :
 - Inovasi sekolah/kader terkait keamanan pangan yang diselenggarakan secara mandiri
 - Keikutsertaan/prestasi sekolah pada kegiatan terkait keamanan pangan

Lomba Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2024 diikuti oleh 77 sekolah di *catchment area* 33 BB/BPOM yang ada di seluruh Indonesia dengan rincian sekolah adalah 32 SD/MI, 26 SMP/MTs dan 19 SMA/MA. Satu Balai yaitu BBPOM Manado tidak mengikuti kegiatan lomba dikarenakan belum ada sekolah yang siap mengikuti lomba.

Tim juri dalam Lomba Sekolah dengan PJAS Aman adalah dari 19 orang di internal Dit PMPUPO, 1 orang perwakilan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, 1 orang perwakilan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, 1 orang perwakilan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan dan perwakilan Kementerian/Lembaga dari Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan (KPPPA); Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kementerian Kesehatan); Direktorat Pembinaan SD (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi); serta Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (Kementerian Agama).

Setelah melalui tahap penilaian dokumen profil sekolah, penilaian wawancara dan verifikasi lapang secara *online* maka dilakukan penentuan pemenang oleh juri eksternal dan juri internal melalui rapat pleno 5 Juni 2024. Dalam rapat pleno ini diputuskan pemenang lomba sekolah 2024 yang dibagi dalam 3 Zona yang meliputi Zona Barat (Jawa dan Sumatera), Zona Tengah (Kalimantan, Bali, Sulawesi dan NTB), dan Zona Timur (NTT, Maluku, dan Papua) untuk masing-masing tingkat sekolah. Adapun daftar pemenang lomba sekolah 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 17. Pemenang Lomba Sekolah dengan PJAS Aman berdasarkan keputusan Tim Penilai

Tingkat SD

Zona	Juara	Nama Sekolah
Barat	1	SDN Mojo VI -225- Kota Surabaya Prov. Jawa Timur
	2	MIN 36 Kabupaten Aceh Besar Prov. Nanggroe Aceh Darussalam
	3	SD Kasian Kabupaten Bantul Prov. Lampung
	Harapan 1	SD Islam Terpadu Bustanul Ulum Kabupaten Lampung Tengah Prov. Lampung
Tengah	1	MIN 9 Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan
	2	SDN 19 Cakranegara, Kota Mataram Prov. Nusa Tenggara Barat

Zona	Juara	Nama Sekolah
	3	SDN 004 Tanah Grogot, Kabupaten Paser Prov. Kalimantan Timur
Timur	1	MIN Lembata, Kabupaten Lembata Prov. Nusa Tenggara Timur
	2	SDN 02 Tilamuta Kabupaten Boalemo Prov. Gorontalo

Tingkat SMP

Zona	Juara	Nama Sekolah	Nilai
Barat	1	SMPN 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo Prov. Jawa Timur	98,05
	2	SMPN 2 Garut, Kabupaten Garut Prov. Jawa Barat	95,83
	3	SMPN 1 Padang Panjang, Kabupaten Padang Panjang Prov. Sumatera Barat	93,93
	Harapan 1	SMP Negeri 2 Sijuk, Kabupaten Belitung Prov. Bangka Belitung	92,26
Tengah	1	SMPN 2 Tanah Grogot Kabupaten Paser Prov. Kalimantan Timur	95,84
	2	MTsN 2 Tolitoli Kabupaten Tolitoli Prov. Sulawesi Tengah	94,15
	3	SMPN 3 Bangli, Kabupaten Bangli Prov. Bali	93,00
Timur	1	SMPN 1 Wonosari Kabupaten Boalemo Prov. Gorontalo	93,92

Zona	Juara	Nama Sekolah	Nilai
	2	MTsN 2 Lembata, Kabupaten Lembata Prov. Nusa Tenggara Timur	87,02

Tingkat SMA

Zona	Juara	Nama Sekolah	Nilai
Barat	1	SMK Negeri 1 Temanggung, Kabupaten Temanggung Prov. Jawa Tengah	97,19
	2	SMK Wikrama 1 Garut, Kabupaten Garut Prov. Jawa Barat	92,00
	3	MAN 1 Mukomuko Kabupaten Mukomuko Prov. Bengkulu	92,00
	Harapan 1	SMAN 1 Sumatera Barat Kota Padang Panjang Prov. Sumatera Barat	91,00
Tengah	1	SMAN 5 Mataram, Kota Mataram Prov. Nusa Tenggara Barat	92,19
	2	SMKN 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser Prov. Kalimantan Timur	91,86
	3	MAN Barito Utara, Kabupaten Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah	83,42
Timur	1	SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon, Kota Ambon Prov. Maluku	87,37
	2	MAN 1 Boalemo Kabupaten Boalemo Prov. Gorontalo	86,98

Pada tanggal 21 Juni 2024, bertempat di Auditorium Gedung Merah Putih Badan POM Jakarta, dilakukan pemberian penghargaan kepada sekolah pemenang lomba sekolah dengan PJAS aman. Penyerahan piagam penghargaan diberikan secara langsung oleh Plt Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Ibu Ema Setyawati, S.Si., Apt., ME.



Gambar 33. Dokumentasi Kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

8. Lomba Desa Pangan Aman

Setiap tahun Badan POM memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah/Desa yang telah mendukung program pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan Lomba Desa Pangan Aman yang bertujuan untuk memberikan penghargaan dan apresiasi atas upaya Desa/Kelurahan serta Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Desa Pangan Aman melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Terdapat beberapa tim juri yang berasal dari beberapa Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, BKKBN, Badan Pangan Nasional, dan BPOM.

Kegiatan penilaian Lomba Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1) Penilaian Dokumen

Dilakukan pada tanggal 1, 7, dan 13 Maret 2024. Terdapat 33 profil desa/kelurahan yang mewakili 33 provinsi untuk dinilai oleh juri. Semua dokumen dinilai berdasarkan poin penilaian yang telah ditetapkan yaitu:

- Keberhasilan Pelaksanaan Program Keamanan Pangan di Desa
- Inovasi dan Inisiatif Program Keamanan Pangan di Desa
- Keberlanjutan/Kemandirian Program Keamanan Pangan di Desa
- Integrasi Program

2) Seleksi Wawancara

Seleksi Wawancara dilakukan pada tanggal 19 - 20 Maret 2024. Tim juri/verifikator pusat melakukan wawancara terhadap 5 besar desa di masing-masing regional barat, tengah, dan timur secara daring. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa/Lurah yang didampingi oleh perwakilan dari Tim KPD/KKPD. Wawancara ini bertujuan untuk menggali terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi program desa pangan aman. Wawancara juga dilakukan untuk menggali pengalaman dan inovasi yang dilakukan di desa tersebut dalam melaksanakan program keamanan pangan.

3) Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan dilakukan pada tanggal 15, 16, dan 20 Mei 2024 secara daring. Verifikasi lapangan bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan sinergisme keamanan pangan desa dengan program lainnya yang ada di desa. Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan dan implementasi keamanan pangan di komunitas (Ibu Rumah Tangga, Warung, IRTP, PKL, dan Sekolah) serta verifikasi terhadap beberapa dokumen yang perlu dikonfirmasi berdasarkan hasil penilaian dokumen dan wawancara. Nilai tertinggi akan didapatkan apabila Desa menerapkan prinsip keamanan pangan dengan baik. Pemerintah Daerah sangat mendukung dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini, terlihat dari kehadiran Pejabat daerah dalam kegiatan penilaian maupun kegiatan lain terkait Desa Pangan Aman.

Berdasarkan hasil penilaian didapatkan pemenang lomba Desa Pangan Aman Tahun 2024 pada Tabel 18 berikut:

Tabel 18. Pemenang Lomba Desa Pangan Aman berdasarkan keputusan Tim Penilai

Juara	Nama Desa/Kelurahan
Regional Barat	
1	Kelurahan Purwosari, Kab. Kulon Progo, DIY
2	Kelurahan Pegangsaan Dua, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
3	Ada 2 juara ke-3 a. Kelurahan Cikerai, Kota Cilegon, Banten b. Desa Banglas, Kab. Kepulauan Meranti, Riau
Regional Tengah	
1	Desa Dawan Klod, Kab. Klungkung, Bali
2	Desa Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat
3	Desa Hilir Muara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
Regional Timur	
1	Desa Tri Rukun, Kab. Boalemo, Gorontalo
2	Desa Utaurano, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
3	Desa Waimital, Kab. Seram Bagian Barat, Maluku

Pemberian penghargaan kepada pemenang Lomba Desa Pangan Aman dilaksanakan pada kegiatan Pertemuan Teknis Germas Sapa tanggal 21 Juni 2024 di Auditorium Gedung Merah Putih Badan POM. Melalui kegiatan Lomba Desa Pangan Aman ini diharapkan dapat diperoleh model Desa Pangan Aman yang akan menjadi contoh di tingkat nasional untuk proses replikasi dan keberlanjutan Desa Pangan Aman di desa lainnya di Indonesia.



Gambar 34. Dokumentasi Kegiatan Lomba Desa Pangan Aman

9. Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Penilaian lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Mei 2024 dengan 3 tahap yaitu verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi lapangan secara online. Peserta adalah pasar yang telah diintervensi oleh BB/BPOM dan pasar replikasi perusahaan daerah. Kriteria penilaian lomba adalah sebagai berikut:

- Replikasi Program oleh Pemerintah Daerah /Lembaga Penanggung Jawab
- Dukungan Pemerintah Daerah/Lembaga Penanggung Jawab
- Hasil Monitoring dan Evaluasi Uji Pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
- Hasil Survey Pasar (Meliputi Sarana, Prasarana, Kebersihan Pasar dan Perilaku Pedagang)
- Temuan dan Tindak Lanjut Pelanggaran
- Kemandirian Pasar Melalui Jenis dan Jumlah Inovasi yang Dilakukan
- Peran Komunitas dalam Program PPABK
- Kondisi di luar pasar

Penilaian Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan sejak bulan Februari - Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Tahapan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

No	Tahapan	Tanggal
1.	Penilaian Dokumen	21 Februari 2024
2.	Wawancara	26 dan 27 Maret 2024
3.	Verifikasi Lapang Online	2, 3, 8 Mei 2024

Tim Penilai, Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas terdiri dari :

- Nyimas Dwi Koryati, S.E., M.Si., Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.
- Rudy Elriman Hutagalung, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
- Irene Yasmine, Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
- Astari Diah Ayuwangi. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
- Prayudi Budi Utomo, A.Pi, M.Sc. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia..

- Sugiyatmi, STP., MM, Direktorat Pengawasan Penerapan Standard Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional.
- Ratminah, S.Si, Apt, M.P dan Eka Seva Ermawati, S.Farm, Apt, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, Badan POM.
- Tim Juri Internal Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Pada tanggal 1, 2 dan 8 April 2024 dilaksanakan rapat penentuan pemenang lomba dengan nilai tertinggi sebagai berikut:

Regional Barat:

1. Pasar Potrojayan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pasar Nambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur
3. Pasar Atas Baru, Kota.Cimahi, Jawa Barat

Regional Tengah:

1. Pasar Rakyat Kapidi, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan
2. Pasar Blahkiuh, Kab. Badung, Bali
3. Pasar Dasan Agung, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Regional Timur:

1. Pasar Bastiong, Kota Ternate, Maluku Utara
2. Pasar Beriman, Kota Tomohon, Sulawesi Utara
4. Pasar Dulan Pokpok, Kab. Fakfak Papua Barat



Gambar 35. Dokumentasi Kegiatan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

SASARAN KEGIATAN 3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Mutu Gizi Makanan
Indikator Kinerja Utama 1	Persentase kader keamanan Pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan

1. KIE Kader Keamanan Pangan

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan pembentukan sebanyak 277 orang Kader Keamanan Pangan di Kota Yogyakarta, Kota Ambon, Kota Tangerang, dan Kota Palembang. Kader Keamanan Pangan tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan KIE kepada masyarakat baik secara langsung (tatap muka, webinar) maupun melalui media sosial (instagram, tiktok, facebook, dll), *WhatsApp Group*, radio, *YouTube* dan lain-lain. Monitoring yang ketat diterapkan kepada Kader dan Organisasi sosial kemasyarakatan dengan mengingatkan Kader yang belum melaksanakan tugasnya, pemberian materi Juknis Kader KP dan *Facilitator Skill* untuk memberikan pencerahan dan penguatan kepada Kader terkait tugasnya. Persentase Kader yang telah melaksanakan KIE sebesar 99,58% dari target 99,2%. Hal ini sudah di atas target yang ditetapkan.



Gambar 36. KIE Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan

2. Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pramuka

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka merupakan salah satu mitra strategis BPOM mewakili masyarakat dalam penguatan pengawasan serta meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Kerja sama BPOM dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka telah terjalin sejak 2017 dan diperbaharui pada 2022. Salah satu implementasi kerja sama ini adalah pengembangan Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM) untuk meningkatkan peran aktif anggota Pramuka dalam pengawasan Obat dan Makanan dan memperluas pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Rintisan Saka POM sudah bergerak sejak tahun 2017. Rintisan Saka POM telah disahkan menjadi Saka POM pada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI tahun 2023. Momen ini sangat penting sebagai legal basis untuk implementasi Saka POM.

Sepanjang tahun 2024, Saka POM terus mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dengan *highlight* kegiatan sebagai berikut:



Gambar 37. Highlight Kegiatan Saka POM 2024

Tahun 2024, sudah terbentuk 34 Saka POM Tingkat Daerah dan 199 Saka POM Tingkat Cabang. Salah satu komponen penguatan organisatoris Saka POM adalah penyusun struktur organisasi Saka POM antara lain Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka POM. Pada 8 November 2024, dilaksanakan Pelantikan Pengurus Majelis Pembimbing Saka POM dan Pimpinan Saka POM Tingkat Nasional Masa Bakti 2024-2029 tertuang pada Surat Keputusan (SK) Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 187 Tahun 2024 tentang Penyempurnaan Pengurus Pimpinan Satuan

Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM) Tingkat Nasional Masa Bakti Tahun 2024–2029. Juga tertuang dalam Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penyempurnaan Pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM) Tingkat Nasional Masa Bakti Tahun 2024–2029. Pengukuhan ini bertujuan mengefektifkan setiap peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam operasionalisasi Saka POM.



Gambar 38. Pelantikan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka POM Tingkat Nasional

Untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, pada tanggal 6 November 2024 Kepala BPOM Taruna Ikrar dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Saka POM untuk masa bakti 2024–2029 dan Direktur PMPUPO, Ema Setyawati sebagai Ketua Pimpinan Saka POM Tingkat Nasional Tahun 2024-2029. Saka POM mengawal enam bidang kerja, yaitu Bidang Hukum dan Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Kerja Sama dan Kemitraan, Krida Pengujian Sederhana Obat dan Makanan, Krida Pemantauan Obat dan Makanan, serta Krida Informasi Obat dan Makanan. Untuk menunjang pelaksanaan Saka POM, telah dilaksanakan pelatihan Instruktur Saka POM di Taman Rekreasi Wiladatika/ TRW.



Gambar 39. Pelatihan Instruktur Saka POM

Tahun 2024, juga dimulai menyusun sertifikasi kompetensi Saka POM yang akan diselaraskan dengan SKKNI Keamanan pangan. Pengembangan kompetensi Saka POM level 3 untuk Penegak hingga level 4 untuk Pandega. Untuk penyusunan SKKNI Level 3 dan Level 4 ini diteruskan pada tahun Anggaran 2025.

Selain itu, pada 16 -19 Desember 2024 secara luring di Pusdiklatnas Kwartir Nasional gerakan pramuka, Cibubur telah dilaksanakan Kursus Instruktur Saka POM, pelatihan ini digelar bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan tentang pendidikan kepramukaan, prinsip dasar kepramukaan, dan metode latihan Saka kepada tenaga ahli di bidang POM sebagai bekal menjadi instruktur Saka POM dalam membina penegak dan pandega dan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada Instruktur Saka POM agar mampu mengelola dan mengembangkan Saka POM ke depan bersama Pamong Saka POM.

Saka POM diharapkan menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) obat dan makanan. Serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok negeri sehingga upaya mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan Obat dan Makanan dapat menjadi lebih efektif dan optimal.

3. Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Pramuka

Pramuka dilibatkan dalam sosialisasi Keamanan Pangan. telah dilaksanakan sosialisasi secara *hybrid* Petunjuk Pelaksanaan (Jukran). Untuk luring dilaksanakan di Mataram, Banda Aceh dan Gorontalo kepada pengurus dan instruktur Saka POM di seluruh Indonesia secara daring. Pramuka juga dilibatkan sebagai peserta dalam kegiatan FHBN, webinar paman kece, bimtek kader, dll. Pramuka juga dilibatkan dalam KIE di media sosial.



Gambar 40. Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Pramuka di Kota Mataram

SASARAN KEGIATAN 4	Meningkatkan Pendampingan Pelaku Usaha dan Pelayanan Publik di Bidang Makanan
Indikator Kinerja Utama 1	Jumlah Fasilitator yang Dibina Untuk Melakukan Pendampingan Kepada UMK Pangan Olahan

1. Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya

Upaya Badan POM dalam mendukung iklim usaha adalah dengan memberikan bimbingan dan pendampingan agar pelaku usaha mampu memiliki daya saing. Dengan banyaknya UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Badan POM tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan sinergi semua pihak, baik itu dengan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas masyarakat, asosiasi, dan stakeholder terkait lainnya. Untuk itu berbagai upaya kemitraan atau sinergisme untuk meningkatkan daya saing para pelaku usaha juga telah dilakukan oleh Badan POM bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Asosiasi, dunia pendidikan (termasuk dengan inkubator bisnis atau LPPM Universitas), dan *e-commerce*.

B POM mengadopsi strategi pemberdayaan berbasis masyarakat, dengan bekerjasama dengan Ormas, Asosiasi atau Instansi lainnya melalui pemberdayaan fasilitator keamanan pangan untuk memperluas cakupan intervensi terhadap pelaku usaha pangan. Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan berasal dari anggota Ormas, Asosiasi atau Lembaga lainnya telah diinisiasi sejak tahun 2017.

Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan salah satunya melalui Pelatihan bagi Fasilitator Nasional Keamanan Pangan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Fasilitator Keamanan Pangan, sehingga nantinya para fasilitator ini bisa mendiseminasikan pengetahuannya kepada Fasilitator Daerah dan mensosialisasikan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan. Untuk itu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menyelenggarakan Pelatihan bagi Fasilitator Keamanan Pangan dengan mengacu pada kurikulum Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Tingkat Pertama Berbasis Kompetensi sesuai Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan. Capaian fasilitator pada pelatihan Tahun 2024 seperti pada Tabel 20.

Tabel 20. Capaian Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Tahun 2024

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Lulus
1	Pelatihan Dasar Fasilitator Keamanan Pangan	24-25 April 2024.	50	40
2	Pelatihan PKP Pertama Berbasis Kompetensi Batch 1	19-24 Juni 2024	30	24
3	Pelatihan PKP Pertama Berbasis Kompetensi Batch 2	2-5 Juli 2024	30	24

2. Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka pendampingan penerapan CPPOB/HACCP di UMKM

Dalam Peraturan BPOM No 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga, tercantum bahwa “Untuk memperkuat manajemen pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota, Pemerintah dalam hal ini Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan, khususnya pangan industri rumah tangga. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan tersebut. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/ Kota ini maka sangat dibutuhkan adanya keterpaduan manajemen sumberdaya, baik sumberdaya manusia penyuluh pangan untuk pembinaan dan pengawas pangan untuk pengawasan, maupun sumberdaya sarana seperti laboratorium untuk pengujian sampel pangan. Keterpaduan manajemen sumberdaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/Kota”.

Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Muda dengan kompetensi yang sesuai dan dalam jumlah yang memadai dibutuhkan di Kabupaten/Kota. Untuk memastikan penyuluh mendapatkan bekal yang sesuai untuk nantinya melakukan tugas penyuluhan di Kabupaten/Kota, diadakan pelatihan berbasis kompetensi khusus untuk PKP Muda pada tanggal 18-22 Maret 2024 di Hotel Aryaduta Menteng yang diikuti oleh 31 peserta.

Skema sertifikasi profesi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Muda dengan rincian sebagai berikut:

1. SKKNI C.100000.006.01 Melaksanakan Program dan Prosedur Keamanan Pangan
2. SKKNI C.100000.046.01 Mendesain SOP (Standar Operating Procedures) Pengolahan Pangan

3. SKKNI C.100000.066.02 Melakukan Verifikasi Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
4. SKKNI C.100000.029.02 Mendesain Langkah Persiapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
5. SKKNI C.100000.030.02 Mendesain dan Mendokumentasikan 7 Prinsip Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
6. SKKNI C.100000.032.01 Melakukan Pelatihan Keamanan Pangan
7. SKKNI C.100000.009.01 Menyediakan Informasi Pekerjaan

3. Pembinaan Usaha Ritel Pangan dalam rangka Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Peredaran

Pembinaan usaha ritel pangan dilakukan untuk: Meningkatkan pembinaan terhadap pedagang di ritel tradisional dan modern terkait pangan yang aman; Mendorong pedagang di ritel tradisional dan modern untuk mengedarkan Pangan Olahan yang aman; Mendorong pedagang di ritel tradisional dan modern untuk menerapkan Cara Peredaran Pangan yang Olahan Baik (CPerPOB) serta Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di ritel modern dan tradisional. Pembinaan Usaha ritel pangan dilakukan oleh fasilitator ritel pangan yang personil pilihan yang ditugaskan oleh organisasinya dan telah mengikuti *Training of Trainer (ToT)* yang diselenggarakan oleh Badan POM sesuai kurikulum yang ditetapkan dan bersertifikat untuk menyampaikan pendampingan kepada pengusaha ritel yang menjual pangan olahan. Materi yang disampaikan selama Sosialisasi Keamanan Pangan di Ritel dalam rangka pembinaan usaha ritel yaitu: Keamanan Pangan; 5 Kunci keamanan pangan Ritel/ Sarana Peredaran; Pengenalan izin edar pangan olahan. Metode Sosialisasi Keamanan Pangan: offline atau online (dapat dilakukan melalui *wag*, *telegram grup*, *zoom meeting*, *google meet* maupun aplikasi online lainnya). Fasilitator yang menjadi fasilitator ritel pangan berasal dari 11 organisasi/ lembaga masyarakat yaitu Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), BIG Indonesia, Fatayat NU, Garda Transfumi, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), IWAPI DIY, Yayasan Karya Wirausaha Sinergi (Kawis, Nasyiatul Aisyiyah, Wanita Hindu Darma Indonesia (WHDI) DIY, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim (YPCM) dengan jumlah total 34 orang fasilitator nasional. Tiap Fasilitator Nasional melakukan Diseminasi Internal (replikasi) kepada Fasilitator di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Fasilitator Daerah. Dari kegiatan pembinaan usaha ritel menghasilkan 194 fasilitator daerah dan telah dilakukan sosialisasi keamanan pangan kepada 2.057 UMKM Ritel pangan. Dari pembinaan kepada pelaku usaha ritel ini diharapkan pelaku usaha ritel dapat menerapkan prinsip keamanan pangan disepanjang rantai distribusi pangan.

4. Pelatihan Berbasis Kompetensi SKKNI Penyuluh Keamanan Pangan Tk. I

Dalam rangka peningkatan daya saing UMK Pangan Olahan, diperlukan peran fasilitator pendamping UMK yang kompeten. Fasilitator tersebut berasal dari UPT BPOM, Ormas dan Mahasiswa PAGC. Sehubungan dengan hal tersebut telah dilaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi PKP Pertama dan Muda kepada calon Fasilitator dari UPT BPOM. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi para petugas UPT BPOM dalam melakukan pendampingan kepada UMKM Pangan Olahan di wilayah kerjanya masing-masing terkait penerapan CPPOB.

Kegiatan PKP Pertama bagi petugas UPT BPOM pada Tahun 2024 antara lain:

1. PKP Pertama Batch 1 tanggal 13-16 Mei 2024 secara daring yang diikuti oleh 31 peserta
2. PKP Pertama Batch 2 tanggal 3-6 Juni 2024 secara daring yang diikuti oleh 31 peserta

5. Sadar Pangan Aman Santri (SAPA Santri)

Pesantren memiliki peran dalam mengembangkan ekonomi masyarakat guna membantu pemerintah salah satunya melalui program kewirausahaan. *One Pesantren One Product* (OPOP) merupakan program yang dijalankan oleh Pondok Pesantren untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta kemandirian secara ekonomi, melalui pengembangan unit-unit usaha yang dijalankan oleh Pesantren. OPOP memiliki manfaat untuk internal pesantren yaitu peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas SDM, dan memperluas mitra dengan masyarakat sekitar. Di Provinsi Jawa Timur, Program OPOP menjadi program unggulan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ada 3 Pilar Program OPOP, yaitu *Santripreneur*, *Pesantrenpreneur*, dan *Sosiopreneur*. Salah satu komoditi pesantren dalam Program OPOP tersebut adalah pangan olahan/kuliner yang harus dikawal jaminan keamanan, mutu dan gizinya oleh Kementerian/Lembaga yang berwenang. BPOM sesuai kewenangannya juga ingin mengampu peran dan tanggung jawab ini khususnya bagi pelaku usaha komoditi pangan olahan terkemas di lingkup pondok pesantren, yang diawali di propinsi Jawa Timur. Kedepan program ini akan diperluas ke propinsi lain dengan prioritas pada propinsi dengan Pontren yang berpotensi besar dalam bidang ekonomi khususnya di sektor pangan olahan.

Di era digitalisasi ini, *entrepreneur* ataupun *start-up* memiliki peluang cukup besar dalam pengembangan ekonomi dunia, yang saat ini sudah tidak dibatasi oleh umur, sehingga semangat wirausaha dapat ditumbuhkan sejak bangku sekolah. Terkait hal ini, lembaga pendidikan harus dapat mengelola keberlangsungan pendidikan para siswa termasuk para santri serta menggerakkan sumber daya di pondok pesantren sendiri. Untuk itu perlu dikembangkan Program *Santripreneur* (SAPA SANTRI).

Program ini diharapkan dapat memfasilitasi percepatan pengembangan kewirausahaan dibidang pangan olahan di lingkungan Pondok Pesantren. Diharapkan para pelaku UMK di lingkungan pondok pesantren, baik alumni maupun masyarakat umum mendapatkan pemahaman yang baik terkait regulasi, standardisasi, dan prosedur perizinan dalam pengembangan usaha di bidang pangan olahan dan menjadi daya dorong untuk meningkatkan ekonomi umat. Bentuk kegiatan SAPA SANTRI antara lain Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan bagi Santri.

Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2024 antara lain:

1. Bimtek CPPOB bagi Pelaku Usaha di Mojokerto pada tanggal 24 – 26 April 2024 berlokasi di Aston Mojokerto Hotel & Conference Center dengan jumlah peserta 30 orang
2. Bimtek CPPOB bagi Pelaku Usaha di Yogyakarta pada 6 – 8 Mei 2024 berlokasi di Hotel Grand Mercure Adisucipto, Yogyakarta dengan jumlah peserta 24 orang
3. Penyuluhan Keamanan Pangan dalam Rangka Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan bagi Santri dilaksanakan pada tanggal 23 – 24 Juli 2024 berlokasi di Hotel Ciputra World Surabaya, diikuti oleh 54 orang peserta yang berasal dari Pondok Pesantren di Jawa Timur



Gambar 41. Dokumentasi Bimtek CPPOB



Gambar 42. Dokumentasi Penyuluhan Keamanan Pangan dalam Rangka Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan bagi Santri

SASARAN KEGIATAN 4	Meningkatkan Pendampingan Pelaku Usaha dan Pelayanan Publik di Bidang Makanan
Indikator Kinerja Utama 2	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

1. Pengembangan Aplikasi Istana UMKM

Istana UMKM (IU) adalah salah satu aplikasi pelayanan publik di Badan POM yang dirintis sebagai bentuk upaya kolaborasi, sinergisme dan inovasi diantara Kementerian/Lembaga dan industri terkait pangan, obat tradisional dan kosmetika, termasuk akademisi, masyarakat dan pemerhati. Dalam rangka peningkatan kinerja layanan publik, dilakukan pengembangan pada aplikasi IU serta dilakukan pemeliharaan untuk mendapatkan hasil layanan publik yang optimal. Pengembangan aplikasi IU sebagai sebuah alat mendukung proses pengawasan dan pembinaan UMKM di seluruh Indonesia. Kegiatan pengembangan dilakukan diantaranya:

- a. Rapat Pembahasan dengan Pihak Pengembang (Pihak Ketiga)

Rapat pembahasan dilakukan melalui daring terkait persiapan yang dibutuhkan dalam proses *maintenance*, pengembangan dan penambahan materi konten untuk subsite. Dalam pertemuan tersebut melibatkan pihak ketiga (pengembang *subsite* dan konten kreator).
- b. Pelaksanaan Pengembangan Konten Istana UMKM

Dalam upaya memperbaharui subsite diperlukan konten-konten baru, menarik dan terkini sehingga dapat menarik bagi pengunjung *subsite*. Konten yang diolah menjadi bentuk media informasi berupa infografis, artikel ataupun *banner subsite*.
- c. Pelaksanaan Pengembangan *Subsite* Istana UMKM

Pada tahap pengembang ini, akan dilakukan pemantauan progress-progres yang sudah dilakukan oleh pengembang dan memonitoring kesesuaian pengembangan subsite yang disetujui dan ketepatan waktu pelaksanaan. Hal-hal yang dikembangkan selama 2024 adalah pengembangan fitur pelaporan PAGC, pengembangan fitur *Tawk To* untuk *Live Chat* pelayanan publik pada subsite istana UMKM, serta pengembangan fitur Pelayanan Publik *in Your Pocket* (BLICKET).
- d. SIT dan UAT subsite

Uji coba pengembangan yang terbagi dalam 2 tahap yaitu: *System Integration Testing* (SIT) dengan melibatkan Pusdatin BPOM yang dilaksanakan 28 November 2024 dan *User Acceptance Testing* (UAT) dengan melibatkan Pusdatin BPOM dan pengguna subsite pada tanggal 16 Desember 2024. Hasil SIT dan UAT dari aplikasi Istana UMKM menunjukkan bahwa aplikasi Istana UMKM telah lulus uji coba dan dapat digunakan.

2. Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan

Peran dan partisipasi semua pemangku kepentingan melalui sinergi program terkait UMKM pangan olahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sangat diperlukan. Dalam rangka mendukung pemberdayaan UMK pangan olahan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan POM bersama Kementerian/Lembaga/Industri adalah melalui penyelenggaraan Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan.

Tujuan:

- a. Meningkatkan aksesibilitas UMK pangan olahan dalam menghadapi masalah dan tantangan penyediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.
- b. Meningkatkan kapasitas, daya saing dan kemandirian UMK pangan olahan.
- c. Meningkatkan komitmen pelaku Industri Pangan Olahan dan *crowdfunding* dalam pembinaan kepada UMK Pangan Olahan melalui mekanisme CSR.

Kegiatan sinergi dengan OTA pada Tahun 2024 antara lain:

- a. *Focus Group Discussion* OTA pada tanggal 10 Juli 2024
- b. Sinergi Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan tanggal 28 November 2024

SASARAN KEGIATAN 5	Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemda dan Stakeholder dalam Pengawasan Makanan
Indikator Kinerja Utama 1	Jumlah Pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan

1. Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja

Pertemuan dilaksanakan secara daring, luring dan *hybrid*, baik mengundang lintas sektor yang akan bekerja sama dengan BPOM terkait pemberdayaan Masyarakat ataupun memenuhi undangan lintas sektor. Lintas sektor berasal dari ormas/ asosiasi.

1) Pertemuan Dit PMPUPO dan UPT BPOM

Pertemuan dilaksanakan secara daring tanggal 16 Februari 2024 bersama UPT yang akan melaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan yaitu BBPOM di Palembang, BBPOM di Yogyakarta, BPOM di Ambon dan BPOM di Tangerang. Pertemuan bertujuan untuk koordinasi untuk kemudahan, keefektifan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk pelaksanaan di Palembang, Ambon dan Tangerang melibatkan ormas dan orpro sedangkan untuk Yogyakarta melibatkan Pengurus Wilayah Rabithah Ma'ahid Islamiyah NU DI. Yogyakarta sebagai tindak lanjut MoU BPOM dan RMI.

2) Pertemuan Bersama Ormas dan Organisasi Profesi

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 di Aula Batik BPOM dan dihadiri 33 orang perwakilan ormas dan organisasi profesi. Ormas ini antara lain Persaudaraan Muslimah/Salimah, Aisyiyah, Kowani, TP PKK, Wirawati Catur Panca, Dharma Wanita Persatuan, Muslimat NU, PP Fatayat NU, PP Nasyiatul Aisyiyah Gerakan Kwartir Nasional Pramuka dan Karang Taruna serta Organisasi Profesi antara lain Ikatan Apoteker Indonesia dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia.

Pada acara ini dipaparkan Kegiatan Perkuatan Lintas Sektor BPOM dengan Ormas meliputi Kader Keamanan Pangan yang akan dilaksanakan di Palembang, Ambon dan masing-masing kota sebanyak 70 orang calon Kader yang berasal dari Ormas dan Organisasi Profesi, pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan, serta kegiatan yang dapat disinergi/dikolaborasikan antara BPOM dan Ormas seperti Lomba Video Anggota Pramuka (Penegak dan Pandega), Raimuna, Karang Pamitran Bersama Pramuka, Sinergi Dasawisma Bersama TP PKK dan Webinar.

Semua ormas dan organisasi profesi mendukung pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan dan KIE keamanan pangan. Ormas menunggu surat BPOM untuk pelaksanaan kegiatan ini.

2. Advokasi Kabupaten/Kota terkait Penerbitan SPP-IRT

Asistensi Regulasi

Dalam rangka menjaga keamanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur berbagai aspek terkait pangan dan pengawasan produk kesehatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi landasan utama yang mengamanatkan hak asasi manusia terkait akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Selain itu, dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan turut memberikan panduan yang jelas terkait standar keamanan pangan, memastikan bahwa pangan yang beredar di pasaran memenuhi kriteria keamanan yang ditetapkan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah dalam mengatur urusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman di tingkat lokal. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap obat dan makanan di daerah dengan demikian menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pemantauan terhadap keamanan pangan di daerahnya masing-masing.

Selain itu adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap obat dan

makanan di Indonesia, termasuk dalam hal pengujian, distribusi, dan konsumsi obat serta makanan. Instruksi Presiden ini menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan kualitas obat dan makanan yang beredar di pasaran untuk melindungi kesehatan masyarakat, memastikan efektivitas pengawasan terhadap obat dan makanan, menjaga agar produk-produk tersebut memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan UMKM, pemerintah telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan dan program untuk mendukung pertumbuhan serta pengembangan UMKM di seluruh Indonesia. Perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi fokus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menetapkan kerangka penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang juga berlaku dalam sektor obat dan makanan. BPOM mendukung kemudahan perizinan berusaha sesuai amanah PP Nomor 5 Tahun 2021 antara lain dengan menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor Obat dan Makanan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka intervensi kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota tahun 2024, sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Regulasi/Bimtek Pre Market IRTP pada:

- a. Asistensi Regulasi/Bimtek Pre Market IRTP di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali, tanggal 14-15 Maret 2024.
- b. Asistensi Regulasi/Bimtek Pre Market IRTP di Aceh, Palembang dan Pekanbaru, tanggal 24-25 April 2024.
- c. Asistensi Regulasi/Bimtek Pre Market IRTP di Pontianak, Samarinda dan Palangkaraya, tanggal 14-15 Mei 2024.
- d. Asistensi Regulasi/ Bimtek Pre Market IRTP di Jayapura, Manokwari dan Ambon, tanggal 29-30 Mei 2024.
- e. Asistensi Regulasi/ Bimtek Pre Market IRTP di Makassar, Paludan Kendari, tanggal 27-28 Juni 2024.
- f. Asistensi Regulasi/Bimtek Pre Market IRTP di NTB, NTT dan Sofifi, tanggal 17-18 Juli 2024.
- g. Asistensi Regulasi/Monev DAKNF POM di Jawa Tengah, tanggal 8-9 Agustus 2024.

Aplikasi SPP-IRT

UMK pangan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) memegang peran strategis dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. UMK juga menggerakkan

perekonomian rakyat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Sektor makanan dan minuman menjadi penyumbang PDB industri non migas terbesar.

IRTP merupakan salah satu bagian dari UMK yang membutuhkan kemudahan perizinan, terutama terkait dengan Sertifikasi Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menindak lanjuti terbitnya Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, dimana terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait pemenuhan komitmen dan pengawasan pasca penerbitan.

Oleh karena itu, Badan POM sebagai instansi pusat yang mengeluarkan NSPK terkait dengan IRTP telah memfasilitasi proses penyelenggaraan perizinan SPP-IRT terintegrasi OSS Sejak 8 November 2021 kembali mengembangkan aplikasi untuk mengakomodir perubahan peraturan tersebut.

Semenjak diterbitkan melalui OSS RBA hingga tanggal 20 Januari 2024 atau lebih dari 3 tahun pelaksanaannya telah terbit sebanyak 468.219 SPPIRT dari 196.048 Pelaku usaha. Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak produk yang sebenarnya tidak sesuai untuk mendapatkan SPPIRT belum dicabut nomor SPPIRT-nya, baru 80.764 atau 17.24% Produk yang labelnya sudah memenuhi ketentuan, 40.158 atau 20.48% pelaku usaha telah memenuhi komitmen mengikuti PKP, dan baru 19.119 atau 9.75% pelaku usaha memenuhi komitmen CPPOB (data hasil verifikasi pada aplikasi SPPIRT).

Beberapa pengembangan aplikasi SPP-IRT yang dikembangkan pada tahun 2024 diantaranya:

- a. Mengakomodir perubahan data usaha dan data produk yang dapat diajukan oleh pelaku usaha kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- b. Fitur notifikasi kepada Pemerintah Daerah terkait pelaku usaha yang belum memenuhi komitmen lebih dari 6 bulan.
- c. Fitur notifikasi kepada pelaku usaha sebagai pengingat kewajiban pemenuhan komitmen.
- d. Fitur penyelenggaraan PKP oleh penyelenggara selain Dinas Kesehatan dan Badan POM.
- e. *Artificial Intelligence* (AI) Pengenalan Label, untuk mengenali bahwa gambar yang diupload pelaku usaha adalah memang rancangan label.
- f. Fitur untuk mengirimkan peringatan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

- g. Pengajuan Reaktivasi akun oleh Dinkes ke PTSP bagi pelaku usaha yang tadinya telah dibekukan akunnya namun telah memenuhi komitmen.
- h. Fitur munculnya informasi produk dan sarana yang bisa mendapatkan SPPIRT yang akan muncul setiap pelaku usaha akan mengajukan produk baru (Video ini tidak bisa dipercepat sehingga pelaku usaha baru bisa melanjutkan pengajuannya setelah mendapatkan edukasi terkait SPP-IRT).
- i. Reset Pencabutan oleh PTSP (Apabila terjadi kesalahan dalam proses pencabutan SPP-IRT).
- j. Filter pencarian pada menu rekap data IRTP dan Rekap data SPPIRT untuk mempermudah pengolahan data.
- k. Dengan adanya fitur terbaru yang dikembangkannya tersebut diharapkan akan dapat membantu bapak ibu pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan pemenuhan komitmen dan pengawasan terhadap SPPIRT.

3. Penghargaan Kab/Kota Pangan Aman

Sesuai dengan amanat UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keamanan Pangan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem Pangan. Penyelenggaraan Keamanan Pangan bertujuan agar negara dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi Pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya. Untuk menjamin Pangan yang tersedia aman dikonsumsi maka penyelenggaraan Keamanan Pangan harus diterapkan di sepanjang Rantai Pangan, mulai dari tahap produksi (budidaya), pemanenan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, peredaran hingga sampai di tangan konsumen. Kegiatan atau proses produksi untuk menghasilkan Pangan yang aman dikonsumsi di sepanjang Rantai Pangan dilakukan melalui penerapan persyaratan Keamanan Pangan.

Sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif di bidang Keamanan Pangan terdapat dalam bentuk Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyelenggarakan Keamanan Pangan yang terpadu sepanjang Rantai Pangan, berbasis analisis risiko, transparansi, ketertelusuran produk, harmonisasi standar, pertanggungjawaban, keterpaduan antar otoritas kompeten termasuk dengan pemerintah daerah, konsisten, dan tidak berpihak. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan keamanan pangan terdapat dalam urusan

Kesehatan dan Pangan. Keberhasilan penyelenggaraan keamanan pangan ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan keamanan pangan di daerah melalui integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan antara pusat dengan daerah, serta koordinasi dengan seluruh pelaku keamanan pangan termasuk masyarakat dan pelaku usaha.

Sejalan dengan tugas yang diamanatkan kepada Badan POM sebagai lembaga Pemerintah yang mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di Indonesia, sangat penting untuk melakukan langkah strategis dan upaya nyata guna mewujudkan keamanan pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mendukung aspek Kesehatan. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, Badan POM memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota, yang menunjukkan prestasi dalam pembangunan daerahnya terutama terkait pelaksanaan dan penjaminan keamanan pangan. Prestasi ini ditandai dengan tersusunnya dokumen perencanaan, pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan serta mampu berinovasi dalam upaya peningkatan keamanan pangan mencapai sasaran pembangunan yang telah direncanakan. Apresiasi Badan POM kepada pemerintah daerah terbaik ditunjukkan dengan Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan reuiu *tools* penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman dan juga diselenggarakan penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Selain itu telah diberikan penghargaan kepada 3 (Kabupaten/Kota) regional barat dan 3 (tiga) Kabupaten/Kota regional timur sebagai Kabupaten/Kota terbaik dalam penyelenggaraan keamanan pangan yaitu

Terbaik Regional Barat

1. Pemerintah Daerah Kota Depok
2. Pemerintah Daerah Kota Metro
3. Pemerintah Daerah Kota Surakarta

Terbaik Regional Tengah dan Timur

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
2. Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan



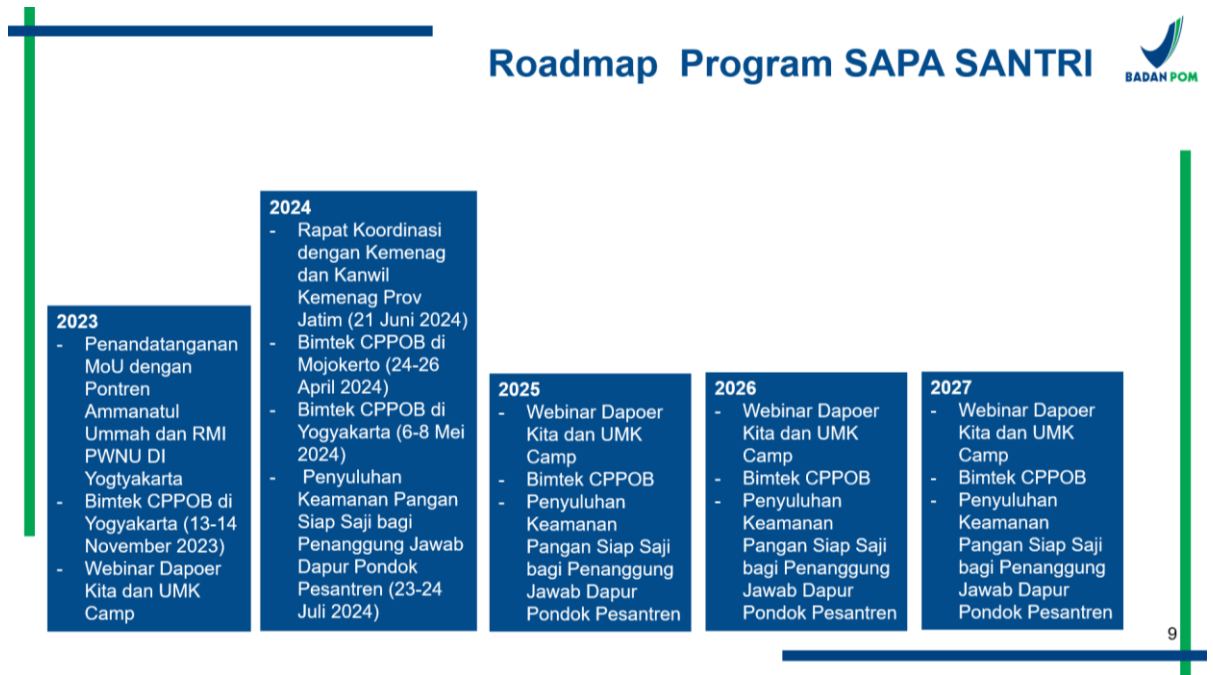
Gambar 43. Penyerahan Piagam Terbaik I Kabupaten/Kota Pangan Aman Regional Barat oleh Kepala Badan POM RI



Gambar 44. Pengumuman Kabupaten Badung sebagai Terbaik I Kabupaten/Kota Pangan Aman Regional Tengah dan Timur

4. Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMK Pangan Olahan

Dalam rangka menindaklanjuti MoU antara BPOM, Pondok Pesantren dan Bupati Kabupaten Mojokerto yang telah dilaksanakan tanggal 2 November 2023 di Kota Mojokerto, telah disusun *road map* program pembinaan di lingkungan Pondok Pesantren melalui program SAPA SANTRI-SANTRIPRENEURSHIP. Pada tanggal 24 Juli 2024 juga diadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Agama RI dan lintas sektor terkait Pembinaan ke Pondok Pesantren di Jawa Timur.



Gambar 45. Roadmap Program SAPA SANTRI

5. Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan

Dalam rangka mendukung pemberdayaan UMK pangan olahan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan POM bersama Kementerian/Lembaga/Industri adalah melalui penyelenggaraan Program Orang Tua Angkat (OTA) UMK Pangan Olahan.

Tujuan diselenggarakannya program ini adalah

- Meningkatkan aksesibilitas UMK pangan olahan dalam menghadapi masalah dan tantangan penyediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.
- Meningkatkan kapasitas, daya saing dan kemandirian UMK pangan olahan.
- Meningkatkan komitmen pelaku Industri Pangan Olahan dan *crowdfunding* dalam pembinaan kepada UMK Pangan Olahan melalui mekanisme CSR.

Sesuai dengan *roadmap*, pada tahun 2024 telah bergabung 26 industri pangan olahan dan *crowdfunding* yang tergabung dalam Program Orang Tua Angkat (OTA) UMK pangan Olahan yang memberikan fasilitasi kepada UMK pangan olahan, baik dalam bentuk edukasi dan pendampingan maupun dalam bentuk bantuan sarana produksi. Jumlah ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu 25 OTA UMK Pangan Olahan.

Roadmap Program OTA



Gambar 46. Roadmap Program Orang Tua Angkat (OTA)

SASARAN KEGIATAN 6	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Makanan
Indikator Kinerja Utama 1	Jumlah Kader yang Memahami Prinsip Keamanan Pangan

1. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan

Berdasarkan Laporan Tahunan BPOM 2023, KLB Keracunan Pangan tahun 2023 disebabkan oleh masakan rumah tangga, jajanan, pangan MD, ML, pangan industri rumah tangga, pangan industri rumah tangga tidak terdaftar serta pangan yang diproduksi di restoran. Masakan rumah tangga selama periode tahun 2019-2023 selalu menjadi sumber pangan tertinggi penyebab KLB Keracunan Pangan, dan tahun 2023 meningkat secara signifikan dari tahun 2022. Trend 5 tahun terakhir masakan rumah tangga sebagai penyebab KLB sebesar 49,30% (2019), 49% (2020), 52% (2021), 34,72% (2022) dan 53,28% (2023).

Tingginya KLB Keracunan Pangan pada pangan hasil masakan rumah tangga mengindikasikan masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat umum mengenai penerapan prinsip higiene sanitasi pangan mulai dari pemilihan bahan pangan sampai penyajian pangan. Khususnya mengenai cara pengolahan dan penyimpanan pangan yang baik, sehingga pangan aman saat dikonsumsi.

Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus keracunan pangan perlu terus ditingkatkan terutama di tingkat perorangan melalui sosialisasi keamanan pangan bagi masing – masing individu sehingga mereka dapat selektif dalam memilih pangan aman untuk dikonsumsi. Untuk dapat meningkatkan pemahaman individu terhadap konsep keamanan pangan perlu dilakukan sosialisasi keamanan pangan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu aktivitas refleksi, proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (Simon, 1993). Sosialisasi keamanan pangan kepada masing-masing individu merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis community knowledge. Agar sosialisasi keamanan pangan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan komunitas sosial dan kemasyarakatan seperti Salimah, Aisyiyah, BKOW, PKK, Wirawati Catur Panca, Dharma Wanita Persatuan, Muslimat NU, PP Fatayat NU, PP Nasyiatul Aisyiyah dan Gerakan Kwartir Nasional Pramuka serta organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Yogyakarta dan juga untuk prinsip keadilan, bekerja sama dengan komunitas sosial dan kemasyarakatan lainnya meskipun tanpa adanya MoU, maka akan dicetak Kader Keamanan Pangan Nasional. Kader Keamanan Pangan yang akan dibentuk ini juga melibatkan Karang Taruna, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Wanita Katolik Republik Indonesia, Wanita Buddhis Indonesia, Gereja Protestan Maluku dan Perempuan Indonesia Maju.

Pembentukan kader keamanan pangan dari anggota komunitas sosial dan kemasyarakatan tersebut melalui tahapan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan. Tujuan pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan kader keamanan pangan terhadap prinsip keamanan pangan;
2. Meningkatkan keterampilan kader keamanan pangan terkait Teknik pembuatan konten dan memanfaatkan media sosial (pembuatan video, pembuatan infografis, manajemen media sosial);
3. Meningkatkan kemampuan kader keamanan pangan dalam melaksanakan dan melaporkan KIE keamanan pangan.

Pada tahun 2024, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan dilaksanakan di 4 Kota, yaitu Yogyakarta, Ambon, Tangerang dan Palembang dengan swakelola. Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial untuk KIE Keamanan Pangan pada saat bimtek kader keamanan pangan di 4 wilayah yang semula menggunakan jasa pihak ketiga yang kompeten terhadap materi tersebut, tahun ini menggunakan Narasumber internal karena sudah tersedia SDM yang

kompeten. Dan ditambahkan dengan materi *Facilitator Skill* dari Narasumber eksternal. Fasilitator untuk mendampingi setiap kelompok melaksanakan simulasi dan praktik. Peserta lulus Bimtek Kader KP jika nilai *post test* lebih dari 80.00. Pembahasan Monitoring dan Evaluasi di hotel untuk membahas hasil kegiatan bimtek Kader Keamanan Pangan bersama ormas. Hasil pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan sebagaimana pada Tabel 21 berikut:

Tabel 21. Hasil pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Tahun 2024

No	Tempat	Tanggal	Jumlah	Rata-Rata Pre Test	Rata-Rata Post Test	Delta	Kepuasan Pelanggan
1	Hotel Sahid Yogyakarta (sinergi Sapa Santri)	7-8 Maret 2024	68	86,81	91,37	4,56	93,00%
2	Hotel Santika, Ambon	2-3 Mei 2024	70	87,38	94,30	7,10	98,90%
3	Hotel Grand Zuri, BSD City, Tangerang	21-22 Mei 2024	58	86,22	89,67	3,44	98,18%
4	Hotel Salatin, Palembang	28-29 Mei 2024	81	85,23	93,21	7,98	97,58
	Total		277				

Bimtek ini diselenggarakan oleh Direktorat PMPU PO bekerja sama dengan BB/BPOM setempat. Semua peserta bimtek dibekali Kit Kader Keamanan Pangan sebagai alat peraga yang akan membantu dalam melakukan bimtek ke komunitasnya. Kit tersebut terdiri dari:

- a. Flipchart kecil untuk Kader Keamanan Pangan Nasional
- b. Leaflet BPOM Mobile dan 5 Kunci Keamanan Pangan
- c. Notebook dan pulpen
- d. Flashdisk yang berisi materi bimtek
- e. Tas jinjing BPOM

Materi yang disampaikan menyesuaikan SKKNI Keamanan Pangan, yaitu seperti tampak pada Tabel 22 berikut:

Tabel 22. Materi Bimtek Kader Keamanan Pangan berdasarkan SKKNI Keamanan Pangan

NO	UNIT KOMPETENSI	MATERI
1	Melakukan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan dan atau Sosialisasi Keamanan Pangan	Kebijakan Keamanan Pangan
		5 Kunci Keamanan Pangan Keluarga
		Juknis Bimtek Kader Keamanan Pangan
		<i>Micro teaching</i> dan praktek melakukan sosialisasi KP
2	Mengidentifikasi Penandaan/Label Pangan Olahan	Cek KLIK
3	Menggunakan Aplikasi Pelaporan Pangan Olahan	Aplikasi Keamanan Pangan (praktek)
4	Tambahan	Pengenalan BB/Balai POM

NO	UNIT KOMPETENSI	MATERI
		Desain Konten Media Sosial (infografis) dengan menggunakan smartphone dan video (materi dan praktek) <i>Facilitation Skill</i>

Target persentase kader yang berpartisipasi tahun 2024 adalah 99,20% dan hasil capaiannya sebesar 99,58%, artinya sudah melebihi target.



Gambar 47. Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Tahun 2024

Bimtek Kader Keamanan Pangan dilaksanakan mendukung Pengarustamaan Gender dengan evaluasi sebagai berikut:

- a. Kader Keamanan Pangan yang dibentuk tahun 2024 terdiri dari 24,9% Laki-laki dan 75,1% Perempuan sehingga dapat disimpulkan sudah melebihi target (12% partisipasi peserta laki-laki).
- b. Tahun 2024 juga sudah melibatkan Ormas Kepemudaan, Ormas Agama lain, Organisasi Olahraga, dan Organisasi Disabilitas dan Kelompok Rentan tetapi partisipasinya belum maksimal.
- c. Penetapan lokus Indonesia Timur (Kota Ambon) dapat dilakukan tetapi terbatas karena berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Metode Bimtek dan KIE Online belum dapat dipastikan efektifitasnya karena peserta dari wilayah tersebut sering mengalami kendala akses internet.
- d. Kajian peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat berdasarkan lokus, jenis kelamin, kelompok umur, dan organisasi sedang dilakukan bersama dengan mahasiswa magang skripsi dari IPB University dan akan berlanjut di Tahun 2025.
- e. Data terpilah kader dan sasaran sosialisasi keamanan pangan sudah dibuat Database manual dalam bentuk *Gdrive (Google sheet)* dengan pengolahan manual. Penyusunan sistem database Kader KP telah diusulkan tetapi alokasi anggaran dialihkan untuk kegiatan prioritas lainnya.

Rencana tindak lanjut untuk mengatasi kesenjangan tersebut diantaranya adalah

- a. Peningkatan partisipasi kelompok rentan/disabilitas, organisasi kepemudaan, dan Organisasi Lintas Agama khususnya untuk WHDI, Nisyiren Shoshu, dan PERKHIN melalui advokasi kepada narahubung Organisasi, serta penunjukan narahubung khusus terkait kegiatan pemberdayaan di bidang keamanan pangan.
- b. Melanjutkan kajian efektivitas pembentukan kader keamanan pangan melibatkan mahasiswa magang, dan peserta Pelatihan KTI.
- c. Pengayaan metode Bimtek dan KIE secara hybrid: peserta luring di UPT, petugas pusat hadir serta melalui pengembangan e-learning Kader Keamanan Pangan.
- d. Pengembangan sistem database dan pelaporan kader.

2. Sinergi Peningkatan Kapasitas Komunitas Melalui Sinergi Dasa Wisma Engagement

Perluasan Kader Keamanan Pangan yang berasal dari Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan Agama melalui sinergi dasa wisma *engagement*. Kader KP khusus berasal dari Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota dengan target sampai Dasa Wisma. Tahun 2024, Sinergi Peningkatan

Kapasitas Komunitas Melalui Dasa Wisma *Engagement* dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul dan Klaten.

Tabel 23. Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan melalui Sinergi Dasa Wisma *Engagement* Tahun 2024

Tanggal	Tempat	Jumlah Kader Terlatih	Jumlah Lulus	Nilai Rata-rata Post Test	Kepuasan Pelanggan
6 Mei 2024	Bege Homestay Wonosari	52 orang	52 orang (100%)	93,64	88,21
6 Mei 2024	Hotel Grand Cokro Klaten	56 orang	56 orang (100%)	94,50	95,72

Peserta adalah Pengurus dan anggota TP PPK perwakilan kecamatan. Materi yang disampaikan pada saat Bimtek Kader adalah Kebijakan Keamanan Pangan, 5 Kunci Keamanan Pangan, Cek KLIK, Aplikasi Keamanan Pangan, Juknis Kader Keamanan Pangan dan Praktek Micro Teaching. Narasumber Bimtek adalah pegawai Dit. PMPUPO dan UPT. Kader KP yang lulus selanjutnya memberikan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) ke masyarakat baik secara tatap muka maupun melalui media sosial yang dimiliki. Untuk tatap muka diharapkan sampai tingkat dasa wisma dan jika melalui media sosial minimal 5 kali.



Gambar 48. Bimtek Kader KP Kegiatan Sinergi Peningkatan Kapasitas Komunitas Melalui Dasa Wisma *Engagement*

Tabel 24. Jumlah Kader Keamanan Pangan dan Masyarakat Teredukasi melalui Sinergi Dasa Wisma *Engagement* Tahun 2024

No	Kota/Kab	Kader KP	Kader KP Aktif	Masyarakat Teredukasi KIE Langsung	Masyarakat Teredukasi Melalui Media Sosial
1	Gunungkidul	52	42	3.098	196
2	Klaten	56	56	5.553	164
	Jumlah	108	98	7.651	360

Dari kegiatan ini memperluas jangkauan masyarakat yang teredukasi, karena TP PKK mempunyai jejaring sampai tingkat dasa wisma.

3. Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Pramuka

Saka POM telah disahkan pada Munas Pramuka tanggal 4 Desember 2023 di Banda Aceh. Saka POM ini ada 3 Krida yaitu Krida Pengujian Obat dan Makanan, Krida Pemantauan Obat dan Makanan dan Krida Informasi Obat dan Makanan. Tahun 2024, dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Anggota Pramuka yang dilakukan secara Hybrid untuk wilayah Barat (luring di Aceh), wilayah Tengah (luring di NTB) dan Timur (luring di Gorontalo). Peserta yang mengikuti sosialisasi ini adalah perwakilan dari Kwardcab yang terlibat dalam Saka POM.

Sebelum pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan pembahasan materi untuk semua krida yang melibatkan Unit Pusat yang mengkoordinir masing-masing Krida seperti P3OMN, PPSDM, Dit. PMPUOTSK, Dit. KMEI, Dit Pengawasan Peredaran Pangan, dll.



Gambar 49. Dokumentasi Sosialisasi bersama Anggota Pramuka di Banda Aceh

Tabel 25. Rincian Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Pramuka

Tanggal	Tempat	Peserta
20 September 2024	Hotel Lombok Astoria, Kota Mataram	83 orang (35 luring, 48 daring)
21 Oktober 2024	Hotel Pade Aceh	luring 39 orang dan daring
21 November 2024	Fox Hotel Gorontalo	166 orang (35 luring, 131 daring)

4. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan dan Krida Saka POM

Pada Kamis, 21 November 2024, telah digelar sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan dan Krida Saka POM wilayah Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua secara *hybrid*. Kegiatan luring digelar di Fox Hotel Gorontalo dan daring melalui *zoom meeting* diikuti oleh 166 peserta, dimana 35 peserta luring berasal dari Kwarda Gerakan Pramuka Gorontalo, Majelis Pembimbing Saka POM Tingkat Gorontalo, Pimpinan Saka POM Tingkat Kota Gorontalo, serta Saka POM yang sudah terbentuk di wilayah kerja BPOM di Gorontalo. Sebanyak 131 orang peserta mengikuti kegiatan via daring (*zoom meeting*) yang berasal dari Saka POM di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sosialisasi dibuka oleh Ketua Pimpinan Saka POM (Pin Saka POM), dilanjutkan dengan Informasi Saka POM di Gorontalo dari Ketua Majelis Pembimbing Saka POM Tingkat Gorontalo, diteruskan dengan penyampaian Dukungan Saka POM dari Kwartir Daerah Provinsi Gorontalo, seterusnya pemaparan Petunjuk Pelaksanaan Saka POM oleh Ketua Pin Saka POM tingkat Nasional dan paparan Krida Saka POM oleh Kak Dyah Sulistyorini dari Pinsaka POM Nasional. Kegiatan ditutup dengan diskusi dan tanya jawab.



Gambar 50. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan dan Krida Saka POM

Dalam pembukaan sosialisasi ditegaskan bahwa selaras dengan arahan Kwartir Nasional untuk penyusunan *Job Creation* maka sedang dibahas mengenai kurikulum dan materi yang mengacu pada SKKNI Bidang Keamanan Pangan untuk pengembangan kompetensi Saka POM level 3 untuk Penegak hingga level 4 untuk Pandega sehingga nantinya anggota Saka POM memiliki portofolio untuk menjadi *entrepreneur* ataupun membuka lapangan kerja mandiri. Untuk mendukung *Job Creation* maka diperlukan *Mobile Pangkalan* yang lokasinya bisa saja di IRTP untuk memperoleh pengalaman nyata sebagai UMKM. Untuk pelatihan dapat menggunakan materi yang sudah disusun sebelumnya.

Dari sosialisasi juga disampaikan bahwa Saka POM di Gorontalo sangat aktif dan telah melaksanakan rekrutmen anggota sebanyak 4 generasi. Implementasi Krida Saka POM diantaranya Saka POM Sebaya (Edukasi Teman Sebaya), Sampling dan Pengujian Takjil bulan Ramadhan, Keterlibatan anggota Saka POM pada program Germas SAPA (Desa Pangan Aman, Sekolah dengan PJAS Aman, PPABK), Pembuatan materi KIE / konten digital Keamanan Obat dan Makanan oleh anggota Saka POM. Saka POM Gorontalo juga aktif mengikuti kegiatan yang dilaksanakan Kwarda Gorontalo termasuk terlibat dalam persiapan pelaksanaan Perkemahan Antar Saka (Peran Saka) Nasional di Provinsi Gorontalo tahun 2025.

Sebelum sesi penutup maka dilaksanakan tanya jawab interaktif guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman, pandangan dalam menghadapi persoalan pangan yang aman dan gizi selama bulan puasa. Peserta sangat antusias dengan materi edukasi, hal ini terlihat pada sesi tanya jawab interaktif, peserta banyak mengajukan pertanyaan. Pada akhir kegiatan ditutup dengan penyampaian kesimpulan kegiatan dan pengisian survei kepuasan kegiatan.

SASARAN KEGIATAN 6	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Makanan
Indikator Kinerja Utama 2	Tingkat Efektifitas KIE Makanan

1. Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Organisasi sosial dan kemasyarakatan/ orsosmas mempunyai jumlah anggota dan jejaring yang luas, sehingga merupakan target upaya mencerdaskan konsumen agar menjadi konsumen cerdas dan berdaya. Orsosmas ini meliputi organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi maupun organisasi keagamaan dan organisasi disabilitas. Pemberdayaan melalui jalur orsosmas lebih efektif dan efisien dari pada kepada satu persatu individu. Upaya memberdayakan ini melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi, salah satunya melalui webinar Paman Kece Series yang dilaksanakan sebanyak 12 Seri pada tahun 2024 (setiap bulan 1 kali) seperti terlihat pada Tabel 26 dan Gambar 51.

Tabel 26. Pelaksanaan Webinar Keamanan Pangan Untuk Konsumen Cerdas (Paman KeCe)

Seri	Tema dan Tanggal	Narasumber dan materi	Jumlah Peserta			Rerata Pretest	Rerata PostTest	Skor Kepuasan Pelanggan
			Zoom	YouTube	Total			
1	Pangan Aman untuk yang tersayang/ 28 Feb 2024	1. Dir PMPUPO - Kebijakan Keamanan Pangan 2. Tien Hindasah: Pangan Aman dari Keluarga	249	253	502	78.49	90.21	96,97%
2	Ramadhan 1445 H: Jaga Makananmu, Raih Pahalamu./ 14 Maret 2024	1. Dyah Sulistyorini: Yuk Siapkan PAS (Pangan Aman Sehat) selama Ramadhan 2. Mifta N - Ahli Gizi: Kenali Menu Pangan Aman Sehat (PAS) yang Berkesan	164	168	332		87.01	98,21%
3	Cegah Timbangan Ke Kanan Selama Lebaran dengan Tangkis GGL/ 5 April 2024	1. Ima Ananda: Mempersiapkan Pangan Hari Raya dan Parsel yang Aman dan Memenuhi Nilai Gizi 2. Noni Futri-Kader KP: Tips Mengelola Makanan Lebaran dan Mengolah Makanan Sisa Hari Raya: :			210	65.1	83.4	99.48%
4	Yuk sadar pangan aman, bermutu dan bergizi, Ibadah Haji lancar, Bangkit makin baik/ 28 Mei 2024	1. Dra. Dyah Sulistyorini, Apt., MSc - Dit. PMPUPO: Mari Terapkan 5 Kunci Keamanan Pangan Keluarga 2. Salsabila N - SPO: Ayo Baca Label, ING dan GGL dengan Benar dan Seksama	202	258	460	79,54	91,09	96%
5	Bangkit Makin Baik dengan Konsumsi Pangan Aman, Bermutu dan Bergizi Saat Idul Adha/13 Juni	1. Indriemayatie Asri: 5 Kunci Keamanan Pangan Menangani Daging Kurban 2. drh. Boethdy Angkasa, M.Si Kementan:			225		76.84	98.51%

Seri	Tema dan Tanggal	Narasumber dan materi	Jumlah Peserta			Rerata Pretest	Rerata PostTest	Skor Kepuasan Pelanggan
			Zoom	YouTube	Total			
	2024	Pengawasan Hewan dan Pengelolaan Daging Kurban						
6	Mengatasi Stunting dengan Pangan Aman: Langkah Praktis untuk Masa Depan Anak/ 18 Juli 2024	1. Ratna Wulandari, SF., Apt, MSc: Tips Menyediakan Pangan Aman untuk Anak 2. Dr. Amurwani KPPA: Upaya Bersama Untuk Anak Merdeka dari Stunting	250	577	827	61,65	87,01	98,21%.
7	Kolaborasi BPOM dan Pramuka Menjaga NKRI melalui Pangan Aman, Bermutu dan Bergizi/ 13 Agustus 2024	1. Ratna Wulandari: SAKA POM Berdaya, Negara Berjaya 2. Bayu-Anggota Saka POM Terbaik 2024: "Success Story sebagai anggota Saka POM terbaik dan perannya sebagai Kader Keamanan Pangan".			242	82.71	88.42	95.78%
8	Merdeka Mengonsumsi Pangan Aman dan Bermutu Menuju Nusantara Baru Indonesia Maju/ 28 Agustus 2024	1. Dilaekha Ryan P, S.Si: "Tips Merdeka Konsumsi Pangan Aman dan Bermutu" 2. Salsabila Nadien, S.Gz: "Konsumsi Pangan Bergizi untuk Masa Depan yang Lebih Baik"	161	143	304		94	96,7%6
9	Cintai Keluarga dengan Pangan Aman : Kunci Jantung Sehat dan Tubuh Bugar/ 19 Sept 2024	1. Dir. PMPUPO: Sayangi jantungmu dengan konsumsi pangan aman 2. DR. Dr. Eka Ginanjar, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP, FICA, MARS : Gaya Hidup Sehat untuk Jantung Sehat	174	187	361	87,37	93,45	99,72%

Seri	Tema dan Tanggal	Narasumber dan materi	Jumlah Peserta			Rerata Pretest	Rerata PostTest	Skor Kepuasan Pelanggan
			Zoom	YouTube	Total			
10	Menjadi "Food Hero" untuk Dirimu dan Keluarga : Hak atas Pangan yang Aman untuk Kehidupan dan Masa Depan Lebih Baik/ 16 Oktober 2024	1. Pdt. Yohana Maitimu "Food Hero Can Be Anyone " 2. Ima Ananda, PFM Muda-Dit. PMPUPO "5 Kunci Keamanan Pangan Keluarga, Cek KLIK, Baca Label dan ING"	223	204	427	83	95	95,91%
11	Lesson Learned Kasus KLB Latiao: Perkuat Literasi Keamanan Pangan untuk Jadi Konsumen Cerdas/ 19 Nov 2024	1. Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME, Direktur PMPUPO: "Pengawasan Pangan Olahan Pada Kasus KLB Latiao: Penyebab, Sampling, Pengujian, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan" 2. Fitrianna Cahyaningrum, M.Gizi, PFM Ahli Madya, Direktorat WasDar PO: "Kiat Memilih, Membeli, dan Mengonsumsi Pangan Aman dengan Cek KLIK, Baca Label, dan Informasi Nilai Gizi (ING)"	584	242	826	89	96	98,03%
12	Perempuan Berdaya, Pangan Aman: Pondasi Kuat untuk Indonesia Bebas Stunting/ 19 Des 2024	1. Cita Lustriane, STP., M.Si -PFM Ahli Madya Dit. PMPUPO: Tips BPOM dalam mencegah stunting. 2. Sri Astuti Handayani, S.Psi - TP-PKK Provinsi NTB:Peran Kader Keamanan Pangan Berkolaborasi dalam Penurunan Stunting	169	229	398	73	89	98.24%



Gambar 51. Dokumentasi Webinar Paman KeCe Seri 1 Tahun 2024

Jumlah peserta Webinar Paman KeCe bervariasi pada seri serinya yaitu antara 200-800an orang. Hal ini dipengaruhi oleh minat peserta terhadap tema webinar. Promosi dan akses untuk mengikuti webinar terbuka untuk umum dipromosikan baik melalui narahubung organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, media sosial, *whatsApp group*, maupun mulut ke mulut. Proporsi peserta berdasarkan jenis kelamin adalah 30.23% laki-laki dan 69.77% perempuan.

Selain melalui webinar, telah dilaksanakan juga Sapa Budaya, BPOM akan memanfaatkan seni budaya dan permainan tradisional untuk pemberian KIE kepada masyarakat dan telah dicanangkan oleh ibu Plt. Kepala BPOM tanggal 20 Juni 2024 di Gedung Merah Putih BPOM bersamaan dengan pagelaran kethoprak “Bulak Perak Ondo Mas” yang berisi edukasi keamanan pangan dengan pemain pejabat BPOM dan perwakilan stakeholder dan telah dilaksanakan FGD mengundang lintas sektor yang terkait pemanfaatan budaya untuk edukasi dengan narasumber dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Budaya dan Dit. PMPUPO tanggal 2 Desember 2024 dan dihadiri oleh Kemenko PMK, Kemendagri, Kemen Kebudayaan, Kemenparekraf) dan perkumpulan/komunitas praktisi kebudayaan (Komite Seni Budaya Nusantara, Dewan Kesenian Jakarta, Komunitas Budaya Antarshukha, wayang Orang Bharata, Ruang Budaya Sumatra, Komunitas Kesenian Bali).



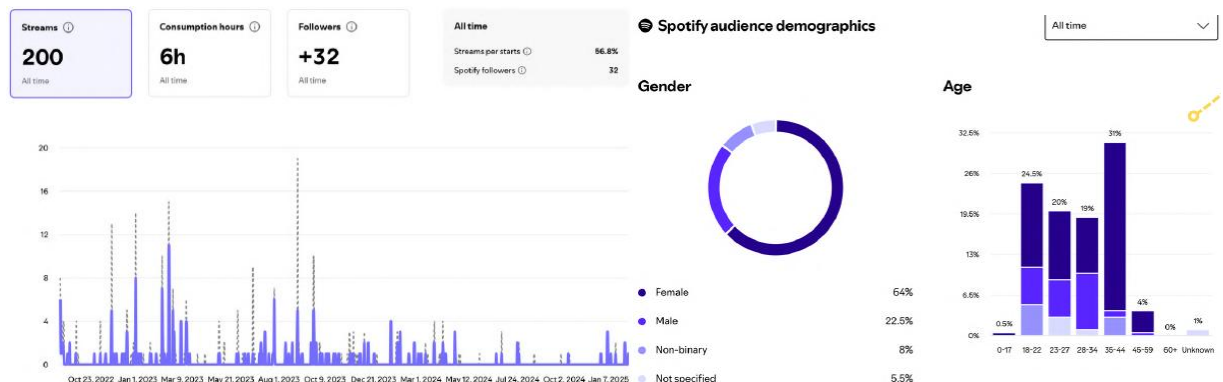
Gambar 52. Pagelaran Ketoprak dan Pencanangan Seni Budaya dan Permainan Tradisional sebagai Media Edukasi Obat dan Makanan

Selain itu dilaksanakan Forum Harmoni Budaya Nasional (FHBN) tanggal 5-7 September 2024 bekerja sama dengan Kemenko PMK dan Pemerintah Daerah Panaser Pajem Utara. Pada acara FHBN memberikan edukasi baik kepada konsumen maupun kepada produsen. Dit PMPUPO menerima penghargaan dari Kemenko PMK atas keikutsertaan pada kegiatan ini.

2. Podcast Keamanan Pangan

Dalam era digital yang semakin berkembang, podcast telah menjadi salah satu media komunikasi yang efektif untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat, terutama mereka yang lebih menyukai konten auditori dan visual. *Podcast* tidak hanya menawarkan fleksibilitas dalam mengonsumsi informasi, tetapi juga memungkinkan pendengar untuk menyerap pesan secara mendalam sambil melakukan aktivitas lainnya. Melihat potensi ini, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha memilih *podcast* sebagai salah satu strategi utama untuk menyebarkan informasi dan membahas topik keamanan pangan.

Di tahun 2024, kehadiran *Podcast Klub Pompi* tidak sekedar menjadi konten yang memenuhi platform digital, tetapi berhasil menjadi media informasi dan penyampai pesan pentingnya menjaga keamanan pangan. Dengan jumlah 20 episode yang telah ditayangkan, podcast klub pompi menjadi konten aktif sepanjang 2024.



Gambar 53. Spotify Podcast Klub Pompi Report 2024

Dikarenakan fokus *Podcast Klub Pompei* ada di audio-visual YouTube *channel*, maka keberadaan audio *podcast* menjadi alternatif saja untuk audience menikmati informasi keamanan pangan. Namun, secara demografi audience dapat kita pelajari pendengar *podcast* di *Spotify* adalah perempuan dengan kisaran umur di generasi *millennial* dan generasi *Z*.

Total	3,771	223.1	54	Rp14,497	168,607	1.2%
Pemuda Pilar Penjaga Keamanan Pangan	155 4.1%	50 2.2%	5 9.3%	-	39340	0.3%
MAKAN SAHUR DAN BUKA YANG PAS, PUSASA PASTI S...	229 6.1%	102 4.6%	0 0.0%	Rp1,837 12.8%	20673	0.0%
Spesial Hari Ibu! Bawa Si Kecil Tugas Belajar Master ...	263 7.0%	15.6 7.0%	1 1.9%	-	18089	0.7%
MAKAN SEMBARANGAN PAS LEBARAN? GAK BAHAY...	206 5.5%	11.3 5.1%	2 3.7%	Rp1,735 12.1%	11,576	1.1%
KONSUMSI PANGAN AMAN, PUSASA PASTI NYAMAN	313 8.3%	237 11.0%	7 13.0%	Rp6,206 42.3%	10390	2.3%
Pendampingan Untuk Kesuksesan UMK	290 7.7%	21.8 9.8%	6 11.1%	Rp3,427 23.5%	8534	2.1%
Anak Sehat dengan Pangan Aman Untuk Masa Depan L...	287 7.6%	21.4 9.6%	4 7.4%	-	8199	1.7%
Food Safety 2024 Recap! Dari Isu AMDK, Kejadian Lusa...	123 3.3%	3.1 2.3%	0 0.0%	-	6481	1.1%
Mengupas Keajaiban Sorgum: Kesehatan, Pertanian, d...	235 6.2%	14.6 6.5%	3 5.6%	Rp406 2.8%	6323	1.7%
Keracunan Makanan : Risiko, Dampak dan Upaya Pence...	131 3.5%	13.0 5.8%	0 0.0%	-	5576	1.2%
Bersama Food Heroes, Raih Pangan Aman di Masa De...	177 4.7%	8.1 3.6%	1 1.9%	-	3324	1.7%
Detik Generasi Cemerlang bersama Keluarga Seder P...	190 5.0%	7.0 3.5%	10 18.5%	-	5035	1.1%
Peran Seni dan Budaya Dalam Mendukung Pangan Am...	115 3.1%	9.1 4.1%	1 1.9%	Rp430 3.0%	5013	1.3%
Sinergi Program Desa Pangan Aman, Langkah Penting ...	110 2.9%	4.3 2.0%	0 0.0%	-	3998	1.0%
KONSUMSI PANGAN JANGAN AGAL VIRAL, JADI KON...	118 3.1%	10.0 4.5%	1 1.9%	Rp415 2.9%	3337	2.2%
Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pencegahan ...	110 2.9%	5.9 2.7%	1 1.9%	-	3099	1.7%
Mengetahui Fungsi Kemasan dan Bagaimana Penogun...	103 2.8%	3.4 2.4%	0 0.0%	-	2288	3.3%
Peringati Hari Keselamatan Pangan Sedunia, Siapkan Diri...	129 3.4%	7.6 3.4%	4 7.4%	-	2039	2.6%
Cegah Keracunan Pangan di Sekolah? Engga Masalah!	193 5.1%	15.4 6.9%	8 14.8%	-	1713	2.7%

Gambar 54. YouTube Report Podcast Klub Pompei

Berdasarkan analitik data YouTube yang sudah kami dapatkan *Total View* adalah 3771 dan *impression* mencapai 168.607. *Podcast* kami telah mendapatkan 3.771 total *views*. Angka ini menunjukkan bahwa konten yang kami sajikan telah berhasil menarik perhatian sejumlah besar penonton, yang merupakan langkah awal yang baik dalam membangun audiens yang loyal. *Impressions* yang dicapai mencapai 168.607, yang mencerminkan jumlah kali *thumbnail* dan judul *podcast* kami ditampilkan kepada pengguna YouTube. Angka ini menunjukkan potensi jangkauan yang luas, meskipun belum semua *impressions* tersebut dikonversi menjadi *views*. Dengan 3.771 *views* dari 168.607 *impressions*, tingkat konversi kami masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun konten kami mendapatkan eksposur yang cukup besar, ada ruang untuk meningkatkan daya tarik *thumbnail*, judul, atau deskripsi agar lebih banyak pengguna yang tertarik untuk menonton. *Views* yang mencapai 3.771 menunjukkan bahwa konten kami sudah mulai menarik minat audiens. Namun, penting untuk meningkatkan interaksi dengan penonton melalui ajakan untuk *like*, *comment*, dan *subscribe*. Dengan hasil tersebut, *podcast* kami di YouTube telah menunjukkan potensi yang baik dalam menjangkau audiens.

3. Branding Keamanan Pangan

Badan POM memiliki peranan penting dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat. Saat ini, isu mengenai keamanan obat dan makanan selalu menarik perhatian masyarakat luas. Menyampaikan informasi keamanan pangan kepada media memerlukan strategi komunikasi risiko karena media memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik yang pada akhirnya bisa mempengaruhi tindakan publik. Strategi komunikasi risiko menjadi hal yang vital dalam kesehatan masyarakat terutama ketika terjadi masalah darurat kesehatan masyarakat misalkan kasus keracunan pangan dan isu keamanan pangan.

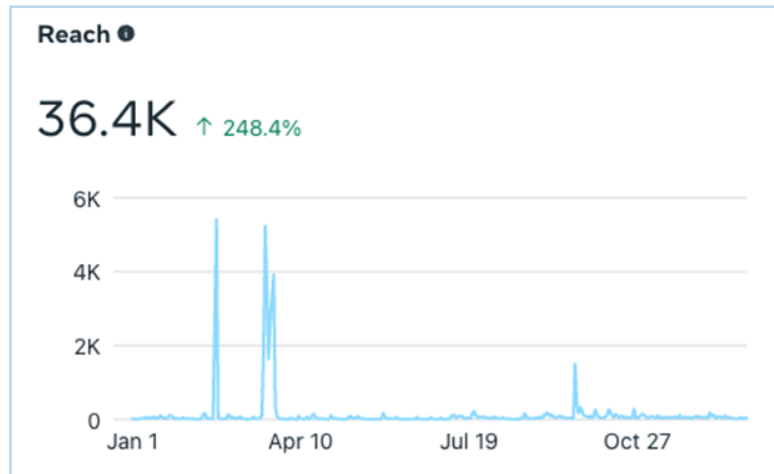
Media sosial merupakan salah satu sarana komunikasi risiko terkini saat ini yang paling cepat dan efektif dalam menyebarkan informasi sampai ke tingkat individu untuk semua kalangan. Badan POM terus melakukan pengembangan dan peningkatan aktivitas di media sosial sejalan dengan kemajuan teknologi saat ini. Selain itu juga perlu dibuat strategi kampanye keamanan pangan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Tujuan dilakukannya branding keamanan pangan ini adalah untuk:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi pangan aman.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait keamanan pangan.
3. Mensosialisasikan informasi-informasi terkait keamanan pangan.
4. Memberikan kemudahan bagi pengunjung dalam mencari informasi tentang keamanan pangan, berita terkini seputar pangan olahan, dan sajian interaktif.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha melakukan branding keamanan pangan melalui *platform* Facebook dan Instagram dengan akun klubpompi.bpom dan pmpupangan.bpom untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pelaku usaha terhadap konsumsi pangan yang aman dan bermutu.

Akun Sosial Media Klub Pompi

Pada periode 1 Januari - 31 Desember 2024 sebanyak 36.400 poin *reach* telah berhasil dibuat oleh konten KLUBPOMPI pada *Platform* Facebook. Pada periode ini, konten yang membuat poin *reach* tertinggi adalah Promosi *Podcast* & Informasi seputar Stunting. Akun Instagram klubpompi.bpom telah berhasil mengumpulkan 247,404 *views*. Hal ini berkaitan dengan konten yang diposting akun sebanyak 460 postingan (136 konten *post Instagram Feed* dan 193 *post Instagram Story*, dan 131 *Reels*).



Gambar 55. Capaian atau *Reach* Akun Facebook Klub Pompi Tahun 2024

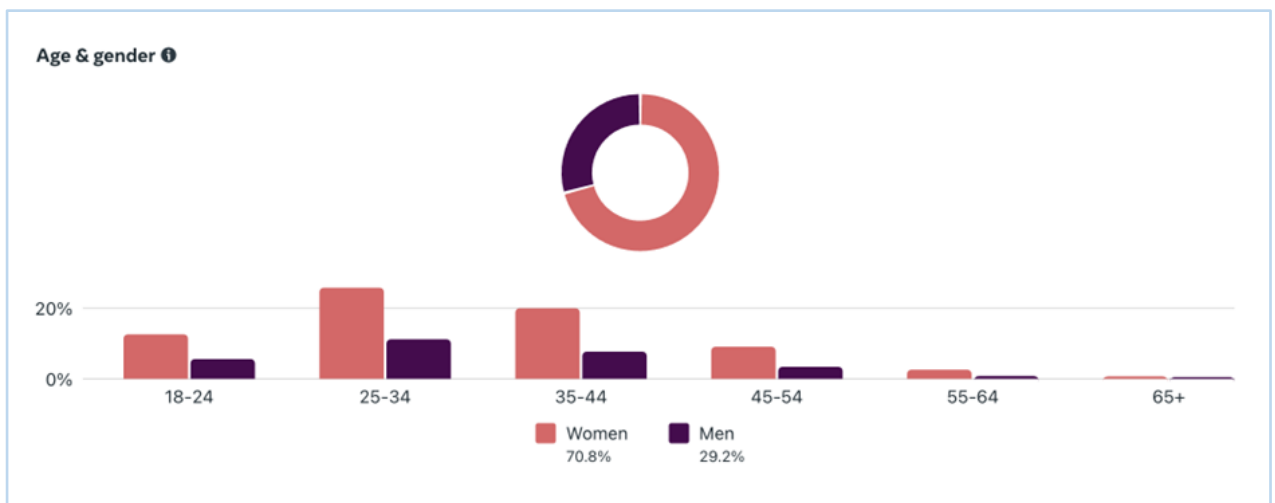


Gambar 56. Konten Promosi *Podcast* dan *Stunting*

Akun *Instagram* Klubpompi berhasil mengumpulkan 247.400 *content views* dengan 20.300 *profile visit*. Sehingga dapat disimpulkan sekitar 8% dari penikmat konten tertarik untuk meninjau lebih jauh seputar konten klubpompi. Total *Instagram Follower* KLUBPOMPI adalah 14,048 yang jika dibandingkan akun-akun sejenis lebih tinggi. Sedangkan untuk gender, mayoritas adalah perempuan (70%) dengan rata-rata melakukan interaksi terbanyak dengan sosial media pada pukul 6-8 malam.

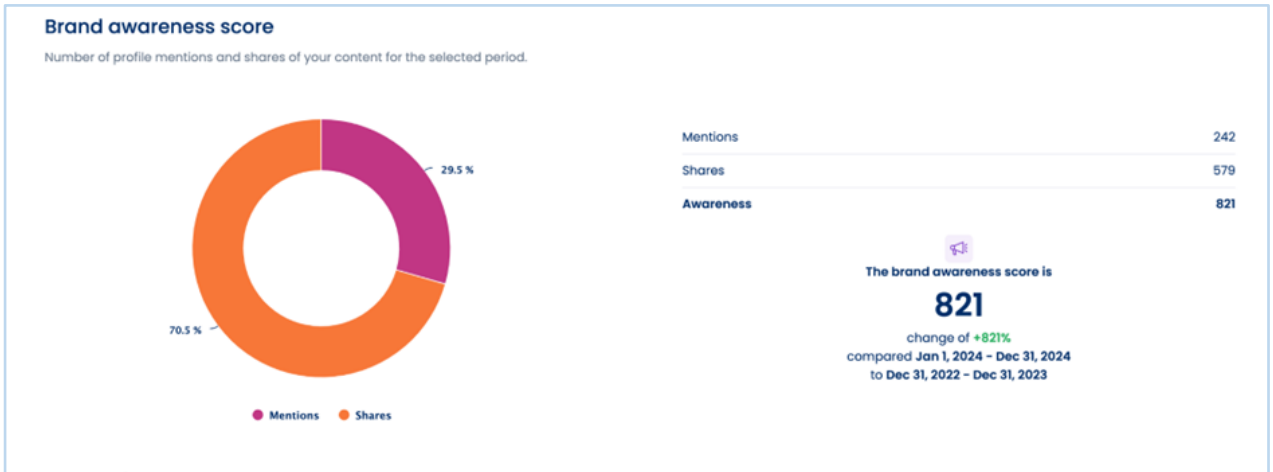


Gambar 57. Jumlah Views dan Profil Visit akun Instagram klubpomi.bpom Tahun 2024

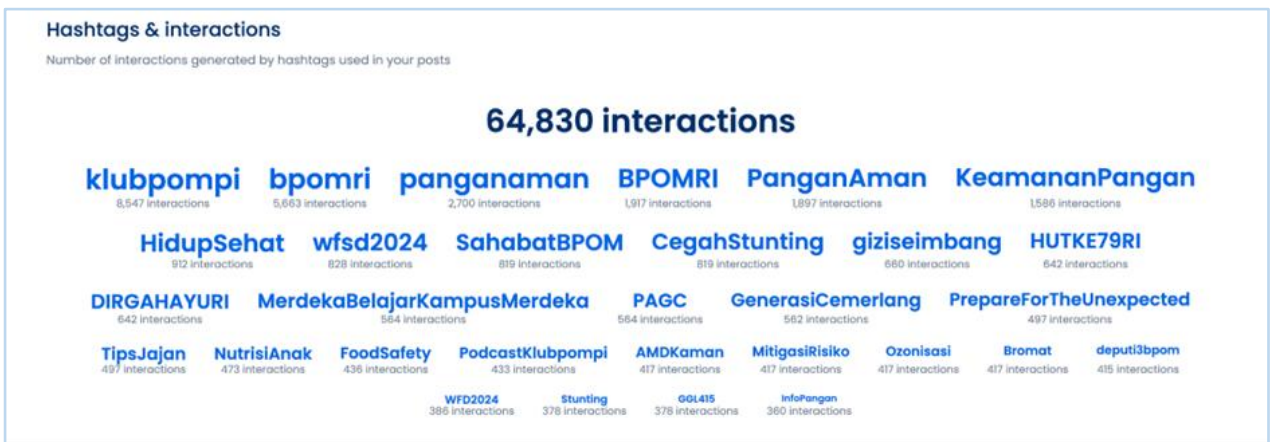


Gambar 58. Persentase Follower Instagram klubpomi.bpom dalam Gender dan Usia

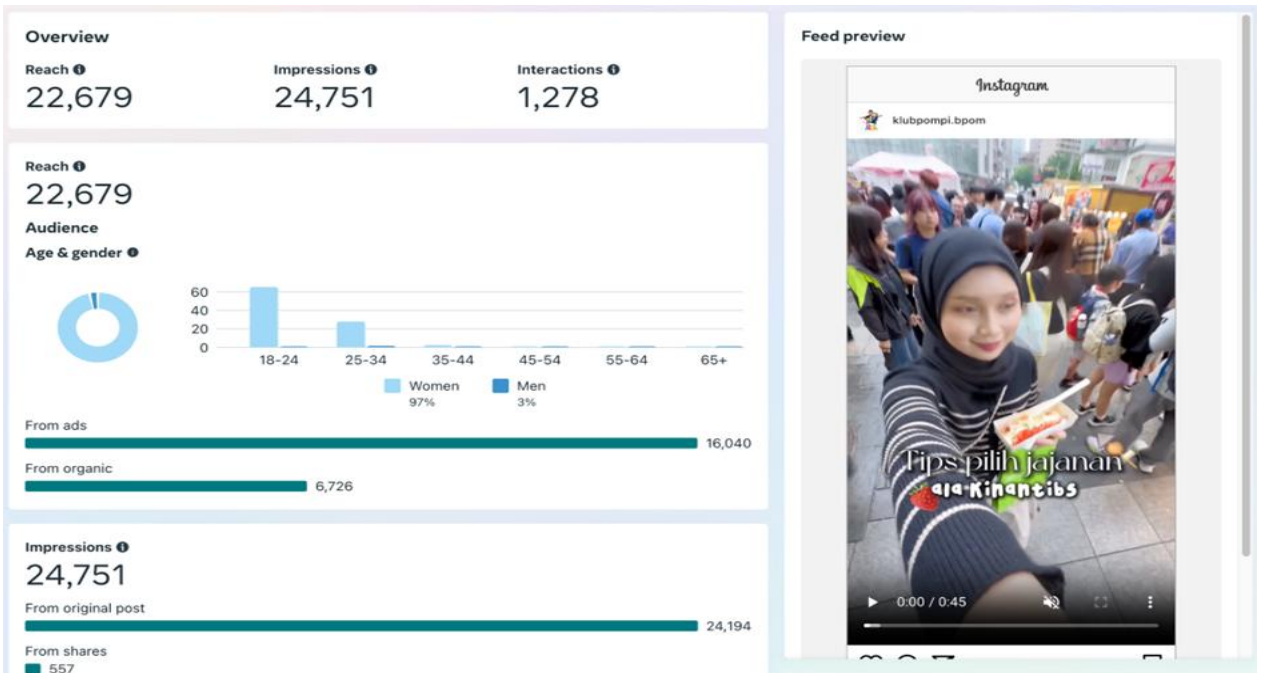
Instagram Klubpomi.bpom berhasil meraih 11,421 poin interaksi, yang berupa: 9,920 *likes*, 318 *link clicks*, 319 *comments*, 242 *mentions*, dan 622 *saves*. Untuk *Brand Awareness Score*, terkumpul sebanyak 821 poin yang terhimpun dari jumlah *mention* sebanyak 242 poin dan *shares* 579 poin. Dan untuk *keyword* yang paling sering digunakan, masih terkait dengan keamanan pangan, kesehatan, pencegahan stunting, dan gizi seimbang. Berdasarkan data, konten kolaborasi dengan *influencer* mampu mendongkrak *reach* dan *impression* klubpomi. *Reach* yang dihasilkan sebanyak 22.678 poin, dengan 24.751 *impressions*, dan 1.278 *interaction*. Walaupun jangkauan terbanyak diraih dari *Instagram Ads* (16,040 poin), namun poin yang terhimpun dari organiknya pun dapat dikatakan cukup baik.



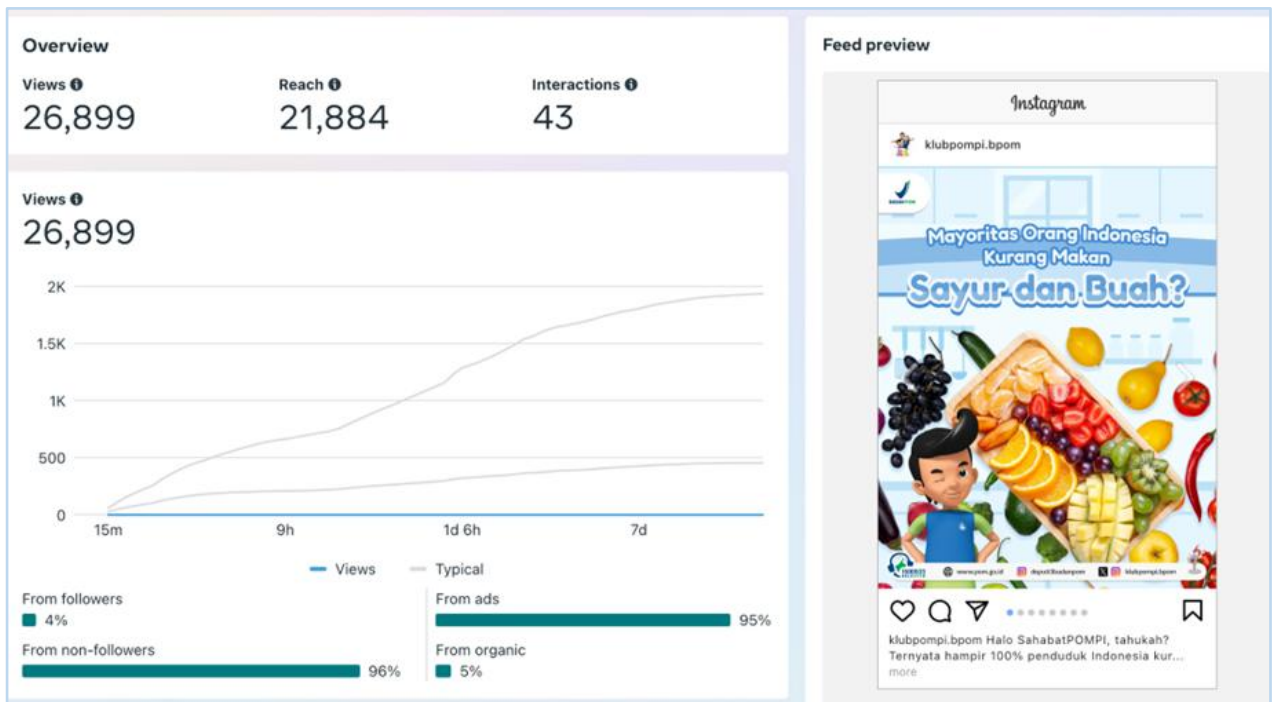
Gambar 59. Brand Awareness Score



Gambar 60. Hashtags dan jumlah Interaksi Instagram klubpompi.bpom



Gambar 61. Analisa Konten Kolaborasi Terbaik Instagram klubpompi.bpom



Gambar 62. Analisa Konten Carusel Terbaik Instagram klubpompi.bpom

Sepanjang tahun ini, kami telah mengidentifikasi bahwa konten yang membahas isu-isu hangat serta sesuai dengan preferensi audiens, seperti *tips and tricks* dan konten edukasi, mampu menarik perhatian dan meningkatkan engagement. Hal ini menunjukkan bahwa audiens kami lebih tertarik pada konten yang informatif dan bermanfaat. Pada periode mendatang, penting untuk membangun konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu menarik minat audiens secara lebih luas. Dengan demikian, pertumbuhan followers dapat lebih pesat. Kami merekomendasikan untuk mengeksplorasi konten yang lebih interaktif dan kreatif, seperti video pendek, infografis, atau konten serial yang dapat mempertahankan minat audiens dalam jangka panjang.

Jumlah konten yang dipublikasikan di *platform* Facebook mengalami peningkatan signifikan selama tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa Facebook tetap menjadi *platform* yang efektif untuk menjangkau audiens kami. Namun, perlu diperhatikan bahwa kualitas konten harus tetap dijaga agar *engagement* tidak hanya bertumpu pada kuantitas, tetapi juga pada nilai yang diberikan kepada audiens.

Reach dan *engagement* akun media sosial KLUB POMPI mengalami peningkatan yang signifikan ketika ada kegiatan yang diselenggarakan oleh BPOM, seperti bimbingan teknis, PAGC, webinar, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya bermanfaat secara langsung, tetapi juga mampu meningkatkan visibilitas dan interaksi di media sosial. Kami menyarankan agar kegiatan serupa terus diintegrasikan dengan strategi konten media sosial untuk memaksimalkan dampaknya. *Collabs post* dan *endorsement* terbukti mampu

meningkatkan jangkauan dan engagement secara signifikan. Kolaborasi dengan pihak lain, baik itu *influencer*, *brand*, atau institusi, dapat membantu memperluas audiens dan membangun kredibilitas. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk lebih sering melakukan kolaborasi dan endorsement yang relevan dengan nilai-nilai KLUB POMPI.

Untuk pengembangan ke depan, interaksi dengan pengguna perlu ditingkatkan. Membalas komentar, membuat *Instagram Story* yang interaktif, mengadakan kuis, serta melakukan *mention* dan *tag* dapat membantu membangun hubungan yang lebih erat dengan audiens. Interaksi yang aktif juga dapat meningkatkan loyalitas dan engagement jangka panjang.

Penggunaan Meta Ads telah terbukti mampu menjangkau audiens lebih banyak. Namun, konten yang disebarluaskan melalui iklan perlu dikemas dengan lebih menarik dan relevan agar dapat memaksimalkan hasil. Kami menyarankan untuk terus mengoptimalkan strategi iklan dengan melakukan A/B testing dan analisis performa secara berkala.

Akun Sosial Media Dit. PMPUPO

Akun Instagram Dit. PMPUPO berhasil menjangkau 1.342.957 orang selama satu tahun terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa konten yang dibagikan telah berhasil menarik perhatian audiens dalam skala yang besar, memperluas visibilitas dan *awareness* terhadap program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dit. PMPUPO. Terjadi 35.288 interaksi pada konten-konten yang dipublikasikan, termasuk *likes*, *saves*, *shares*, dan komentar. Tingginya angka interaksi ini mencerminkan bahwa konten yang dibagikan tidak hanya dilihat, tetapi juga mampu memicu keterlibatan audiens. Hal ini menunjukkan bahwa konten yang disajikan relevan, menarik, dan bermanfaat bagi pengikut.

Profil akun Instagram Dit. PMPUPO dikunjungi sebanyak 25.970 kali dalam setahun. Angka ini menunjukkan bahwa banyak audiens yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dit. PMPUPO setelah melihat konten yang dibagikan. Kunjungan ke profil juga dapat menjadi indikator awal minat audiens untuk terhubung lebih dalam dengan akun ini. Akun ini berhasil mendapatkan 4.335 pengikut baru selama satu tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan bahwa strategi konten dan aktivitas di Instagram telah berhasil menarik minat audiens baru untuk mengikuti dan terhubung dengan Dit. PMPUPO secara berkala.

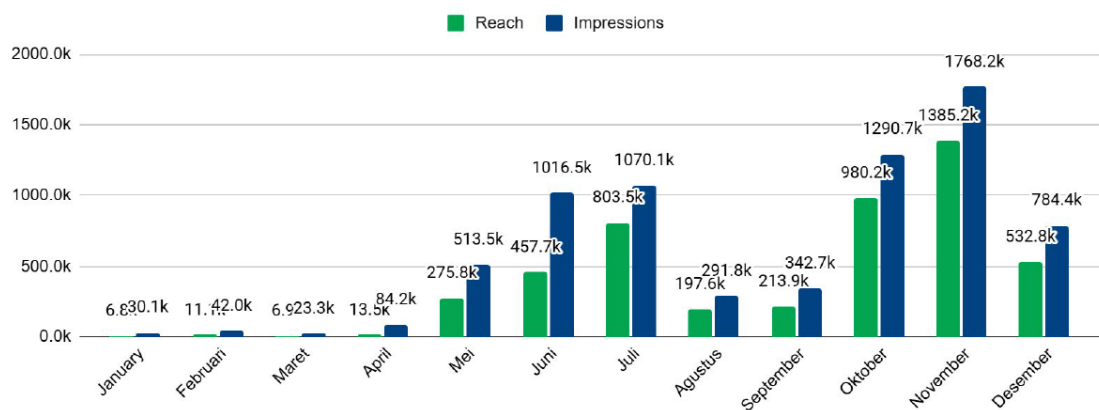
1.342.957

Jumlah orang (*reach*) yang didapatkan selama 1 tahun.
(Bukan akumulasi)



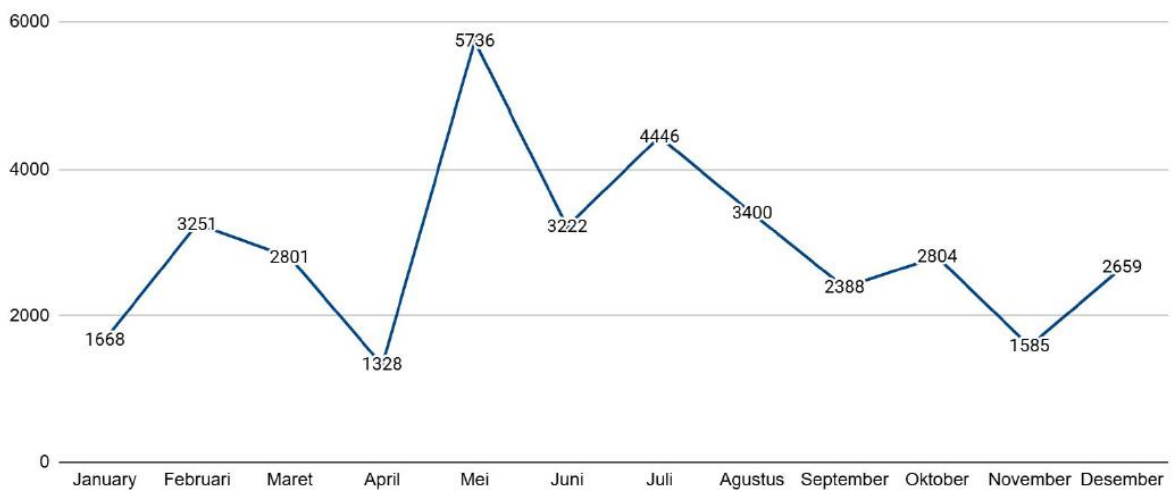
Gambar 63. Jumlah *Reach* Akun Instagram pmpupangan.bpom

Reach & Impressions Growth



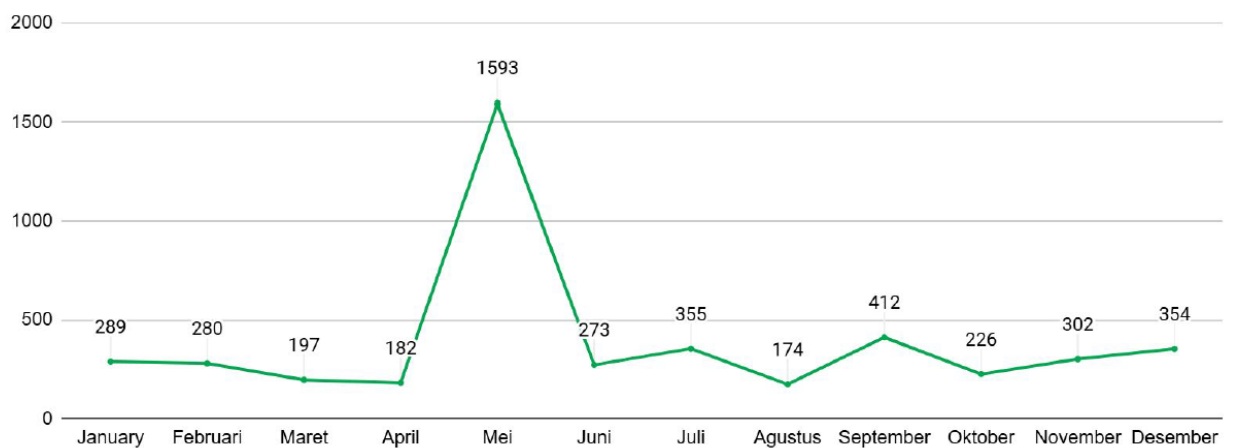
Gambar 64. Jumlah *Reach & Impressions Growth* Akun Instagram pmpupangan.bpom

Content Interaction



Gambar 65. Jumlah Interaksi Konten Akun Instagram pmpupangan.bpom

Follower Growth



Gambar 66. Jumlah Pertumbuhan *Follower* Akun Instagram pmpupangan.bpom



Gambar 67. Overview Kinerja Akun TikTok Dit. PMPUPO

Di tahun 2024, akun TikTok Dit. PMPUPO memiliki 67 *followers* dan 381 *profile views*. Meskipun jumlah *followers* masih relatif kecil, *profile views* yang mencapai 381 menunjukkan bahwa ada minat dari pengguna TikTok untuk melihat profil akun ini. Ini bisa menjadi dasar yang baik untuk pertumbuhan ke depan. Konten-konten yang dipublikasikan di akun ini telah dilihat sebanyak 440.000 *views*. Angka ini sangat mengesankan dan menunjukkan bahwa konten yang dibagikan memiliki daya tarik yang kuat, mampu menjangkau audiens dalam jumlah besar, dan berpotensi viral. Konten-konten tersebut juga mendapatkan 7.080 *likes*, 48 *comments*, dan 468 *shares*.

Tingginya jumlah *likes* dan *shares* mencerminkan bahwa konten yang dibagikan tidak hanya dilihat, tetapi juga disukai dan dibagikan oleh audiens, yang merupakan indikator positif dari *engagement* yang solid. Meskipun jumlah *followers* masih terbilang kecil, akun TikTok ini telah menunjukkan potensi yang besar dengan *views* konten yang sangat tinggi dan *engagement* yang solid. Untuk meningkatkan performa ke depan, fokus dapat diberikan pada strategi untuk mengkonversi *viewers* menjadi *followers*, seperti membuat konten serial, menggunakan *call-to-action* yang efektif, dan meningkatkan interaksi dengan audiens melalui kolaborasi atau konten yang lebih interaktif. Dengan konsistensi dan optimasi strategi, pertumbuhan akun ini dapat semakin pesat.

Tahun 2024, media sosial yang dikelola dalam rangka *branding* keamanan pangan telah menunjukkan pertumbuhan yang positif, baik dari segi *reach*, *engagement*, maupun jumlah konten yang dipublikasikan. Untuk tahun depan, fokus yang dapat ditingkatkan adalah interaksi dengan audiens, mengoptimalkan kolaborasi, dan terus menyajikan konten yang relevan serta menarik. Dengan strategi yang tepat, kami yakin pertumbuhan media sosial di Dit. PMPUPO akan semakin pesat dan berdampak positif bagi *branding* keamanan pangan.

4. Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMKM

UMK pangan olahan memegang peran strategis dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. UMK juga menggerakkan perekonomian rakyat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Jumlah UMK saat ini sebanyak 64.149.328 atau 99,92% dari seluruh usaha di Indonesia (KUKM, 2021). Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebanyak 60,5% dan Total investasi UMKM Nasional 65%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018 terdapat 1,9 juta industri manufaktur makanan dan minuman skala kecil dan mikro (99,6%) dari seluruh industri manufaktur makanan dan minuman di Indonesia. Sektor makanan dan minuman menjadi penyumbang PDB industri non migas terbesar (34%).

Amanat PP No 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Kemudahan dan Pemberdayaan UMKM, UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha. Saat ini tingkat kemudahan berusaha di Tanah Air berada di level 73, di bawah negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Aturan turunan UU Cipta Kerja diyakini bisa meningkatkan peringkat *Easy of Doing Business* (EoDB) Indonesia ke posisi 40 pada 2024. Dari 64,19 juta UMKM, 64,14 juta (99,92%) adalah UMK sebagian besar berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi menjadi formal. Rilis BPS tentang Profil UMK 2019 dari total 4.380.176 Usaha, 96% usaha tidak memiliki sertifikat. Dari total 4% (168.161 Usaha) memiliki sertifikat berupa sertifikat SNI, HKI, dan Sertifikat lainnya.

Dengan telah berlakunya Undang- Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, semua perizinan usaha disederhakan, dipermudah dan dipercepat sehingga UMKM dapat menjalankan usahanya secara baik dan legal. Terkait hal tersebut, salah satu misi Badan POM telah sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut, yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. BPOM berperan aktif dalam upaya mengedukasi pelaku usaha terkait regulasi, standar, pedoman dan informasi terkini terkait Obat dan Makanan, sehingga pelaku usaha mengetahui, memahamai informasi terbaru yang berlaku baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Kegiatan yang dilakukan dilaksanakan secara luring, daring dan hybrid sehingga informasi yang disampaikan dapat menjangkau pelaku usaha di semua daerah di Indonesia. kegiatan meliputi UMK Camp Series, Webinar Dapoer Kita tematik, dan pameran.

Tabel 27. Capaian Pelaksanaan Webinar Dapoer Kita Series Tahun 2024

No	Tema UMK Camp	Tanggal Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	21 Februari 2024	1000
2	Produk Olahan Singkong	26 Maret 2024	571
3	Produk Olahan Buah	29-30 Mei 2024	1088
4	Produk Olahan Unggas	11-12 September 2024	737
5	Produk Olahan Tapioka	13-14 November 2024	899
6	Produk Pangan Siap Saji Beku	18-19 Desember 2024	862
Jumlah			5.157



Gambar 68. Dokumentasi Webinar Dapoer Kita

Tabel 28. Capaian Pelaksanaan UMK Camp Series Tahun 2024

No	Tema UMK Camp	Tanggal Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Jaminan Keamanan Pangan Melalui Penerapan CPPB-IRTP	27 Februari 2024	533
2	Ta'jil Aman, Ibadah Nyaman	20 Maret 2024	276
3	Penerapan Keamanan Pangan Di Ritel (Pasar Tradisional Dan Ritel)	23 April 2024	340
4	Keamanan Pangan di Usaha Pangan Siap Saji	16 Juli 2024	902
5	Sorgum Sebagai Pangan Olahan Bernilai Ekonomi Tinggi	17 September 2024	124
6	Jaminan Keamanan dan Mutu Repacking dan Parcel Pangan	11 Desember 2024	315
Jumlah			2490



Gambar 69. Dokumentasi UMK Camp

5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan, Badan POM melakukan berbagai upaya melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pelayanan publik di bidang pelayanan obat dan makanan. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (Dit PMPUPO) berkomitmen untuk terus melakukan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan secara

efektif dan melakukan pelayanan publik kepada pelaku usaha pangan olahan terkait SPPIRT dan implementasi CPPOB.

Dit PMPUPO melakukan KIE yang efektif kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan melalui berbagai media baik secara luring maupun daring. KIE dilakukan dengan berbagai topik secara tematik, sesuai isu terkini, dan sesuai dengan rencana strategis organisasi. Dalam pelaksanaan KIE, Dit. PMPUPO tidak dapat melakukan KIE sendiri, namun harus menggandeng stakeholder. Salah satu stakeholder yang memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat yaitu Tokoh Masyarakat dari DPR RI.

Latar belakang pentingnya KIE bersama Tokoh Masyarakat adalah 1) Keberadaan Tokoh Masyarakat membuat in-dept terkait edukasi masyarakat dengan kearifan lokal karena Tomas mengetahui lebih dalam tentang masyarakatnya; 2) Tidak hanya target KIE untuk masyarakat umum tetapi ada target masyarakat khusus, sehingga terbentuk kader pengawasan obat dan makanan; 3) Keamanan Pangan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha (3 pilar), tetapi saat ini menjadi tanggung jawab bersama Tokoh Masyarakat dan Media (sistem pengawasan penta helix). Pada Tahun 2024, Dit PMPUPO melakukan KIE bersama Tokoh Masyarakat dari Komisi IX DPR RI

Dit. PMPUPO melanjutkan KIE Bersama Tokoh Masyarakat yaitu Anggota Komisi IX DPR RI (Ibu Hj. Netty Prasetyani, M.Si. dan Ibu Hj. Dewi Asmara, SH., MH.). KIE Bersama kedua Tokoh Masyarakat ini dilaksanakan di 18 Titik, yaitu 10 Titik di Wilayah Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon (Ibu Hj. Netty Prasetyani, M.Si.), sedangkan 8 Titik lainnya di Wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi (Ibu Hj. Dewi Asmara, SH., MH.).

Kegiatan ini terealisasi 100% pada bulan Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Titik	Hj. Netty Prasetyani, M.Si.		Hj. Dewi Asmara, SH., MH.	
	Tanggal	Jumlah Peserta	Tanggal	Jumlah Peserta
1	9 Jan 2024	500	10 Jan 2024	250
2	9 Jan 2024		10 Jan 2024	250
3	10 Jan 2024	500	11 Jan 2024	250

Titik	Hj. Netty Prasetyani, M.Si.		Hj. Dewi Asmara, SH., MH.	
	Tanggal	Jumlah Peserta	Tanggal	Jumlah Peserta
4	10 Jan 2024		11 Jan 2024	250
5	11 Jan 2024	500	18 Jan 2024	500
6	11 Jan 2024		18 Jan 2024	
7	18 Jan 2024	500	29 Jan 2024	500
8	18 Jan 2024		29 Jan 2024	
9	20 Jan 2024	500		
10	20 Jan 2024			



Gambar 70. Dokumentasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

6. KIE UMK PO Bagi Kelompok Rentan/Disabilitas

KIE UMK Pangan Olahan bagi Kelompok Rentan/Disabilitas diadakan luring di Gedung Batik Lantai 6 Kantor BPOM.

Materi KIE UMK Pangan Olahan bagi Kelompok Rentan/Disabilitas meliputi:

1. Cara Produksi Pangan Olahan-IRT oleh Devi Riani, ST, MSi - Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
2. Demo Workshop Pembuatan Coklat oleh Anita Nur Aini, Ssi, Apt, MSi – Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, pada KIE UMK Pangan Olahan ini dilakukan pre dan *post test*.

Peserta KIE UMK Pangan Olahan berasal dari Yayasan Disabilitas Kreatif Indonesia dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Terdapat 31 orang pelaku usaha peserta KIE UMK Pangan Olahan. Data Peserta KIE UMK Pangan Olahan



Gambar 71. Dokumentasi KIE Pangan Olahan Bagi Kelompok Disabilitas

7. Pengembangan Media Seni Budaya Lokal Keamanan Pangan

Untuk mengembangkan media seni budaya lokal keamanan pangan, dilaksanakan Forum Grup Discussion/ FGD pada tanggal 2 Desember 2024 secara hybrid luring di Hotel Aryaduta dan daring melalui zoom meeting dan dipimpin oleh Direktur PMPUPO. BPOM berusaha menggali masukan dan pandangan dari Kementerian terkait (Kemendagri, Kemendagri, Kemen Kebudayaan, Kemenparekraf) dan perkumpulan/komunitas praktisi kebudayaan (Komite Seni Budaya Nusantara, Dewan Kesenian Jakarta, Komunitas Budaya Antarshukha, wayang Orang Bharata, Ruang Budaya Sumatra, Komunitas Kesenian Bali).

Untuk menghantarkan diskusi, sebelumnya ada pemberian materi dengan narasumber

- Ibu Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME., Direktur PMPUPO
- Bapak Dr. Ivan Syamsurizal, ST, MT - Asisten Deputi Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

- Ibu Santi Laria S.Sos. MSi - Subdit Perindag dan SosBud Kementerian Dalam Negeri, Direktorat SUPD III, Bina Bangda Kemendagri
- Ibu Sitti Utami Haryanti, S.Pd., M.Hum - Ketua Tim Kerja Kemah Budaya Kaum Muda, Direktur Pembinaan dan Lembaga Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan

Hasil FGD adalah tersusun konsep grand desain “Pengembangan Edukasi Keamanan Pangan Melalui Seni Budaya dan Permainan Tradisional”



Gambar 72. Dokumentasi FGD

8. Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Keamanan Pangan Berbasis Seni Budaya Tradisional

Pagelaran Seni Budaya

Pagelaran Seni Budaya berupa pagelaran kethoprak “Bulak Perak Ondo Mas” yang berisi edukasi keamanan pangan dengan pemain pejabat BPOM, perwakilan asosiasi pelaku usaha (GAPMMI) dan pemain profesional dari wayang orang Bharata. BPOM memanfaatkan seni budaya dan permainan tradisional untuk pemberian KIE kepada masyarakat dan telah dicanangkan oleh Ibu Plt. Kepala BPOM tanggal 20 Juni 2024 di Gedung Merah Putih BPOM.

KIE melalui pagelaran ini diberikan kepada peserta yang berasal dari Kementerian/ Lembaga, asosiasi pelaku usaha dan organisasi masyarakat, profesi dan keagamaan.



Gambar 73. Dokumentasi Pagelaran Seni Budaya

Forum Harmoni Budaya Nasional/ FHBN

BPOM berpartisipasi dalam kegiatan Partisipasi dalam Acara Puncak Festival Harmoni Budaya Nusantara/FHBN tahun 2024 dengan tema "Merajut Persatuan dalam Keberagaman," di Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 5-7 September 2024. FHBN 2024 bertujuan untuk mendorong pengembangan identitas budaya di IKN. Seiring dengan pembangunan fisik dan infrastruktur, penguatan kebudayaan dan SDM menjadi penting guna mengimbangi perbedaan karakteristik antara masyarakat lokal dan pendatang. Sebagai ibukota baru yang akan menjadi pusat kebudayaan, Nusantara diharapkan mampu mencerminkan identitas bangsa yang majemuk, meminimalisir potensi permasalahan sosial dan ekonomi, serta mengkolaborasikan kearifan lokal dengan inovasi modern.

FHBN melibatkan 10 kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 4 provinsi lainnya (Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Tengah, dan NTB), serta 250 undangan dari unsur pemerintahan, dunia pendidikan dan masyarakat adat. FHBN 2024 telah menyuguhkan serangkaian kegiatan menarik, meliputi:

- Festival Seni Budaya: Pagelaran Budaya, Diskusi Budaya, Pawai Budaya, dan Bazar/Pameran.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Sosialisasi dan Workshop.
- Layanan Publik: Ekspose Kegiatan Revolusi Mental, termasuk layanan Adminduk, SIM, STNK, kesehatan, dan lainnya

BPOM berpartisipasi pada Acara Puncak FHBN yang diwakili oleh Direktorat PMPUPO, Direktorat RPO, BBPOM di Samarinda, BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Balikpapan dan Loka POM di Tabalong. Kegiatan BPOM antara Pameran Obat dan Makanan dan Mobil Laboratorium Keliling menggunakan mobling Loka POM di Balikpapan

Pembukaan FHBN dilaksanakan tanggal 6 September 2024 oleh Menteri Koordinator PMK diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyningrum dan sambutan dari Pj Bupati Penajam Paser Utara/PPU Makmur Marbun

Pameran Obat dan Makanan dilaksanakan pada tanggal 6-7 September 2024 di Alun-Alun Kab Penajam Paser Utara/PPU. BPOM mengisi 3 booth tenda sarnafil dan dibagi 3 area yang meliputi:

- Desk Konsultasi Obat dan Makanan,
- Penyampaian bisnis proses BPOM dan KIE terkait obat dan makanan illegal dan legal, Cek KLIK, Informasi Nilai Gizi, dll

- Permainan edukasi (ular tangga, congklak dan ketangkasan) dilengkapi dengan pemberian KIE terkait Obat dan Makanan



Gambar 74. Dokumentasi Festival Harmoni Budaya Nusantara

Promosi Keamanan Pangan di Media (RRI)

BPOM telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE). KIE terutama di bidang keamanan pangan dilaksanakan secara tatap muka baik langsung maupun webinar maupun melalui berbagai media seperti media elektronik, media sosial, media cetak, dan media digital.

Indeks Kesadaran (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2022 pada tingkat nasional diperoleh nilai 81,56 (Kategori Baik) dengan target yaitu 80 (101,95%), nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3,92 poin dari tahun 2021 yaitu 77,64. Indeks

kesadaran dibentuk dari 3 (tiga) indikator, dimana secara keseluruhan indikator pembentuk indeks tersebut berada pada kategori Baik. Indikator yang tertinggi adalah pada sikap masyarakat yaitu 84,59 dan pengetahuan masyarakat 83,47. Sementara itu, perilaku merupakan indikator kesadaran dengan nilai yang terendah yaitu sebesar 76,63. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih obat dan makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku baik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam memilih Obat dan Makanan aman dan bermutu.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) merupakan satu-satunya radio pemerintah yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Melalui Aplikasi RRI Digital yang didengar oleh 47,1 Juta Jiwa (Survei RRI 2019), masyarakat dari berbagai kalangan dapat menyimak siaran multiplatform (audio, video dan teks). Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman BPOM dan LPP-RRI No KS.01.02.1.2.01.06.21.07 Nomor 1487/DU/06/2021 tentang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Dit. PMPUPO melaksanakan Dialog Interaktif Keamanan Pangan dengan tajuk “Dialog BPOM” sebanyak 6 kali dan liputan kegiatan sebanyak 2 kali seperti terlihat pada Tabel 30 dan Gambar 75.

Tabel 30. Pelaksanaan Edukasi Keamanan Pangan melalui LPP-RRI

No.	Tanggal	Tema Dialog BPOM	Narasumber Internal	Jumlah Pendengar
1	7 Juni 2024	Food Safety: Prepare for the Unexpected (Tema World Food Safety Day 2024)	Plt Kepala BPOM, DR. Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., M. Pharm., MARS.	300.000 orang
2	20 Juni 2024	Pagelaran Ketoprak Edukasi BPOM lakon “Ksatria Bulak Perak Ondo Mas”	Plt Kepala BPOM, Plt. Deputi 3, Wayang Orang Bharata	artikel ditayangkan pada website rri.pom.go.id
3	25 Juni 2024	Kesenian dan Permainan Tradisional sebagai media informasi dan edukasi Obat dan Makanan	Ketua Tim Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan, Dra. Dyah Sulistyorini, Apt., MSc	600.000 orang
4	4-5 Juli 2024	Report on the Spot dan Penulisan Berita World Food Safety Day 2024 Expo x Zestival		artikel ditayangkan pada website rri.pom.go.id
5	26 Juli 2024	Hari Anak Nasional: Anak Terlindungi Dari Makanan Tidak Sehat	Dit. PMPUPO, Ema Setyawati, S.Si., Apt., ME	701.073 orang
6	9 Agustus 2024	Pramuka Berjiwa Pancasila Menjaga NKRI	Dra. Indriemayatie Asri Gani, Apt.	701.073 orang

No.	Tanggal	Tema Dialog BPOM	Narasumber Internal	Jumlah Pendengar
7	20 September 2024	Kemudahan Izin Edar Pangan Olahan	Dir. RPO, Sintia Ramadhani, S.Si., Apt., M.Sc.	802.978 orang
8	18 Oktober 2024	World Food Day: Tidak Ada Ketahanan Pangan tanpa Keamanan Pangan	Dir. PMPUPO, Ema Setyawati, S.Si., Apt., ME	761.011 orang



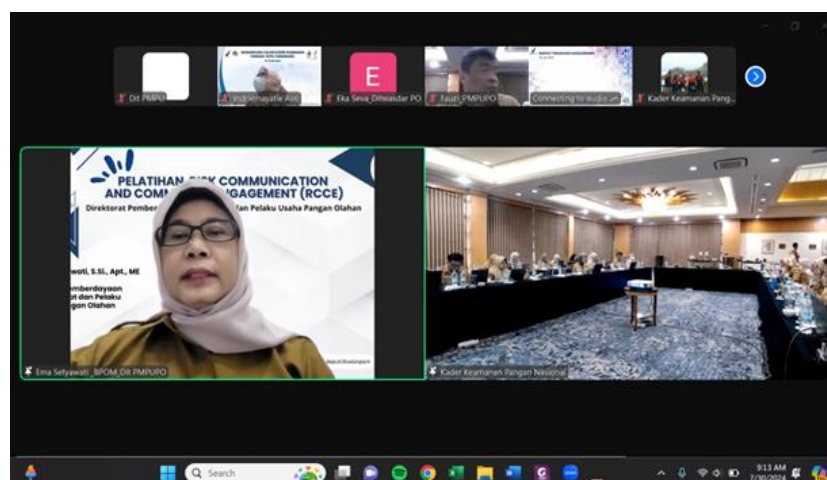
Gambar 75. Dokumentasi Pelaksanaan Dialog BPOM di LPP-RRI

9. Pelatihan Pengembangan Kompetensi *Risk Communication and Community Engagement (RCCE)* / Komunikasi Risiko dan Pemberdayaan Masyarakat (KRPM) melalui Komunikasi Digital

Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Kompetensi ini dilaksanakan pada 30 Juli 2024 yang dilaksanakan secara luring. BPOM berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga lainnya yang memiliki tujuan yang sama, melalui program Fasilitator Produsen Keamanan Pangan, Fasilitator Ritel Keamanan Pangan, dan Kader Keamanan Pangan, Kader Desa dan Kader Sekolah. Bagaimana menjaga keterlibatan para fasilitator setelah menjalani pelatihan dan mengembangkan program-program yang terkait dengan topik-topik pengawasan pangan olahan.

Komunikasi digital adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk membentuk keterlibatan fasilitator dan membentuk komunitas fasilitator yang dapat berfungsi dalam pengelolaan komunikasi resiko. Program *Risk Communication and Community Engagement (RCCE)* sebagai pilar penting dalam upaya pencegahan berisiko melalui komunikasi interpersonal untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan pangan, sehingga meningkatkan keterampilan peserta dalam melakukan komunikasi interpersonal dan meningkatkan teknik komunikasi peserta. Pelatihan RCCE sangat sesuai untuk mendukung program-program di BPOM yang banyak melibatkan Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga lain yang terkait.

Maksud dan tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kemampuan peserta dalam berkomunikasi melalui media social; memberikan pengetahuan dan kemampuan untuk mengantisipasi risiko melalui komunikasi digital. Pelatihan ini diikuti oleh 60 peserta ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Output yang diharapkan dari pelatihan ini adalah meningkatkan ketrampilan peserta dalam melakukan komunikasi interpersonal, teknik komunikasi serta teknik bagaimana cara pengelolaan kader dan fasilitator keamanan pangan.



Gambar 76. Dokumentasi Pelaksanaan Pengembangan Pelatihan *Risk Communication and Community Engagement (RCCE)*

SASARAN KEGIATAN 7	Meningkatkan Peran Aktif UPT BPOM yang di Bina Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Indikator Kinerja Utama 1	Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman

1. Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMKM Pangan Olahan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" dengan salah satu agenda yaitu Mewujudkan transformasi ekonomi, maka diperlukan ekonomi yang stabil, yang salah satunya melalui penguatan kapasitas UMKM pangan. UMK pangan memegang peran strategis dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, termasuk menggerakkan perekonomian rakyat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia, namun UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti akses pembiayaan, pemasaran, dan daya saing serta produktivitas. Terkait hal ini pemerintah berusaha meningkatkan daya saing UMK dengan mengesahkan PP No 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Kemudahan dan Pemberdayaan UMKM dimana UMKM yang melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.

Umumnya masalah yang dihadapi antara lain aspek higiene perorangan, sanitasi, pengelolaan lingkungan (sampah), fasilitas produksi belum bebas dari hama dan serangga, dan suplai air bersih. Penyebab utamanya adalah rendahnya pengetahuan, kesadaran dan keterampilan dalam menerapkan persyaratan CPPOB di sarana produksi. Sehingga diperlukan upaya peningkatan keamanan pangan di tingkat sarana produksi dan distribusi.

Program Orang Tua Angkat

Dalam rangka mendukung pemberdayaan UMK pangan olahan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan POM bersama Kementerian / Lembaga / Industri adalah melalui penyelenggaraan Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan.

Tujuan diselenggarakannya program ini adalah

- Meningkatkan aksesibilitas UMK pangan olahan dalam menghadapi masalah dan tantangan penyediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.
- Meningkatkan kapasitas, daya saing dan kemandirian UMK pangan olahan.

→ Meningkatkan komitmen pelaku Industri Pangan Olahan dan *crowdfunding* dalam pembinaan kepada UMK Pangan Olahan melalui mekanisme CSR.

Sesuai dengan *roadmap*, telah bergabung 26 industri pangan dan *crowdfunding* yang tergabung dalam program Orang Tua Angkat (OTA) UMK pangan Olahan yang memberikan fasilitasi kepada UMK pangan olahan, baik dalam bentuk edukasi dan pendampingan maupun dalam bentuk bantuan sarana produksi. Adapun daftar OTA sebagai berikut:

1. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
2. PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
3. PT. Frisian Flag Indonesia
4. PT. Tigaraksa Satria Tbk
5. PT. Sarihusada Generasi Mahardhika
6. PT. Nestle Indonesia
7. PT. Mayora Indah Tbk
8. PT. Niramasa Utama
9. PT. Konimex
10. PT. Kimia Farma Tbk
11. PT. Heinz ABC Indonesia
12. PT. Forisa Nusa Persada
13. PT. Tempo Scan Pasific
14. PT. Kino Indonesia
15. PT. Unilever Indonesia Tbk
16. PT. Multi Bintang Indonesia
17. PT. Unifam
18. PT. Charoen Pokphand Indonesia
19. PT. Cisarua Mountain Dairy
20. BRI Research Institute
21. Benihbaik.com
22. PT. Wings Group
23. PT. So Good Food
24. PT. Simba Indosnack Makmur
25. PT. Ajinomoto Indonesia
26. PT. Sasa Inti



**Gambar 77. Focus Group Discussion dan Sinergi Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan
Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor**

Dalam rangka menindaklanjuti MoU antara BPOM, Pondok Pesantren dan Bupati Kabupaten Mojokerto yang telah dilaksanakan tanggal 2 November 2023 di Kota Mojokerto, telah disusun *road map* program pembinaan di lingkungan Pondok Pesantren melalui program SAPA SANTRI-SANTRIPRENEURSHIP. Pada tanggal 24 Juli 2024 juga diadakan rapat koordinasi dengan Kementerian Agama RI dan lintas sektor terkait Pembinaan ke Pondok Pesantren di Jawa Timur, yang dihadiri oleh :

1. Assisten II (Asisten Perekonomian dan Pembangunan) BPKAD Kabupaten Mojokerto, Ibu Nurul Istiqomah, SE,MM
2. Perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam-Kementerian Agama (daring)
3. Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur)
4. Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Surabaya
5. Perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya
6. Perwakilan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
7. Perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto (daring)

8. Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto
9. BPOM di Surabaya dan Balai POM di Kediri



Gambar 78. Dokumentasi Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Jawa Timur

2. Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan PJAS

Sejak Tahun 2011-2023, sebanyak 57.949 Sekolah telah diintervensi keamanan pangan melalui sosialisasi keamanan pangan. Capaian sekolah yang telah diintervensi ini tentu masih relatif sedikit yaitu 20,9 % dari 276.866 sekolah yang ada di Indonesia. Untuk itu, Program Prioritas ini harus terus dilanjutkan dengan lebih memperkuat mutu dan keamanan PJAS serta meningkatkan pemberdayaan komunitas sekolah agar mampu menerapkan prinsip mutu dan keamanan PJAS di sekolahnya. Selanjutnya diharapkan sekolah yang sudah berhasil menerapkan program PJAS, dapat melakukan replikasi/pengimbasan ke sekolah di sekitarnya, sehingga mampu menjangkau lebih banyak lagi sekolah yang menerapkan kaidah-kaidah keamanan dan mutu pangan PJAS.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Program PJAS tahun 2024, sebagai berikut:

1. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman sesuai definisi operasional sebagai berikut:
 - a. Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 - b. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 - c. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan
2. Tahapan pendampingan sekolah dilakukan melalui Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi Keamanan PJAS, Monitoring Kader Keamanan Pangan Sekolah, Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman dan Pengawasan.
3. Tahun 2024 total target sekolah pada kegiatan Sekolah dengan PJAS Aman adalah 3.400 sekolah, namun dapat tercapai sebanyak 3.518 sekolah terdiri dari:
 - a. 729 sekolah full iintervensi
 - b. 2.735 sekolah perluasan.

Kendala pada program PJAS ini adalah lokasi dan transportasi untuk wilayah sekolah yang berada di pedalaman sehingga mengakibatkan jumlah kunjungan menjadi terbatas/ tidak dapat dilakukan berulang (pada kegiatan monev dan sertifikasi) mengingat ketersediaan dana dan SDM. Kemudian hasil pengujian mikrobiologi yang ditemukan oleh petugas menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Rencana tindak lanjut Program PJAS tahun 2025 antara lain: (a) kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain, khususnya Kemendikdasmen dan Kemenkes; dan (b) revitalisasi program PJAS melalui program SAPA SEKOLAH

3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Pangan Aman

Direktorat PMPU PO melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan desa pangan aman yang dilakukan oleh UPT BPOM. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan terhadap tahapan-tahapan kegiatan desa pangan aman yang dilakukan oleh UPT BPOM. Adapun tahapan desa pangan aman terdiri dari advokasi kelembagaan desa, pelatihan kader, bimtek komunitas, fasilitasi keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, survei pre dan post intervensi, monitoring dan evaluasi, serta lomba desa pangan aman.

Total target desa/kelurahan yang diintervensi oleh UPT BPOM pada tahun 2024 adalah 231 desa/kelurahan dengan jumlah yang dikawal sebanyak 875 desa/kelurahan. Dari total 231 desa/kelurahan yang diintervensi telah dilatih 3.778 kader keamanan pangan desa. Para KKPD tersebut, telah melaksanakan bimtek keamanan pangan dan fasilitasi keamanan pangan ke 12.656 orang yang berasal dari kelompok Ibu Rumah Tangga, remaja, sekolah, pelaku usaha pangan olahan (IRTP), Pelaku Usaha Pangan Siap Saji, Ritel. Capaian desa pangan aman yang diintervensi dalam jangka waktu pelaksanaan RPJMN 2020 - 2024 adalah sebanyak 1.106 desa/kelurahan, 17.226 kader keamanan pangan yang telah dilatih, dan 58.430 komunitas telah diberikan sosialisasi terkait keamanan pangan.

Direktorat PMPUPO melakukan penilaian pelaksanaan Desa Pangan yang dilakukan oleh UPT BPOM. Penilaian tersebut ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Capaian target desa yang memiliki rencana aksi keamanan pangan
- Capaian jumlah kader dan komunitas
- Ketepatan waktu pelaksanaan seluruh tahapan
- Ketepatan waktu pelaporan seluruh tahapan
- Keikutsertaan pada Lomba Desa Pangan Aman

Adapun kriteria penilaian tersebut di monitoring melalui aplikasi pelaporan Desa Pangan Aman yaitu GKPD Online.

Data Report Profiling UPT BPOM

Tahun: Balai:

Detail Data

No	BB/BPOM	Target Desa 2024	Kegiatan					
			Advokasi	Pelatihan Kader	Bimtek Komunitas	Fasilitasi	Mobiling	Monev
1	UPT BPOM Payakumbuh	1	1	1	1	1	1	1
2	UPT BPOM Tangerang	1	1	1	1	1	1	1
3	UPT BPOM Tasikmalaya	1	1	1	1	1	1	1
4	UPT BPOM Bogor	1	1	1	1	1	1	1
5	UPT BPOM Surakarta	1	1	1	1	1	1	1
6	UPT BPOM Kediri	1	1	1	1	1	1	1
7	UPT BPOM Jember	1	1	1	1	1	1	1

Data Report

Start Date: End Date: Balai:

Detail Data

No	Balai	SubMuka			Desa/Kelurahan					Advisasi				
		Target	Capaian	Revisi/Status	Target	Capaian	Revisi/Status	Worthing/ Wk. Standing	Jenis Informasi	Revisi/Status	Jadwal Pelaksanaan	Revisi/Status	Revisi/Status	
1	UPT BPOM Payakumbuh	1	1	KOTA BLANTINGGIR	Desuai	1	1	Pekan Kani	Sharing	Desuai	Jan-May	Pekan Kani (Pakumbuh)	15 Apr 2024	Desuai
2	UPT BPOM Tangerang	1	1	KOTA TANGERANG	Desuai	1	1	Pekan Jaya	Sharing	Desuai	Jan-May	Pekan Jaya (Pakumbuh)	20 May 2024	Desuai
3	UPT BPOM Tasikmalaya	1	1	KAB. TASIKMALAYA	Desuai	1	1	Rajapatt	Sharing	Desuai	Jan-May	Rajapatt (Desa)	27 May 2024	Desuai
4	UPT BPOM Bogor	1	1	KOTA BOGOR	Desuai	1	1	Ornung Batu	Sharing	Desuai	Jan-May	Ornung Batu (Pakumbuh)	27 Mar 2024	Desuai
5	UPT BPOM Surakarta	1	1	KAB. SUKSES	Desuai	1	1	Sukesi	Sharing	Desuai	Jan-May	Sukesi (Desa)	27 Mar 2024	Desuai
6	UPT BPOM Jember	1	1	KOTA BLITAR	Desuai	1	1	Harsip	Sharing	Desuai	Jan-May	Harsip (Pakumbuh)	28 May 2024	Desuai
7	UPT BPOM Jember	1	1	KAB. LUMAJANG	Desuai	1	1	Hutemom	Sharing	Desuai	Jan-May	Hutemom (Desa)	28 Apr 2024	Desuai
8	UPT BPOM Pesisir	1	1	KOTA PALUPO	Desuai	1	1	Pantai	Sharing	Desuai	Jan-May	Pantai (Pakumbuh)	12 May 2024	Desuai
9	UPT BPOM Jember	4	4	KAB. ACHEH SELATAN	Desuai	1	1	Batas Tunggul Bulan Gasing	Sharing Sharing	Desuai	Jan-May	Batas Tunggul (Desa) Bulan Gasing (Desa)	28 Feb 2024 28 Feb 2024	Desuai Desuai

Gambar 79. Aplikasi GKPD Online

Hasil penilaian Desa Pangan Aman pada tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai 42 UPT BPOM sudah berada di atas nilai cut off 70%.



Gambar 80. Penilaian Pelaksanaan Desa Pangan Aman 2024

Kendala yang seringkali ditemui oleh UPT BPOM adalah tidak dapat melaksanakan pengujian mikrobiologi pada tahapan pengawasan keamanan pangan karena kurangnya sumber daya di UPT. Selain itu, masih rendahnya replikasi program Desa Pangan Aman oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Adapun rencana tindak lanjut untuk tahun selanjutnya adalah meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan melakukan sinergi dengan program K/L, perguruan tinggi, Pemerintah Daerah/Desa yang sudah ada sebelumnya untuk efisiensi sumber daya. Inovasi dari masing-masing UPT BPOM juga perlu dikembangkan untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan manajemen risikonya.

Selain monitoring dan evaluasi terhadap UPT BPOM, dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi pelaporan kegiatan Desa Pangan Aman bagi para penanggung jawab di UPT POM telah dilakukan pengembangan aplikasi Desa Pangan Aman (gkpd.pom.go.id).

Pengembangan aplikasi GKPD online meliputi:

- Penambahan fitur pada modul advokasi
- Penambahan fitur pada modul bimtek
- Pengembangan modul mobling
- Pengembangan modul monev dan pengawalan
- Pengembangan modul sertifikat
- Pengembangan modul verifikasi mobling
- Pengembangan modul verifikasi monev dan pengawalan
- Pengembangan modul verifikasi sertifikat
- Pengembangan modul upaya mendorong replikasi
- Penambahan fitur pada modul report profiling

- Penambahan fitur pada modul report profiling UPT
- Penambahan fitur pada modul report kader komunitas
- Pengembangan modul report mobling
- Pengembangan modul report monev dan pengawalan
- Pengembangan modul report sertifikat
- *Maintenance* aplikasi GKPD

Penyempurnaan aplikasi GKPD Online ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan GKPD di setiap UPT BPOM secara rinci dan cepat untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

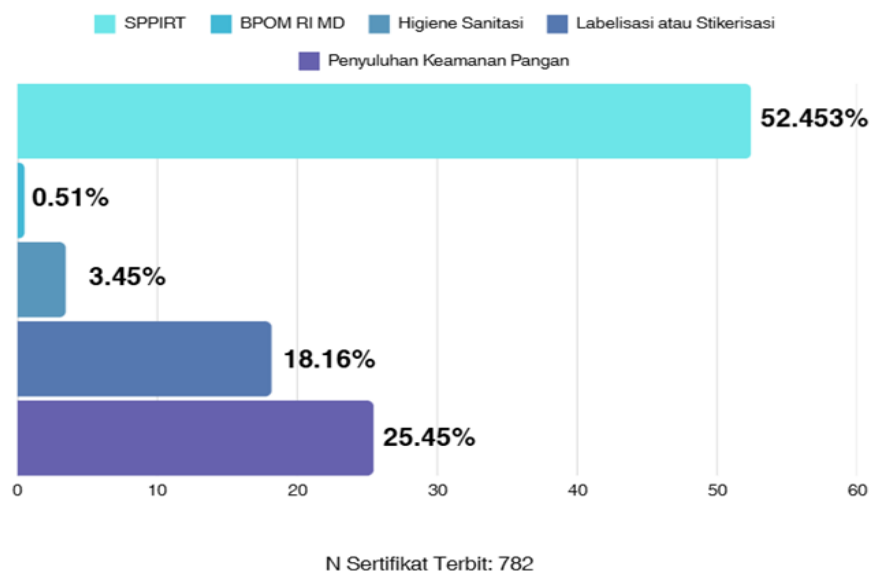
Selain digunakan oleh UPT BPOM, GKPD Online juga dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk melaporkan program Desa Pangan Aman yang dilakukan secara mandiri. Berdasarkan hasil monitoring, berikut merupakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang telah mereplikasi program Desa Pangan Aman:

1. Replikasi oleh Pemkab. Wonosobo, Jawa Tengah di 21 Desa
2. Replikasi oleh Pemkot Semarang di 177 Kelurahan
3. Replikasi oleh Pemkab. Bandung, Jawa Barat di 13 desa
4. Replikasi di Desa Wisata Kampung Pulau Derawan oleh Pemkab. Berau Kalimantan Timur
5. Replikasi di Kelurahan Galung Maloang oleh Pemkot Pare-pare, Sulawesi Selatan
6. Replikasi di Desa Topoyo oleh Pemkab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat
7. Replikasi di Desa Pampang Harapan oleh Pemkab. Kayong Utara, Kalimantan Barat
8. Replikasi di Desa Karyamekar, oleh Pemda Kab. Bogor

Selain melakukan monitoring, Direktorat PMPUPO rutin melakukan evaluasi dampak Desa Pangan Aman melalui survei pre dan post intervensi dengan mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait keamanan pangan sebelum dan sesudah intervensi. Hasil pengukuran sejak dimulai RPJMN 2020 - 2024 menunjukkan bahwa intervensi Desa Pangan Aman dapat meningkatkan nilai pengetahuan, sikap, dan perilaku kader dan komunitas desa. Selain itu, hasil kajian dampak Program Desa Pangan Aman terhadap tingkat kesehatan masyarakat (diukur berdasarkan jumlah kasus diare yang dapat dicegah serta manfaat ekonomi yang diperoleh) menunjukkan hasil bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program yaitu biaya akibat diare yang dapat dihemat sebesar Rp 72,94 M. Analisis biaya manfaat ini dilakukan terhadap pelaksanaan program Desa Pangan Aman di 105 desa di 34 provinsi dengan biaya pelaksanaan program sebesar Rp 11 M (Tampubolon, 2024). Jika cakupan program diperluas maka akan memberikan manfaat yang lebih besar. Selama masa intervensi Desa Pangan Aman 2024, 33 UPT melaporkan telah menerbitkan sejumlah 722 berbagai sertifikat dari 660 komunitas yang telah dibina. Sertifikat yang telah terbit antara lain

izin edar SPPIRT, izin edar BPOM RI MD, Higiene Sanitasi, Labelisasi atau Stikerisasi dan Penyuluhan Keamanan Pangan.

Berikut adalah presentase sertifikat yang telah terbit selama kegiatan Desa Pangan Aman tahun 2024.



Gambar 81. Sertifikat yang Telah Terbit selama Kegiatan Desa Pangan Aman tahun 2024

4. Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Direktorat PMPUPO melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut. Tahapan kegiatan PPABK adalah survey, advokasi, bimbingan teknis pengelola pasar, penyuluhan pedagang pasar, sampling dan pengujian tahap 1, kampanye keamanan pangan kepada komunitas pasar, sampling dan pengujian tahap 2 serta pengawalan. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan kegiatan PPABK menunjukkan bahwa seluruh UPT BPOM telah melaksanakan tahapan kegiatan PPABK.

Monitoring dan evaluasi secara intensif juga dilaksanakan terhadap 8 (delapan) UPT BPOM baru (BPOM Payakumbuh, BPOM Tangerang, BPOM Bogor, BPOM Tasikmalaya, BPOM Surakarta, BPOM Jember, BPOM Kediri dan BPOM Palopo). Monitoring dan evaluasi secara langsung dilaksanakan di ke 8 (delapan) balai tersebut. Kegiatan monitoring dan evaluasi PPABK di 8 (delapan) balai tersebut di sinergikan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan kegiatan Desa Pangan Aman, Sekolah dengan PJAS aman dan Pendampingan UMKM oleh UPT.

Tabel 31. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

No	UPT	Tanggal Pelaksanaan
1	Balai POM di Payakumbuh	3 September 2024
2	Balai POM di Tangerang	16 Agustus 2024
3	Balai POM di Bogor	20 Agustus 2024
4	Balai POM di Tasikmalaya	12 September 2024
5	Balai POM di Surakarta	29 Agustus 2024
6	Balai POM di Kediri	19 Agustus 2024
7	Balai POM di Jember	3 September 2024
8	Balai POM di Palopo	29 Agustus 2024



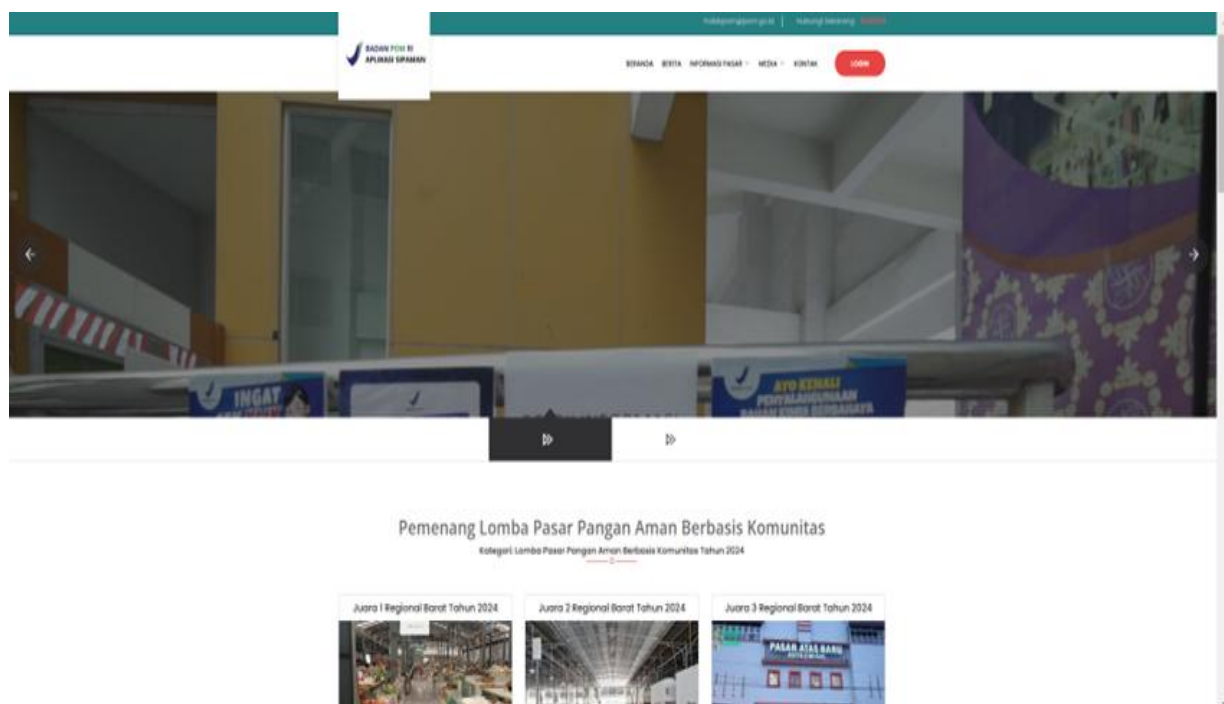
Gambar 82. Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pada kegiatan ini dilakukan pengembangan Sistem Informasi Pasar Aman (SIPaman). Pengembangan ini bertujuan untuk memudahkan unit pelaksana teknis BPOM, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dilaksanakan di wilayah kerjanya. Pengembangan Sipamanyang dilaksanakan pada tahun 2024 meliputi pengembangan pada:

Spesifikasi pekerjaan pengembangan Aplikasi SIPAMAN pada tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan role balai baru dengan cakupan area yang spesifik (mapping wilayah untuk balai baru sesuai peraturan yang baru sesuai dengan *catchment areanya*)
2. Pengembangan *role* Kabupaten/Kota dan provinsi untuk mengakomodir Kabupaten/Kota dan provinsi yang melakukan replikasi program PPABK
3. Pengembangan modul notifikasi e-mail/ Whatsapp
4. Pengembangan modul master data pasar
5. Pengembangan modul persetujuan/ verifikasi data uji sampling
6. Pengembangan modul *report profiling* balai
7. Pengembangan modul input data laporan bimtek dan laporan kampanye
8. Pengembangan modul rekap laporan pengawalan
9. Pengembangan komponen data tabel untuk menu laporan
10. Update redaksi konten modul

Melalui pengembangan sipaman ini diharapkan UPT BPOM semakin mudah dalam melaporkan kegiatan PPABK yang dilaksanakan di wilayah kerjanya.



Gambar 83. Aplikasi SIPAMAN

SASARAN KEGIATAN 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
Indikator Kinerja Utama 1	Indeks RB Dit PMPUPO

1. Implementasi RB

Pokja Manajemen Perubahan

Pokja Manajemen Perubahan, yang memiliki tugas melakukan transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas, sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Beberapa hal yang telah dilakukan adalah

1. Penyusunan Koordinator dan Anggota Tim RB
2. Pencanaan RB bersama stake holder
3. Melakukan Monitoring untuk seluruh kegiatan Pokja RB, program prioritas RB dan kegiatan AoC Direktorat PMPUPO
4. Sosialisasi berakhlak untuk pegawai bersama ACT Consulting pada tanggal 24 September 2024. Selain itu Sosialisasi Berakhlak dilakukan oleh internal tim pokja manajemen perubahan kepada seluruh pegawai. Sosialisai ini pemrting karena mengimplementasikan budaya birokrasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) dengan ASN yang profesional
5. Pembuatan video Agen Perubahan Direktorat PMPUPO
6. Mendukung dan mensupervisi kegiatan Agen Perubahan dan Agen Perubahan Direktorat PMPUPO menjadi Terbaik II Agen Perubahan Unit Pusat BPOM

Pokja Penataan Tata Laksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI menuju WBK/WBBM.

a. Implementasi QMS

Pelaksanaan Dit PMPUPO dalam implementasi QMS antara lain:

- Reviu SOP dan Bisnis Proses. Reviu SOP untuk SOP yang dimana Dit PMPUPO sebagai unit Koordinator yaitu SOP 04 dan SOP lain yang digunakan.

- Pelaksanaan Audit Internal tanggal 3-4 Juni 2024, dengan Auditor Internal dari Dit. KMEI yaitu Jamilah Nasution, Fachdiana Fidia dan Reni Setiawaty. Hasil Audit Internal ada 1 (satu) temuan AFI terkait pengelolaan arsip aktif.
- Pelaksanaan Audit Eksternal tanggal 5-26 September 2024 dengan Auditor Eksternal dari Sucofindo terdiri Budhi Subagio, Mochamad Taufiq H, dan Trainee atas nama Miranda Yustika. Terdapat 2 temuan AFI klausul 7.5 terkait distribusi SOP dan sebaiknya ada media pegawai dapat mengakses dokumen eksternal
- Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 30 April 2024 dan 23 Juli 2024. RTM ini membahas Status tindakan dan tinjauan manajemen sebelumnya isu eksternal dan internal, pihak yang berkepentingan dan ekspektasi, Informasi tentang kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu, kecukupan sumber daya, Efektifitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang, peluang peningkatan.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kegiatan yang dilaksanakan Tim Penataan Tatalaksana terkait PPID antara lain:

- Reviu Dokumen Informasi Dikecualikan (DIK) dan Daftar Informasi Publik (DIP) dan mengusulkan DIK dan DIP
- Pelayanan PPID tahun 2024 sebanyak 3 pelanggan yang meminta informasi.
- Pengisian SAQ Monev KIP di evortala.pom.go.id menu Monev KIP - SIMOTIF, Verifikasi SAQ (awal) oleh Tim Penilai dan Desk Verifikasi, perbaikan SAQ dan verifikasi SAQ akhir oleh Tim Penilai, Presentasi dan Wawancara. Penganugerahan Monev KIP pada REN BPOM 2024. PPID PMPUPO masuk kategori "Informatif" dengan nilai 96,97. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3.17. Tahun 2023 dengan nilai 93,8 dan tahun 2024 sebesar 96,97. Berdasarkan hasil monev KIP terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan yaitu: Untuk Verifikasi *Self Assessment Questionnaire* / SAQ dengan bobot 98.33% dengan perbaikan melakukan pemutakhiran informasi publik di berbagai media pelayanan secara harian

Pokja SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, meliputi :

a. Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Perencanaan SDM: Merencanakan kebutuhan SDM aparatur yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi.
2. Pengembangan dan Pelatihan: Mengembangkan dan melatih SDM aparatur untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur: Meningkatnya kemampuan dan kesadaran SDM Aparatur diharapkan dapat meningkatkan kinerja hasil yang dicapai oleh organisasi
- b. Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur
1. Peningkatan Kompetensi: Meningkatkan kompetensi SDM aparatur melalui pelatihan, workshop, dan pendidikan.
 2. Peningkatan Integritas: Meningkatkan integritas SDM aparatur melalui pengembangan nilai-nilai dan etika kerja.
 3. Peningkatan Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas SDM aparatur melalui pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja.
 4. Peningkatan Kepemimpinan: Meningkatkan kepemimpinan SDM aparatur melalui pengembangan kemampuan kepemimpinan dan manajemen.
- c. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
1. Meningkatkan Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan organisasi dan penggunaan sumber daya.
 2. Meningkatkan Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi dan penggunaan sumber daya.
 3. Meningkatkan Partisipasi: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan organisasi dan penggunaan sumber daya.
 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan: Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi kepada masyarakat.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan diantaranya adalah:

1. Penyusunan kebutuhan pegawai, kebutuhan pegawai yang disusun mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
2. Penyusunan pedoman pola mutasi internal, penyusunan pedoman pola mutasi internal disusun sebagai acuan dalam melakukan mutasi pegawai
3. Pengembangan Kompetensi ASN setiap ASN wajib dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP dalam 1 tahun, merupakan tindak lanjut dari: a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; [1] b. Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; c. Pelaksanaan Keputusan Kepala BPOM No. 221 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi ASN BPOM. Pengembangan kompetensi pegawai yang dilaksanakan mengacu terhadap hasil “*training need analysis*” serta mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Triwulan IV Tahun 2024 sesuai dengan database pengembangan kompetensi dalam aplikasi <https://siasn.pom.go.id> menu

pengembangan kompetensi 100% pegawai sudah mengikuti pelatihan dan mencapai 20 JP pengembangan kompetensi.

4. Penetapan kinerja individu, terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja individu, Direktorat memberikan reward terhadap individu terbaik melalui penetapan Employee of The Month serta penilaian Petugas Pelayanan Publik Terbaik.
5. Penegakan aturan disiplin, aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan. Sosialisasi terkait aturan disiplin / kode etik/kode perilaku pegawai dilaksanakan agar setiap pegawai dapat menegakkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku. Pelaporan penegakan disiplin juga telah dilaksanakan menggunakan pelaporan pada aplikasi SIMOD SIAN yang dilaporkan pada setiap bulan dan setiap terselenggaranya apel serta upacara nasional.
6. Sistem informasi kepegawaian, sistem informasi kepegawaian dilaksanakan secara terpusat, menggunakan aplikasi dari instansi yaitu aplikasi SIAN.

Pokja Akuntabilitas

Kelompok Kerja (Pokja) Akuntabilitas PMPUPO bertanggung jawab dalam memastikan implementasi sistem akuntabilitas yang efektif dan terkoordinasi dengan baik di lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang akan menunjang akuntabilitas Badan POM. Tim Pokja Akuntabilitas PMPUPO telah melakukan berbagai aktifitas mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi serta capaian kinerja.

Capaian yang telah dilakukan oleh Pokja Akuntabilitas antara lain:

1. Penyusunan Draft Renstra 2025 - 2029
 - Penyusunan draft Renstra 2025 - 2029 telah disusun bersama tim terkait di Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan
2. Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring (Monev) setiap bulan
 - Monev bulanan
 - Penyusunan laporan evaluasi kinerja secara berkala.
 - Peningkatan kepatuhan terhadap standar akuntabilitas yang ditetapkan.
3. Peningkatan Transparansi dan Pelaporan melalui site SIMonev
 - Publikasi laporan kinerja dan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan melalui <https://sites.google.com/view/simonevpmpupo/monev>
 - Penyediaan akses informasi yang lebih mudah terkait sistem akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penilaian SAKIP Tahun 2024, nilai total Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,475% dari nilai A tahun 2023 (80,38) turun menjadi nilai BB tahun 2024 (78,39). Parameter penilaian yang mengalami

peningkatan nilai, yaitu Perencanaan kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas. Terdapat 3 parameter penilaian yang mengalami penurunan yaitu pengukuran kinerja, pelaporan dan capaian Kinerja. Penurunan nilai ini menjadi perhatian untuk diperbaiki di tahun selanjutnya.

Tabel 32. Nilai SAKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020 - 2024

Tahun	Nilai	Predikat
2020	76,26	BB
2021	78,18	BB
2022	79,48	BB
2023	80,38	A
2024	78,39	BB

Tindakan lanjut serta rekomendasi untuk peningkatan sistem akuntabilitas di PMPUPO dan Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan, antara lain:

1. Pengukuran kinerja
 - Pada kertas kerja disajikan tabel baseline data dan target
 - Sumberdata dan cara pengukuran kinerja yang dilaporkan mudah ditelusur dituangkan dalam kertas kerja
2. Pelaporan Kinerja
 - Menyelaraskan data kinerja di aplikasi simetris dengan pelaporan kinerja dalam dokumen manual lainnya
3. Capaian Kinerja
 - Monitoring rutin capaian indikator kinerja agar tercapai sesuai perencanaan
4. Peningkatan Kapasitas SDM
 - Kebutuhan peningkatan kompetensi SDM dalam memahami dan mengimplementasikan sistem akuntabilitas.
 - Pelatihan yang masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas.
5. Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang Lebih Efektif
 - Diperlukan sistem Monev yang lebih terintegrasi dan efisien.
 - Penyempurnaan metode evaluasi agar lebih komprehensif dan berbasis data.

Pokja Pengawasan

Direktorat PMPUPO merupakan unit kerja di Badan POM yang memberikan pelayanan untuk pemerintah di tingkat pusat dan daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi di Direktorat PMPUPO harus dikelola berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi ini juga harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Direktorat PMPUPO berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*, yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel; Birokrasi yang kapabel; dan Pelayanan publik yang prima. Komitmen ini ditunjukkan Direktorat PMPUPO dengan upaya implementasi SNI ISO 37001:2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Manajemen Risiko pada Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Pokja Pengawasan telah melakukan aktivitas secara konsisten dan berkala terkait gratifikasi, pengendalian SPIP, Pegaduan, WBS, dan Benturan Kepentingan. Pokja Pengawasan juga berkomitmen untuk mengelola Implementasi Manajemen Risiko dan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Kegiatan berkala Pokja Pengawasan seperti Public Campaign (Sosialisasi dan Internalisasi) terkait Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan WBS melalui Inovasi AWAS dilakukan baik di media sosial whatsapp, instagram, YouTube, Zoom Meeting, KIE luring/daring, dll. Direktorat PMPUPO telah melakukan Sosialisasi Peraturan Benturan Kepentingan No 27 Tahun 2023, Peraturan BPOM tentang Gratifikasi, Jenis Gratifikasi, dll secara Internal pada tahun 2024. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi potensi Benturan Kepentingan. Selain internalisasi untuk pegawai, Direktorat PMPUPO juga terus melakukan sosialisasi terkait gratifikasi kepada pelanggan Direktorat PMPUPO karena gratifikasi merupakan salah satu sumber terjadinya Benturan Kepentingan.

Direktorat PMPUPO saat ini melakukan berbagai inovasi agar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dit. PMPUPO terimplementasi dengan baik, antara lain membuat pelaporan gratifikasi oleh pegawai di Direktorat PMPUPO melalui aplikasi SICEPU. Pelaporan ini merupakan bentuk penanganan Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi sebagai langkah awal dalam menganalisis gratifikasi yang diterima oleh pelapor untuk selanjutnya akan dilaporkan ke Inspektorat melalui Sang Integritas.

Direktorat PMPUPO telah melakukan *updating* identifikasi potensi benturan kepentingan secara periodik dari seluruh pegawai (ASN dan PPNPN). Untuk meningkatkan komitmen terhindar dari Benturan Kepentingan, seluruh pegawai harus menandatangani Pakta Integritas, Surat Komitmen dan Surat Pernyataan serta diketahui oleh Pimpinan Unit. Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan menunjukkan bahwa dari 64 pegawai terdapat 2 orang pegawai berpotensi Benturan Kepentingan (<https://sangintegritas.pom.go.id/>). Menindaklanjuti hal tersebut seluruh pegawai telah melakukan pelaporan potensi Benturan Kepentingan dan untuk 2 (dua) orang pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan sudah membuat surat pernyataan Potensi Benturan Kepentingan. Pimpinan Unit juga sudah mengeluarkan Surat Peringatan berupa Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT). Sebagai bentuk kepatuhan, seluruh pegawai telah melakukan pelaporan potensi Benturan Kepentingan pada aplikasi Sang Integritas.

Pada tahun 2024, Direktorat PMPUPO telah melaksanakan Awareness SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Sebagai tindak lanjut dari awareness SNI ISO 37001:2016, Direktorat PMPUPO melaksanakan Pelatihan Penyusunan Dokumen SMAP. Kemudian Direktorat PMPUPO dengan pendampingan konsultan (Rinjani Consultyng) menyusun dokumen penerapan SNI ISO 37001:2016 mulai dari kebijakan dan Pedoman SMAP, SOP SMAP, dan formulir SMAP serta melengkapi dokumen pendukung lainnya yang telah dilakukan Direktorat PMPUPO dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan. Selanjutnya Direktorat PMPUPO mengimplementasikan dokumen SMAP yang telah disusun, seperti melakukan Identifikasi isu internal eksternal, Sosialisasi Kebijakan SMAP, Identifikasi risiko, dll. Selanjutnya dilakukan Pelatihan Audit Internal SMAP tanggal 11 Juli 2024, Audit Internal SMAP tanggal 12 Juli 2024, Finalisasi Dokumen SMAP tanggal 18 dan 26 Juli 2024, Tinjauan FKAP SMAP tanggal 30 Juli 2024.

Kemudian pada tanggal 1 - 2 Oktober 2024, Direktorat PMPUPO telah mengikuti Audit Sertifikasi SMAP SNI 37001:2016 pada tanggal 1-2 Oktober 2024 secara luring di Ruang Rapat Dit. PMPUPO. Auditor SMAP berasal dari MSA Certification, yaitu M. Hatta Adam dan Alief Maulana Ilyas. Audit dihadiri oleh seluruh pegawai dan Tim SMAP Direktorat PMPUPO. Tujuan audit yaitu untuk mengevaluasi penerapan dan efektivitas Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan menetapkan rekomendasi hasil audit untuk tujuan sertifikasi SNI ISO 37001. Ruang lingkup audit SMAP meliputi seluruh proses bisnis di Direktorat PMPUPO, yaitu: Pengelolaan Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Pemberdayaan Fasilitator dan UMK Pangan Olahan, Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha oleh UPT BPOM, Peningkatan Peran Pemerintah Daerah. Hasil audit menunjukkan bahwa Direktorat PMPUPO BPOM telah memenuhi persyaratan dalam

menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai Standar SNI ISO 37001:2016 dan Direktorat PMPUPO telah memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 pada Oktober 2024.



Gambar 84. Capaian dan Kegiatan Pokja Pengawasan

Dalam rangka mencapai target maturitas Manajemen Risiko di atas level 3 (Risk Define), Direktorat PMPUPO melakukan beberapa rencana aksi dalam implementasi Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian risiko: identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan risiko dan pemantauan risiko sebagai berikut:
 - Menyusun Manajemen Risiko Semester 1 dan 2 Tahun 2024 dan Melaporkan pada Aplikasi SAPAAPIP dengan tepat waktu
 - Mereview kategori risiko pada saat Rapat Tinjauan Manajemen sehingga risiko di Direktorat PMPUPO memuat 10 kategori risiko, semula ada 7 kategori risiko.
 - Aktivitas Pengendalian Inheren untuk risiko baru
 - Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko Semester 2 Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 2024
2. Meningkatkan Kompetensi seluruh pegawai dengan mengikutsertakan pada:
 - Bimtek Manajemen Risiko pada 25 Juni 2024 di Gedung Batik Lantai 6 BPOM dengan narasumber dari PPM Management
 - Bimtek Manajemen Risiko Lanjutan pada 5 Agustus 2024 di Hotel Wyndham Jakarta dengan narasumber dari BPKP
 - 6 (enam) pegawai mengikuti Pelatihan QRMO (Qualified Risk Management Officer) di PPM Management pada 3-5 Desember 2024.
3. Menyusun Pedoman Manajemen Risiko yang memuat Kriteria Kemungkinan dan Dampak Risiko sesuai bisnis proses Direktorat PMPUPO

4. Internalisasi UMPAN (Update Manajemen Risiko Tiap Bulan) saat monev bulanan/apel pagi (update daftar risiko dan tindakan mitigasi risiko)

5. Mengikuti Desk Maturitas Manajemejen Risiko oleh Inspektorat. Namun sebelumnya Direktorat PMPUPO telah melakukan Penilaian mandiri (*Gap Analysis*) untuk maturitas manrisk dan melengkapi LKE Maturitas Manajemen Risiko.

Hasil penilaian Desk Maturitas Manajemen Risiko Dit PMPUPO menunjukkan bawah Maturitas Manajemen Risiko Direktorat PMPUPO pada tahun 2024 yaitu Level 3 (Risk Defined) dengan nilai 3,4 dari sebelumnya 2,9 tahun 2023.

Pokja Pelayanan Publik

Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dilakukan melalui offline dan melalui online. Produk Pelayanan Konsultasi untuk masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan terdiri dari konsultasi tentang penerapan CPPOB bagi UMKM Pangan Olahan dan Konsultasi tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen pangan olahan industri rumah tangga (SPP-IRT). Konsultasi secara online dilakukan melalui live chat pada aplikasi sppirt.pom.go.id dan istanaumkm.pom.go.id. Sedangkan layanan konsultasi offline melalui tatap muka di Gedung Athena lantai 3.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan diantaranya:

1. Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan unsur perwakilan dari pengguna layanan, stakeholder pelayanan publik, ahli/praktisi, organisasi masyarakat sipil, media masa. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut telah diselenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada 28 Maret 2028. FKP merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menyelaraskan kemampuan pelayanan dengan harapan publik dan meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik Beberapa rekomendasi FKP yang telah di tindaklanjuti antara lain Pelatihan PKP muda bagi petugas pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan publik yang ditandai dengan peningkatan nilai SKM dan nilai UPP.

2. Mempertahankan profesionalitas SDM melalui peningkatan kompetensi petugas secara rutin dengan tujuan agar petugas layanan publik memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang baik.
3. Penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pelayanan publik termasuk untuk kelompok rentan.
4. Melakukan transformasi digital dalam sistem informasi pelayanan publik agar dapat beradaptasi di era digital, selain itu transformasi digital ini juga untuk dapat menjangkau pengguna layanan disemua wilayah Indonesia.
5. Penyediaan media konsultasi dan pengaduan yang mudah dijangkau oleh pengguna layanan yaitu media dalam bentuk online maupun offline.

Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan pada tahun 2024 dapat diketahui melalui parameter berikut:

1) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

SKM sebagai *tools* untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Melalui SKM dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan pada masing-masing unsur. Kuesioner survei terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Aspek-aspek pada survei tersebut meliputi (1) Persyaratan (2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur (3) Waktu Penyelesaian (4) Biaya/Tarif (5) Produk Layanan (6) Penanganan Pengaduan (7) Kompetensi Pelaksana (8) Perilaku Pelaksana dan (9) Sarana dan Prasarana.

Pada Tahun 2024 Nilai SKM sebesar 91,92. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai SKM Tahun 2023 (91,26). Selain dari SKM periodik tersebut Direktorat PMPUPO menyelenggarakan SKM Mandiri setiap layanan berlangsung dan dianalisis setiap bulan sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dapat dimonitoring setiap bulan dan dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan pada setiap bulan berjalan.

2) Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Dalam rangka pelaksanaan penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 04 Tahun 2023 Tanggal 15 Februari 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas, maka

perlu dilakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan setiap bulan terhadap seluruh responden yang telah menerima layanan 100% yang digunakan untuk mengisi nilai komponen hasil pada Lembar Kerja Evaluasi PMPZI di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2024 yaitu 3,84, hal ini menunjukkan hasil kinerja **Memuaskan**. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada tahun 2024 menunjukkan nilai 3,9 yang menunjukkan hasil kinerja **Bersih dari Korupsi**. Berdasarkan hasil analisis nilai IPP dan IPAK telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk WBBM.

3) Nilai Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dengan tujuan untuk mengukur efektivitas pelayanan publik. Indeks pelayanan publik (IPP) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- b. Profesionalitas SDM (25%);
- c. Sarana Prasarana (18%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- f. Inovasi (12%).

Pada Tahun 2024 IPP di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yaitu sebesar 4,96 dan telah melebihi target (4,9) serta telah mendapatkan nilai dengan kategori Pelayanan Prima.

4) Pengaduan Pelayanan

Pengaduan terkait pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dibuka melalui kanal aplikasi lapor.go.id, simpelpk.pom.go.id; email; telepon; Whatsapp dan website ditpmpupo.pom.go.id yang menunjukkan hasil NIHIL. Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari hal ini adalah sosialisasi kanal pengaduan pelayanan publik pada pengguna layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

SASARAN KEGIATAN 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
Indikator Kinerja Utama 2	Nilai Pengelolaan Kearsipan

1. Implementasi RB

Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan Kearsipan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan tahun 2023 dilaksanakan secara daring oleh tim pengawas dari Biro Umum BPOM pada tanggal 14 Maret 2024. Berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BPOM Nomor KA.03.2.07.24.563 tanggal 19 Juli 2024 hal Penyampaian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal 2024 di Lingkungan Badan POM disampaikan bahwa Nilai Monev Pengelolaan Kearsipan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sebesar 97,71 dari target 97,5 sehingga capaian 100%.

SASARAN KEGIATAN 9	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang Berkinerja Optimal
Indikator Kinerja Utama 1	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

1. Pengembangan Kompetensi ASN

Setiap ASN wajib dikembangkan kompetensinya minimal 20 JP dalam 1 tahun, merupakan tindak lanjut dari: a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; [1] b. Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; c. Pelaksanaan Keputusan Kepala BPOM No. 221 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi ASN BPOM. Pengembangan kompetensi disediakan untuk semua pegawai Direktorat PMPUPO, baik secara *offline* maupun *online*. Semua pegawai mempunyai hak untuk mengikuti pengembangan kompetensi melalui jaringan IDEAS Login (pom.go.id).

Hasil monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Triwulan IV Tahun 2024 sesuai dengan database pengembangan kompetensi dalam aplikasi <https://siasn.pom.go.id> menu pengembangan

kompetensi 100% pegawai sudah mengikuti pelatihan dan mencapai 20 JP pengembangan kompetensi. Sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi tahun 2024, terdapat 7 kegiatan:

Tabel 33. Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang Direncanakan

No	Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang Direncanakan
1	Bimbingan Teknis Mindfulness Awareness at Workplace
2	Internalisasi Peraturan BPOM No.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga
3	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural (Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural / Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan (ASESMEN KOMPETENSI MANAJERIAL & SOSIAL KULTURAL)
4	Workshop Risk Communication / KOMUNIKASI DIGITAL
5	Benchmarking Pelayanan Publik dan Layanan Prima / STUDI BANDING WBBM DAN PELAYANAN PUBLIK
6	Bimtek Kepemimpinan Situasional
7	PELATIHAN TEKNIK KOMUNIKASI ADVOKASI "Menggerakkan Stakeholder Menuju Capaian Kinerja BPOM yang Optimal"

Kegiatan pengembangan kompetensi ini telah dilaksanakan dari bulan Januari - Desember 2024, berjalan dengan lancar, dengan narasumber dari pihak di luar BPOM dan juga internal BPOM.

Selain itu pada tahun 2024 diadakan kegiatan pelatihan yang tidak terencana seperti Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender selama 2 hari dari tanggal 1-2 April 2024. Kegiatan ini dilakukan di Gedung Bhinneka Tunggal Ika dan Gedung Merah Putih. Narasumber pada pelatihan ini adalah Bapak Yulius Hendra Hasanuddin. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pegawai mengenai pengarusutamaan gender yang sedang gencar diinformasikan. Pemahaman pegawai mengenai isu gender masih sangat terbatas. Maka dari itu kegiatan ini sangat membantu dalam menambah pengetahuan pegawai. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.



Gambar 85. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender

Dalam penyelenggaraan dan kegiatan pelayanan publik Badan POM, pegawai dituntut untuk dapat melakukan pelayanan prima bagi pelanggan yang melakukan layanan di Badan POM. Salah satu bentuk pembekalan dan pelatihan yang dilakukan oleh unit adalah dengan melakukan kegiatan Pelatihan Pelayanan Publik Pelayanan di Era Disrupsi Digital dan Sukses Menjalin Komunikasi Dengan Gen X, Y dan Z dan Grooming. Kegiatan ini berlangsung sebanyak 2 sesi. Sesi pertama dilakukan di Crowne Hotel, Bandung pada tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya sesi ke 2 dilakukan di gedung Aula Merah Putih Badan POM, pada tanggal 3 April 2024. Narasumber pada kegiatan ini adalah Dinda Kinanti R.N dan Lismayarti, S.K.M., M.M dari lembaga The Bridge Academy. Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan pelanggan serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi mereka. Selain itu juga dapat menambah keterampilan dalam bersikap, pemilihan baju dan penampilan, hal ini sangat penting dan dapat meningkatkan pelayanan organisasi kepada masyarakat luas.



Gambar 86. Kegiatan Pelatihan Pelayanan Publik Pelayanan di Era Disrupsi Digital dan Sukses Menjalin Komunikasi Dengan Gen X, Y dan Z dan *Grooming*

Selama ini *engagement* kader dan fasilitator dirasakan belum optimal. Diperlukan teknik-teknik yang mampu menjadikan para kader dan fasilitator merasa menjadi bagian dari BPOM dan bersemangat berjuang bersama BPOM. Pelatihan RCCE sangat sesuai dan diperlukan untuk mengaktivasi gerak kader dan fasilitator sehingga lebih berkesinambungan dan untuk mendukung program-program di BPOM yang banyak melibatkan Ormas ataupun Lembaga lain yang terkait.

Pelatihan RCCE telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 di Grand Mercure Kemayoran. Narasumber pelatihan ini yaitu Ibu Dina Aditya Hermanadi - PT. Kaya Kreasi Gemilang.



Gambar 87. Kegiatan Pelatihan RCCE

Bentuk lainnya dari pengembangan kompetensi adalah Tugas Belajar dan Izin Belajar. Pegawai diberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu sesuai dengan kebutuhan pegawai dan organisasi.

Pengembangan kompetensi pegawai ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis agar mampu bekerja sesuai dengan standar nasional maupun internasional.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan pegawai agar berdaya saing dalam meningkatkan kinerja organisasi
3. Peningkatan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pegawai dan organisasi agar pegawai dapat berkembang dan untuk meningkatkan kemampuan dalam kinerja organisasi.

2. Forum Koordinasi Teknis Deputi Pengawasan Pangan Olahan

Kegiatan Forum Koordinasi Teknis (Forkontek) Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2024 diselenggarakan pada 3-6 Maret 2024 di Crowne Plaza Hotel Bandung.

Kegiatan dilaksanakan secara *hybrid*, luring dan daring melalui zoom meeting. Kegiatan dibuka oleh Ibu Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Peserta yang hadir pada kegiatan Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2024 terdiri dari: a. Internal Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan: 75 orang; b. Internal BPOM (Lintas Unit/Kedeputian): 7 orang; c. Kementerian/Lembaga: 3 orang.

Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ini bertema : **Harmonisasi Kinerja, Meningkatkan Kolaborasi dalam Pengawasan Pangan**. Forum Koordinasi Teknis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan koordinasi internal Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk menjaga konsistensi dan komitmen dalam implementasi core value BerAKHLAK dalam peningkatan produktivitas pekerjaan.
- b. Sinergisme pelaksanaan RB di Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan seluruh pemangku kepentingan

Rincian kegiatan yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut :

- a. Sosialisasi

Sosialisasi terkait Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023. Narasumber berasal dari Deputy Koordinasi PKE RB Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah III Kementerian PANRB.

- b. Training Motivasi

Training bersifat memotivasi seluruh pegawai di Kedeputan Bidang Pengawasan Pangan Olahan bertema *Teamwork Principle: Mind Heart Management for Happiness at Work*. Narasumber bernama M. Aqil Baihaqi, S.Ag., M.Sos, yang merupakan seorang Motivator Nasional peraih rekor MURI dalam memberikan “Pelatihan Motivasi Terbanyak kepada Perusahaan dalam Kurun Waktu Satu Tahun”. Beliau dikenal sebagai *Mind Heart Management Motivator*, Professional Trainer BNSP RI dan juga Motivator Nasional Terbaik di Indonesia.

- c. *Outbound*: Internalisasi Core Value BerAKHLAK di Lingkungan Deputy 3

Outbound dilaksanakan di Bale Bambu Ciwidey berupa Fun *Off Road* atau *Rafting*.

- d. Malam Keakraban/Gala Dinner di Crowne Plaza Hotel Bandung

- e. Pemilihan *Employee of the Month* untuk periode (TW 3-4 Tahun 2023).

- EoTM TW 3 2023: Perdana Adhi Nugroho, S.Farm, Apt., M.Sc - Dit. Wasprod PO
- EoTM TW 4 2023: Mochammad Sobrian Kharismadani, A.Md.Ak. - Dit. RPO

- f. *Fun Game*, diisi dengan games edukatif dan menarik untuk menambah rasa keakraban pegawai dan sebagai ajang refreshing/penyegaran, untuk meningkatkan semangat kerja selanjutnya.

- g. *Performance* Kolaborasi Deputy 3

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi internal di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk menjaga konsistensi dan komitmen dalam implementasi core value BerAKHLAK dalam peningkatan produktivitas pekerjaan.

- h. Perpindahan dengan pegawai yang pindah tugas di luar kedeputan 3. Beberapa pegawai kedeputan 3 harus berpindah tugas keluar kedeputan 3, karena lulus sebagai PPPK dan ditempatkan di beberapa unit kerja lain.

i. Penyerahan Simbolis Kepanitiaan Forkontek Tahun 2025

Penyerahan Simbolis Kepanitiaan Forkontek Tahun 2025 dari Plt. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan kepada Direktur Registrasi Pangan Olahan.

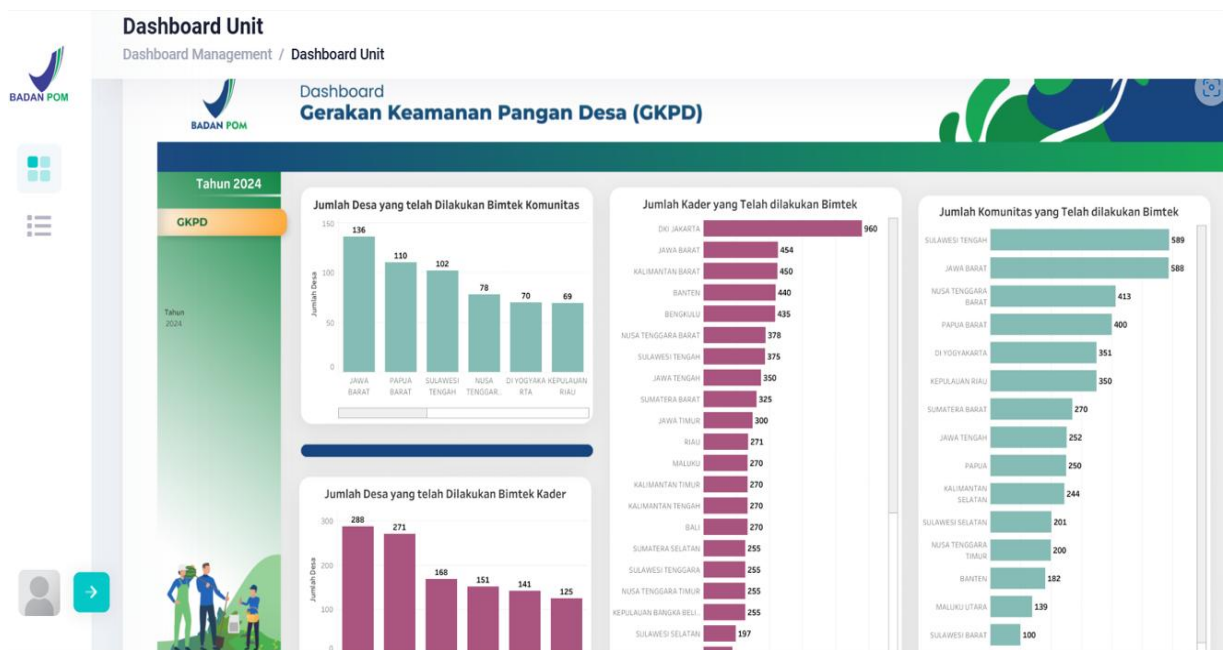


Gambar 88. Kegiatan Forum Koordinasi Teknis Deputy 3 tahun 2024

SASARAN KEGIATAN 10	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
Indikator Kinerja Utama 1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

1. Pengelolaan TIK

Pengelolaan data dan informasi diutamakan dengan pemantauan update data di subsite command center BPOM (*BPOM Operational Center*) serta pemanfaatan *email corporate* oleh pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat. Tampilan dashboard BOC Dit PMPUPO meliputi Data Gerakan Keamanan Pangan Desa yaitu Jumlah Desa yang terintervensi berdasarkan provinsi dan Jumlah Kader Terlatih berdasarkan Provinsi.



Gambar 89. Tampilan Dashboard BOC untuk data Gerakan Keamanan Pangan Desa

Pemanfaatan *email corporate* dipantau tiap bulan. Bagi pegawai yang tidak mengakses email corporate dalam 1 bulan, dinyatakan email pegawai yang bersangkutan tidak aktif. Untuk itu, diingatkan secara intensif kepada seluruh pegawai melalui WA grup untuk mengakses dan memanfaatkan *email corporate* dalam berkomunikasi dalam rangka keperluan tugas dan kegiatan Direktorat (Gambar 90)



Selamat siang bapak/ibu, izin mengingatkan untuk dapat mengakses email corporate dibulan desember

Gambar 90. Infografis Peningkat Akses *Email Corporate* Bagi Pegawai

Berdasarkan penilaian Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan diperoleh Indeks Pengelolaan data dan informasi yang optimal di Dit PMPUPO tahun 2024 adalah 3 dari target nilai 3.

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi												
Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email												
	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
total_akun_individu	44	43	44	49	50	51	51	52	50	49	50	51
total_akun_unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
total_individu_login	44	43	39	49	50	51	51	50	49	48	49	44
total_individu_aktif	44	43	39	49	50	51	51	50	49	48	49	44
total_unitbalai_aktif	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aspek Login (%)	30	30	26,59	30	30	30	30	28,85	29,4	29,39	29,4	25,88
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	30	30	26,59	30	30	30	30	28,85	29,4	29,39	29,4	25,88
Perhitungan (%)	100	100	93,18	100	100	100	100	97,7	98,8	98,78	98,8	91,76
Perhitungan per TW	100	100	97,73	98,3	98,64	98,86	99,03	98,86	98,85	98,85	98,84	98,25
Nilai Indeks	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC												
	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Aktivitas												
Akses BOC (%)	60	45	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Login BOC (%)	40	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Total	100	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Perhitungan per TW	100	87,5	91,67	93,75	95	95,83	96,43	96,88	97,22	97,5	97,73	97,92
Nilai Indeks Per TW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nilai Indeks Data dan Informasi yang telah dimutakhirkan di BOC												
	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Aktivitas												
Jumlah Frekuensi Verifikasi Data	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Perhitungan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nilai Indeks	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal												
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Indeks Pemanfaatan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Indeks Pemutakhiran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Tabel 34. Tampilan Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Dit PMPUPO Tahun 2024

Tahun 2024 pengadaan Dit PMPUPO yang dilakukaN yaitu pengadaan laptop sebanyak 6 (enam) unit untuk pegawai dan pembelian *software pdf*. Pengadaan ini merupakan upaya agar kinerja yang dihasilkan pegawai Dit PMPU dan Kedeputusan 3 akan terus meningkat.

Pertemuan monitoring pengembangan dan pemanfaatan IT dilakukan rutin tiap bulan yang diikuti oleh semua perwakilan anggota Timdi Dit PMPUPO. Dengan pertemuan rutin ini kendala terkait IT dapat segera diselesaikan dan segera dikonsultasikan ke Pusdatin BPOM untuk dicarikan solusi penyelesaian masalahnya. Petugas JFT Pranata Komputer Dit PMPUPO pun selalu siap mengecek dan memperbaiki jika ada kendala terkait IT,

2. Updating dan Pengembangan Aplikasi

Subsite dan aplikasi yang dikembangkan oleh Tim di Direktorat terus dipantau dan dilakukan pemeliharaan. Terdapat 6 (enam) aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat, dengan dibantu pemantauan dan penyimpanan datanya di server Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (PDN Kominfo). Keenam aplikasi yang dilakukan pengembangan yaitu:

- Istana UMKM (istanaumkm.pom.go.id), mengembangkan fitur database pelaporan fasilitator pangan, termasuk dari mahasiswa program MBKM Mandiri.
- Aplikasi Penerbitan dan Pengawasan SPP-IRT (sppirt.pom.go.id), mengembangkan fitur verifikasi label produk IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) berbasis AI (*Artificial Intelligence*)
- Gerakan Keamanan Pangan Desa Online (gkpd.pom.go.id), mengembangkan dan menambahkan modul dalam sistem pelaporan terkait desa pangan aman untuk menyesuaikan fitur-fitur dapat digunakan pada *platform* yang baru
- Sistem Informasi Pangan Aman dari Bahan Berbahaya (sipaman.pom.go.id), mengembangkan form inputan dan rekap data terkait pelaporan data pasar aman dari bahan berbahaya berbasis komunitas.
- Pelaporan Program Sekolah dengan PJAS Aman - Siap Sapa (siapsapa.pom.go.id), mengembangkan menu replikasi form inputan dan output report profiling serta redesign tampilan aplikasi dan restrukturisasi menu terkait pelaporan data PJAS.
- Aplikasi Klub pompi (klubpompi.pom.go.id) mengembangkan framework dan security system untuk menyesuaikan kebutuhan sistem dengan perkembangan framework version dan memaksimalkan keamanan sistem dalam aplikasi ini.

Sebelum dilaksanakan pengembangan aplikasi, harus mendapat persetujuan melalui portal **ega SPBE**. Portal Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (ega SPBE) merupakan aplikasi yang berbasis website yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk memudahkan Kementerian dan Lembaga pemerintahan dalam mengajukan program kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). dari

Kementerian KOMINFO. Pemeliharaan aplikasi dan alat pengolah data juga telah dilaksanakan pada tahun 2024.

PR.10.02.2.21.04.24.10							3 / 100 Kegiatan
Aplikasi GKPD	Perangkat Lunak / Aplikasi	60,000,000	4132. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4132.UBA.001. Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	4 Jul 2024 09:33	SELESAI	
Aplikasi SPP-IRT	Perangkat Lunak / Aplikasi	100,000,000	4132. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4132.FBA.001. Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	4 Jul 2024 09:33	SELESAI	
Aplikasi SIPAMAN	Perangkat Lunak / Aplikasi	70,000,000	4132. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4132.UBA.001. Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	4 Jul 2024 09:33	SELESAI	
PR.10.02.2.21.04.24.10							6 / 100 Kegiatan
Aplikasi SIPAMAN	Perangkat Lunak / Aplikasi	70,000,000	4132. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4132.UBA.001. Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	8 May 2024 11:19	Draft	
Aplikasi SPP-IRT	Perangkat Lunak / Aplikasi	100,000,000	4132. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4132.FBA.001. Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	8 May 2024 11:01	Draft	
Aplikasi GKPD	Perangkat Lunak / Aplikasi	60,000,000	4132. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4132.UBA.001. Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	8 May 2024 10:30	Draft	
Aplikasi Istanaumkm	Perangkat Lunak / Aplikasi	30,000,000	4132. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4132.QDC.001. Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	2 May 2024 09:36	SELESAI	
Aplikasi Klubpompi	Perangkat Lunak / Aplikasi	70,000,000	4132. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4132.UBA.001. Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	2 May 2024 09:36	SELESAI	
Aplikasi SIAPSAPA	Perangkat Lunak / Aplikasi	70,000,000	4132. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4132.UBA.001. Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	2 May 2024 09:36	SELESAI	

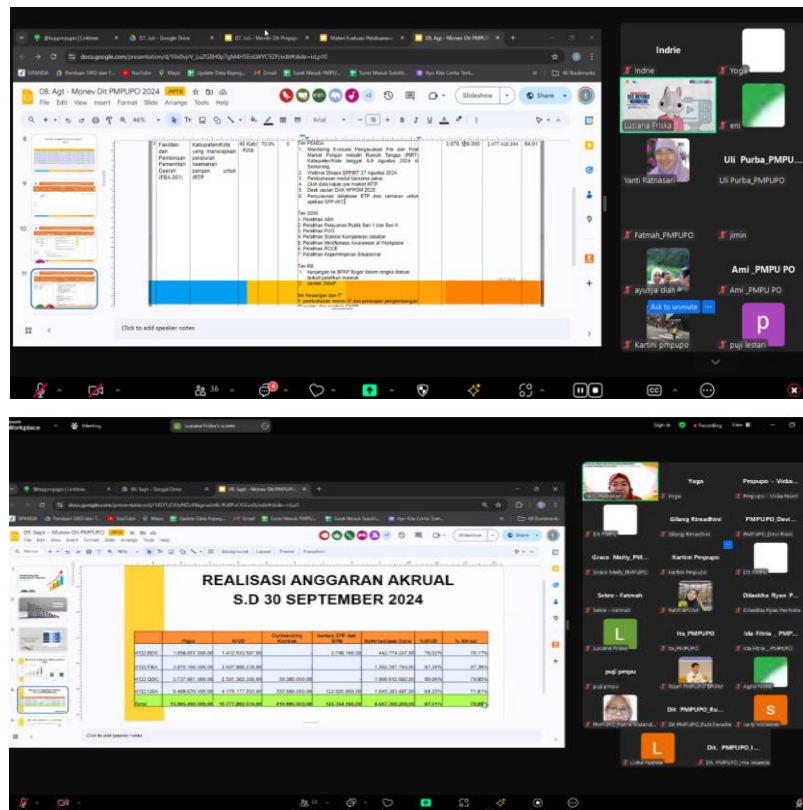
Gambar 91. Aplikasi yang dikembangkan oleh Dit PMPUPO dalam Portal ega SPBE

SASARAN KEGIATAN 11	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Secara Akuntabel
Indikator Kinerja Utama 1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPUPO

1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Administrasi PMPUPO

Dukungan administrasi ini sebagai supporting berjalannya operasional Direktorat selama 1 tahun anggaran. Dukungan ini berupa penyediaan biaya keperluan kantor sehari-hari, penyediaan ATK dan pencetakan, konsumsi rapat, pengadaan dan *maintenance* alat pengolah data, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain itu juga dukungan ini berupa penyediaan biaya perjalanan dinas baik dalam kota, maupun luar kota, baik untuk pimpinan maupun petugas.

Monitoring dan evaluasi capaian indikator kegiatan dan realisasi anggaran dilaksanakan secara rutin setiap awal bulan (Gambar 80). Dengan monev secara rutin ini diharapkan capaian indikator dan realisasi anggaran terpantau dengan baik, bila ada kendala dapat segera diupayakan rencana tindak lanjut agar hambatan dapat dikendalikan.



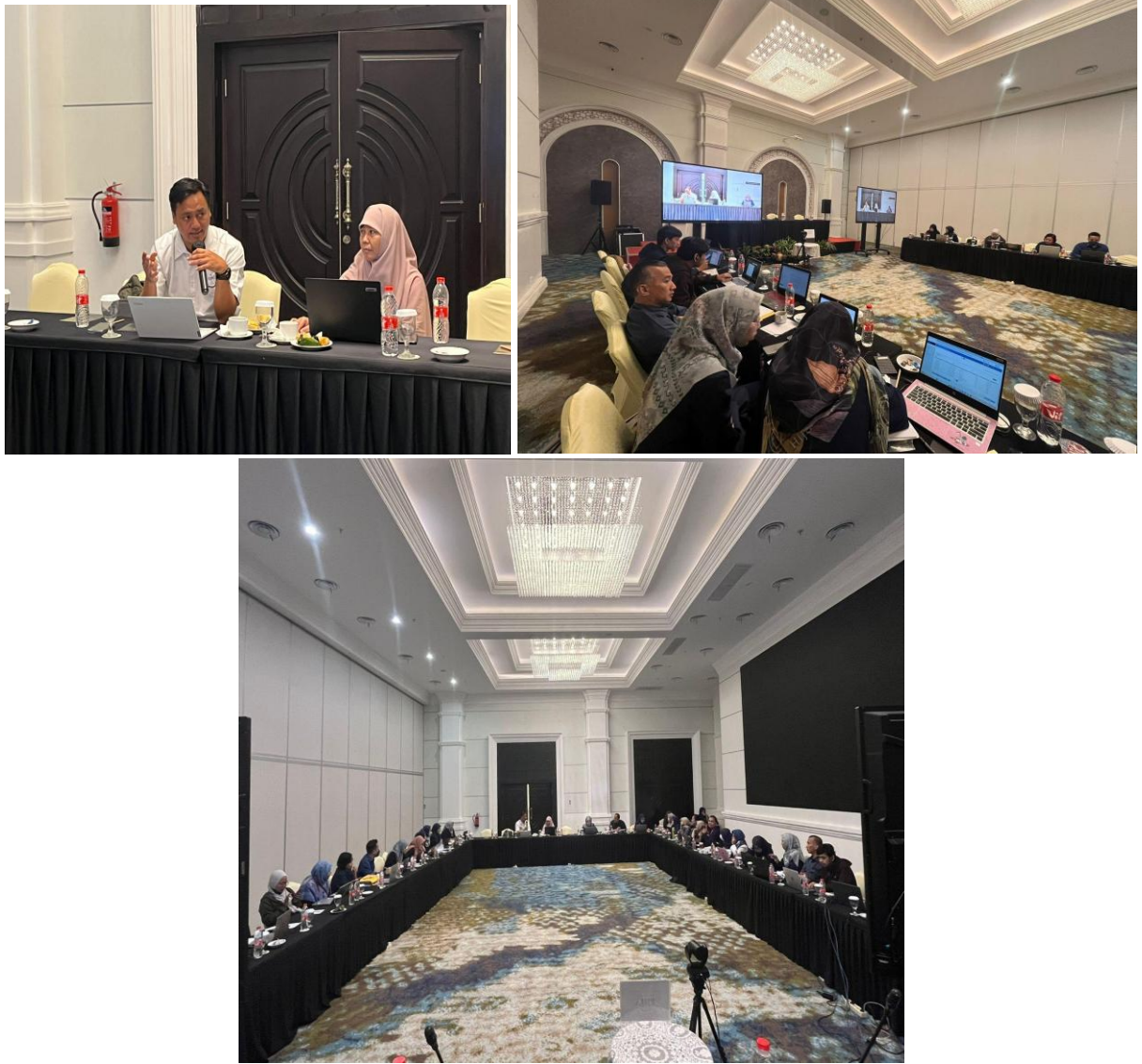
Gambar 92. Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulanan

2. Pengelolaan Satker

Pengelolaan administrasi keuangan berperan penting dalam membantu kelancaran proses penyelesaian berkas pertanggungjawaban dan pencatatan dokumen dalam rangka penyerapan anggaran di Kedepuitan 3, termasuk untuk pencapaian target efisiensi penggunaan anggaran Dit PMPUPO. Operasional pengelolaan Satker digunakan untuk kebutuhan pengelolaan kegiatan di Satker Kedepuitan III sehingga proses pengelolaan anggaran berjalan lancar. Beberapa kali pertemuan dilakukan untuk konsolidasi agar proses administrasi tertib dan lancar sesuai target.

Tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kali pembahasan terkait pengelolaan pajak, pengelolaan perjalanan dinas dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), bersama narasumber dari Kementerian Keuangan. Dokumentasi pelaksanaan pembahasan satker seperti tampak pada Gambar 93.

Pengelolaan Satker ini disediakan untuk memperlancar proses penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan sehingga dana yang diperlukan untuk penyelesaian kegiatan dapat diterima sesuai kebutuhan dan dilaksanakan secara akuntabel.



Gambar 93. Pembahasan Pengelolaan Administrasi Satker Kedeputan 3

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Tahunan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja selama periode Januari-Desember 2024. Laporan ini mencakup pemaparan mengenai pelaksanaan kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan tahun 2024.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sepanjang Tahun 2024 dengan mengacu pada visi Badan POM. Pada laporan tahunan 2024 ini, penyajian hasil-hasil kegiatan dikelompokkan berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian 11 (sebelas) Sasaran Kinerja Direktorat dan 16 (enam belas) indikator kinerja sasaran kegiatan yang mendukung Sasaran Program Deputi 3.

Dari 16 Indikator kinerja, terdapat 2 indikator yang belum mencapai target dengan kategori cukup, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dengan capaian 99,60 dan IP-ASN dengan capaian 95,22. Masih perlu upaya perbaikan sedikit lagi agar dapat memperoleh realisasi sesuai target. Sedangkan untuk realisasi anggaran pada akhir tahun mencapai 99,99%.

Kinerja dan juga kualitas pelayanan publik di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan terus bertumbuh dan berkembang dengan baik, dibuktikan dengan diberikannya penghargaan diantaranya penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 kategori “Pelayanan Prima”, Sertifikat Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Kategori Pelaksana Unit Kerja Pusat sebagai badan publik “informatif, Sertifikat Unit Kerja yang Komitmen Perbaikan Berkelanjutan dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Tahun 2024. Beberapa penghargaan lainnya yang diraih juga makin memacu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan untuk dapat memberikan kinerja terbaik selain juga terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala di berbagai aspek dalam rangka *continuous improvement*

Namun, masih tetap diperlukan monitoring dan evaluasi berkala di berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses bisnis pelayanan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, melalui Laporan Tahunan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2024 ini dimohon kritik dan saran dari semua pemangku kepentingan agar kami dapat meningkatkan kinerja dan terus berinovasi untuk menunjang pencapaian visi dan misi BPOM.

Melalui semangat tinggi dan kebersamaan, diharapkan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dapat terus berkinerja optimal dengan dukungan seluruh

personel dan menjalin kerjasama yang yang baik dengan berbagai pihak terkait, internal maupun eksternal yaitu para stakeholders.

4.2 SARAN

Dari kesimpulan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan kegiatan yang SMART dan applicable;
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran;
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi, informasi, dan digital dalam memberikan pelaksanaan tugas pemerintahan berbasis teknologi;
4. Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
5. Menerapkan sistem reward dan punishment bagi pegawai secara rutin/berkelanjutan dan mendokumentasikan proses pemberian reward dan punishment dengan tertib; dan
6. Peningkatan kompetensi SDM yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rincian Peralatan, Meubelair, dan Perangkat lainnya di Dit. PMPUPO

No	Nama Barang	2021	2022	2023	2024
1	Backdrop	3	3	2	0
2	Mesin Ketik Listrik	1	1	0	0
3	Dispenser	3	3	3	3
4	Lemari Besi/ Metal	22	22	22	22
5	Lemari Kayu	10	10	10	10
6	Locker	2	2	2	2
7	Kulkas	3	3	3	3
8	Alat Penghancur Kertas	1	1	1	1
9	LCD Projector/ Infocus	4	4	2	2
10	Meja Kerja Kayu	45	45	45	45
11	Kursi Besi/ Metal	41	41	41	41
12	Meja Rapat	2	2	1	2
13	Meja Receptionis	1	1	1	1
14	Televisi	2	2	2	2
15	Handy Cam	3	3	1	1
16	Kursi Dorong	74	74	74	72
17	Microwave	2	2	1	0
18	Laser Pointer	5	5	0	0
19	Video Keamanan Pangan	3	3	3	0
20	Camera digital	6	6	6	4
21	Telephone (PABX)	1	1	1	1
22	Sofa	1 set	1 set	1 set	1 set
23	Pesawat Telephone	3	3	3	0
24	Facsimile	3	3	3	3
25	Meja Besi	1	1	1	0
26	Meja + Kursi Kayu	1 set	1 set	1 set	1 set
27	P.C Unit	61	61	61	50
28	Note Book	60	75	75	61
29	Printer (Peralatan Personal Komputer)	55	55	55	50
30	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8	8	8	5
31	External/ Portable Hardisk	8	8	8	8
32	Server	4	4	4	4
33	Software Computer	12	12	12	7
34	Brankas	2	2	2	2
35	Tablet	2	2	2	2
36	Maket Makanan	1	1	1	1
37	Mobil minibus	1	1	1	1